

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



NOVEMBER
2020

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi
Tim Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT
Jl. El Tari No. 39 Kupang – NTT
[0380] 832-364/827-916 ; fax : [0380] 822-103
www.bi.go.id

Kata Pengantar

Sejalan dengan salah satu tugas pokok Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur di daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kontribusi secara optimal dalam proses formulasi kebijakan moneter. Secara triwulanan KPw BI Provinsi NTT melakukan pengkajian dan penelitian terhadap perkembangan perekonomian daerah sebagai masukan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia dalam kaitan perumusan kebijakan moneter tersebut. Selain itu kajian/analisis ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi eksternal *stakeholder* setempat, yaitu Pemda, DPRD, akademisi, masyarakat serta *stakeholder* lainnya.

Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mencakup Ekonomi Makro Regional, Perkembangan Inflasi, Perkembangan Perbankan dan Sistem Pembayaran, Keuangan Pemerintah, Kesejahteraan serta Prospek Perekonomian Daerah pada periode mendatang. Dalam menyusun laporan ini digunakan data yang berasal dari internal Bank Indonesia maupun dari eksternal, dalam hal ini dinas/instansi terkait.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas isi dan penyajian laporan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam bentuk penyampaian data maupun dalam bentuk saran, kritik, dan masukan sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Kami mengharapkan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini, kiranya dapat terus berlanjut di masa yang akan datang.

Kupang, November 2020
Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ttd.

I Nyoman Ariawan Atmaja
Deputi Direktur

Daftar Isi

Halaman Judul -----	i
Kata Pengantar -----	ii
Daftar Isi -----	iii
Daftar Grafik -----	v
Daftar Tabel -----	viii
Daftar Gambar -----	ix
Ringkasan Eksekutif-----	x
Tabel Indikator Ekonomi Terpilih Provinsi Nusa Tenggara Timur-----	xiii

BAB I EKONOMI MAKRO REGIONAL

1.1 Kondisi Umum -----	1
1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi Permintaan -----	3
1.2.1. Konsumsi -----	4
1.2.2. Investasi -----	7
1.2.3. Ekspor dan Impor -----	10
1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha-----	12
1.3.1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan -----	14
1.3.2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor --	16
1.3.3. Konstruksi-----	17
1.3.4. Lapangan Usaha Lainnya -----	19

BOKS 1. PEMULIHAN SEKTOR PARIWISATA PROVINSI NTT DI TENGAH

ADAPTASI KEBIASAAN BARU -----	20
-------------------------------	----

BAB II KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Kondisi Umum -----	24
2.2 APBD Pemerintah Provinsi NTT-----	26
2.2.1. Pendapatan APBD Provinsi NTT -----	26
2.2.2. Belanja APBD Provinsi NTT -----	28
2.3 APBD Kabupaten/Kota -----	30
2.3.1. Pendapatan APBD Kabupaten/Kota-----	30
2.3.2. Belanja APBD Kabupaten/Kota-----	32
2.4 APBN di Provinsi NTT -----	34

BAB III PERKEMBANGAN INFLASI

3.1. Perkembangan Inflasi Secara Umum -----	36
3.2. Inflasi Berdasarkan Kelompok Komoditas -----	38
3.2.1 Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau-----	38
3.2.2 Kelompok Pakaian dan Alas Kaki-----	39
3.2.3 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RT -----	40
3.2.4 Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan RT-----	41
3.2.5 Kelompok Kesehatan-----	41
3.2.6 Kelompok Transportasi -----	42
3.2.7 Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan-----	43
3.2.8 Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya-----	43
3.2.9 Kelompok Pendidikan-----	44

3.2.10 Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran-----	44
3.2.11 Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya-----	45
3.3. Inflasi Berdasarkan Kota -----	46
3.3.1 Inflasi Kota Kupang-----	46
3.3.2 Inflasi Kota Maumere -----	46
3.3.3 Inflasi Kota Waingapu-----	47
3.4. <i>Tracking</i> dan Proyeksi Inflasi Triwulan II 2020 -----	48
3.5 Aktivitas Pengendalian Inflasi oleh TPID-----	48
BAB IV STABILITAS KEUANGAN DAERAH	
4.1. Kondisi Umum -----	50
4.1.1. Kinerja Bank Umum -----	50
4.1.2. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga -----	51
4.1.3. Penyaluran Kredit -----	52
4.2. Kinerja Korporasi Nonkeuangan -----	54
4.2.1. Kondisi dan Prospek Usaha -----	54
4.2.2. Penyaluran Kredit Korporasi -----	55
4.3. Kinerja Keuangan Rumah Tangga-----	55
4.3.1. Kondisi Rumah Tangga -----	55
4.3.2. Penyaluran Kredit Rumah Tangga -----	57
4.4. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM-----	57
4.4.1. Penyaluran Kredit UMKM -----	57
BAB V PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH	
5.1. Kondisi Umum -----	59
5.2. Transaksi Pembayaran Tunai-----	59
5.2.1. Perkembangan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i> -----	59
5.2.2. Perkembangan Kegiatan Layanan Kas-----	60
5.3. Transaksi Pembayaran Non Tunai -----	61
5.3.1. Perkembangan SKNBI -----	62
BOKS 2. ELEKTRONIFIKASI PEMBAYARAN PROVINSI NTT DI TENGAH PANDEMI COVID-19	63
BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN	
6.1. Kondisi Umum -----	66
6.2. Perkembangan Ketenagakerjaan -----	66
6.3. Perkembangan Kesejahteraan -----	69
BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	
7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT -----	72
7.1.1. Prospek Ekonomi Triwulan I 2021-----	72
7.1.2. Prospek Ekonomi Tahun 2021 -----	74
7.2. Prospek Inflasi Provinsi NTT -----	76
7.2.1. Prospek Inflasi Triwulan I 2021-----	76
7.2.2. Prospek Inflasi Tahun 2021 -----	77

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi NTT dan Nasional Secara Tahunan -----	2
Grafik 1.2 Peringkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi -----	2
Grafik 1.3 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen -----	4
Grafik 1.4 Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi -----	4
Grafik 1.5 Perkembangan Giro Pemerintah Daerah di Bank Umum -----	6
Grafik 1.6 Perkembangan Mobilitas Masyarakat di Sektor Perdagangan-----	6
Grafik 1.7 Perkembangan Kasus COVID-19 di Provinsi NTT -----	7
Grafik 1.8 Perkembangan PMDN Provinsi -----	8
Grafik 1.9 Perkembangan PMA Provinsi -----	8
Grafik 1.10 Perkembangan Penyaluran Kredit Investasi -----	9
Grafik 1.11 Perkembangan Realisasi Belanja Modal Pemerintah -----	9
Grafik 1.12 Perkembangan Omzet Penjualan Bahan Konstruksi -----	10
Grafik 1.13 Perkembangan Nilai Tukar Petani -----	14
Grafik 1.14 Survei Kegiatan Dunia Usaha LU Pertanian -----	14
Grafik 1.15 Perkembangan Omzet Penjualan Kendaraan Bermotor-----	15
Grafik 1.16 Survei Kegiatan Dunia Usaha LU Perdagangan -----	15
Grafik 1.17 Perkembangan Penyaluran Kredit Konstruksi -----	17
Grafik 1.18 Survei Kegiatan Dunia Usaha LU Konstruksi -----	17
Grafik 1.19 Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar -----	18
Grafik 1.20 Perkembangan Mobilitas Masyarakat di <i>Transit Station</i> -----	19
Grafik 1.21 Perkembangan Penumpang di Bandara El Tari Kupang-----	19
Grafik Boks 1.1 Pertumbuhan LU Transportasi dan LU Akmamin-----	22
Grafik Boks 1.2 Perkembangan Kunjungan Melalui PLBN Timor Leste-----	22
Grafik Boks 1.3 Perkembangan Penumpang di Bandara Ngurah Rai Bali -----	23
Grafik 2.1 Realisasi PAD Pemprov NTT -----	28
Grafik 2.2 Realisasi Dana Perimbangan Pemprov NTT -----	28
Grafik 2.3 Realisasi Belanja Operasi Pemprov NTT -----	29
Grafik 2.4 Realisasi Belanja Modal, Transfer, dan Tak Terduga Pemprov NTT--	29
Grafik 2.5 Realisasi PAD Pemkot dan Pemkab NTT -----	31
Grafik 2.6 Realisasi Dana Perimbangan Pemkot dan Pemkab NTT -----	31
Grafik 2.7 Realisasi Pendapatan Pemkot dan Pemkab NTT Secara Spasial -----	32
Grafik 2.8 Realisasi Belanja Operasi Pemkot dan Pemkab NTT -----	34
Grafik 2.9 Realisasi Belanja Modal, Transfer, dan Tak Terduga Pemkot dan Pemkab NTT-----	34
Grafik 2.10 Realisasi Belanja Pemkot dan Pemkab NTT Secara Spasial-----	34
Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi NTT-----	36
Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Kota Kupang, Maumere dan Waingapu-----	36
Grafik 3.3 Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Secara Tahunan dan Bulanan -----	39
Grafik 3.4 Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau per Sub Kelompok Komoditas -----	39
Grafik 3.5 Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki Secara Tahunan dan Bulanan -----	40
Grafik 3.6 Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki Sub Kelompok Komoditas -----	40
Grafik 3.7 Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar RT Secara Tahunan dan Bulanan -----	40
Grafik 3.8 Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar RT	

Per Sub Kelompok Komoditas -----	40
Grafik 3.9 Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan RT Secara Tahunan dan Bulanan -----	41
Grafik 3.10 Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan RT Sub Kelompok Komoditas -----	41
Grafik 3.11 Inflasi Kelompok Kesehatan Secara Tahunan dan Bulanan -----	42
Grafik 3.12 Inflasi Kelompok Kesehatan per Sub Kelompok Komoditas -----	42
Grafik 3.13 Inflasi Kelompok Transportasi Secara Tahunan dan Bulanan -----	42
Grafik 3.14 Inflasi Kelompok Transportasi per Sub Kelompok Komoditas -----	42
Grafik 3.15 Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Secara Tahunan dan Bulanan -----	43
Grafik 3.16 Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Sub Kelompok Komoditas -----	43
Grafik 3.17 Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya Secara Tahunan dan Bulanan -----	43
Grafik 3.18 Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Sub Kelompok Komoditas -----	43
Grafik 3.19 Inflasi Kelompok Pendidikan Secara Tahunan dan Bulanan-----	44
Grafik 3.20 Inflasi Kelompok Pendidikan per Sub Kelompok Komoditas-----	44
Grafik 3.21 Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran Secara Tahunan dan Bulanan -----	45
Grafik 3.15 Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Secara Tahunan dan Bulanan -----	45
Grafik 3.16 Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Sub Kelompok Komoditas -----	
Grafik 4.1 Perkembangan Profitabilitas Bank Umum -----	51
Grafik 4.2 Perkembangan LDR Bank Umum -----	51
Grafik 4.3 Pertumbuhan DPK dan Komponennya -----	52
Grafik 4.4 Suku Bunga Tertimbang berdasarkan Jenis Simpanan-----	52
Grafik 4.5 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan -----	52
Grafik 4.6 Suku Bunga Tertimbang Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan-----	52
Grafik 4.7 Risiko Kredit Usaha -----	53
Grafik 4.8 Perkembangan Kredit Usaha Berdasarkan Kategori Usaha -----	53
Grafik 4.9 Risiko Kredit Usaha di Beberapa Sektor Ekonomi -----	54
Grafik 4.10 Pertumbuhan Kredit Usaha di Beberapa Sektor Ekonomi -----	54
Grafik 4.11 Kondisi Rentabilitas Korporasi -----	54
Grafik 4.12 Kondisi Likuiditas Korporasi -----	54
Grafik 4.13 Pertumbuhan Kredit Korporasi Nonkeuangan -----	55
Grafik 4.14 Risiko Kredit (<i>Loan at Risk</i>) Korporasi Nonkeuangan -----	55
Grafik 4.15 Pertumbuhan PDRB dan Konsumsi Rumah Tangga-----	56
Grafik 4.16 Survei Konsumen Bank Indonesia-----	56
Grafik 4.17 Pertumbuhan DPK Rumah Tangga -----	56
Grafik 4.18 Preferensi Jenis Simpanan Nasabah Rumah Tangga-----	56
Grafik 4.19 Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga -----	57
Grafik 4.20 Risiko Kredit Rumah Tangga (<i>Non Performing Loan</i>)-----	57
Grafik 4.21 Pertumbuhan Kredit UMKM -----	58
Grafik 4.22 Risiko Kredit UMKM (<i>Loan at Risk</i>)-----	58
Grafik 4.23 Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha-----	58
Grafik 4.24 Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha -----	58
Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Tunai di Provinsi NTT-----	60
Grafik 5.2 Perkembangan Inflow dan Outflow Tunai Provinsi NTT -----	60

Grafik 5.3 Perkembangan Layanan Penukaran Bank Indonesia Provinsi NTT ---	61
Grafik 5.4 Perkembangan Pengiriman Uang Kepada Kas Titipan Provinsi NTT-----	61
Grafik 5.5 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI -----	61
Grafik 5.6 Perkembangan Nominal Transaksi SKNBI -----	61
Grafik 5.7 Perkembangan Volume Transaksi BI RTGS -----	62
Grafik 5.8 Perkembangan Nominal Transaksi BI RTGS -----	62
Grafik Boks 2.1 Perkembangan Nilai Transaksi Kartu ATM/Debet -----	64
Grafik Boks 2.2 Perkembangan Nilai Transaksi Kartu Kredit -----	64
Grafik Boks 2.3 Perkembangan Nilai Transaksi <i>E-Commerce</i> -----	64
Grafik Boks 2.4 Perkembangan Jumlah <i>Merchant QRIS</i> -----	65
Grafik Boks 2.5 Sebaran <i>Merchant QRIS</i> berdasarkan Kabupaten/Kota -----	65
Grafik 6.1 Perkembangan Tenaga Kerja Provinsi NTT-----	67
Grafik 6.2 Perkembangan Status Tenaga Kerja Provinsi NTT-----	67
Grafik 6.3 Pangsa Lapangan Usaha Tenaga Kerja di Provinsi NTT per Agustus 2020-----	68
Grafik 6.4 Pendidikan Terakhir Tenaga Kerja di Provinsi NTT per Agustus 2020 -----	68
Grafik 6.5 TPT Kabupaten/Kota per Agustus 2020-----	69
Grafik 6.6 Perkembangan Persentase Kemiskinan NTT dan Nasional -----	70
Grafik 6.7 10 Provinsi dengan Persentase Kemiskinan Tertinggi -----	70
Grafik 6.8 Perkembangan NTP -----	71
Grafik 6.9 NTP Provinsi NTT Berdasarkan Subsektor -----	71
Grafik 6.10 Perkembangan Rasio Gini -----	71
Grafik 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Triwulan IV 2020 dan Triwulan I 2021 -----	74
Grafik 7.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2020-2021 ---	76
Grafik 7.3 Proyeksi Inflasi Provinsi NTT Tahun 2020 -----	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Pengeluaran -----	3
Tabel 1.2 Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Lapangan Usaha -----	13
Tabel 2.1 Anggaran Belanja Pemerintah di Provinsi NTT -----	25
Tabel 2.2 Realisasi Belanja Pemerintah di Provinsi NTT -----	25
Tabel 2.3 Anggaran Pendapatan Pemerintah di Provinsi NTT -----	26
Tabel 2.4 Realisasi Pendapatan Pemerintah di Provinsi NTT -----	26
Tabel 2.5 Anggaran & Realisasi Pendapatan Pemprov NTT -----	27
Tabel 2.6 Anggaran & Realisasi Belanja Pemprov NTT -----	29
Tabel 2.7 Anggaran & Realisasi Pendapatan Pemkot & Pemkab NTT-----	30
Tabel 2.8 Anggaran & Realisasi Belanja Pemkot & Pemkab NTT-----	33
Tabel 2.9 Anggaran & Realisasi Belanja APBN di NTT -----	35
Tabel 3.1 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Tahunan di Provinsi NTT (Triwulan III 2020) -----	37
Tabel 3.2 Inflasi di Provinsi NTT Berdasarkan Kelompok Komoditas -----	38
Tabel 3.3 Inflasi Kota Kupang, Maumere, dan Waingapu Berdasarkan Kelompok Komoditas -----	47
Tabel 4.1 Perkembangan Indikator Utama Bank Umum di NTT -----	51
Tabel 7.1 Profil Risiko COVID-19 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT -----	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar Boks 3.1 Penandatanganan Kerjasama Implementasi CMS Pemerintah Provinsi NTT dan BPD NTT -----	84
Gambar Boks 3.2 Penjajakan Pembentukan TPDD Kota Kupang -----	84

Ringkasan Eksekutif
Laporan Perekonomian
Provinsi Nusa Tenggara Timur
November 2020

✓ **EKONOMI MAKRO REGIONAL**

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan III 2020 membaik seiring pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT berkurang menjadi 1,68% (yoY) dari triwulan II 2020 sebesar 1,99% (yoY). Kebijakan adaptasi kebiasaan baru mendorong perbaikan permintaan domestik secara bertahap terutama konsumsi rumah tangga. Dari sisi lapangan usaha, perbaikan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan III 2020 dipengaruhi oleh peningkatan kinerja LU utama yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Adaptasi kebiasaan baru memengaruhi perbaikan permintaan komoditas bahan makanan dan memperlancar distribusi komoditas tersebut sehingga mendorong peningkatan produksi LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pada triwulan IV 2020, perbaikan ekonomi Provinsi NTT diprakirakan berlanjut. Mobilitas masyarakat Provinsi NTT terus meningkat dan mendorong konsumsi rumah tangga pasca penerapan adaptasi kebiasaan baru. Dari sisi LU, kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran diprakirakan meningkat, didukung oleh momen Natal, pembukaan destinasi wisata, dan Pilkada serentak. LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga diprakirakan meningkat seiring masa panen komoditas perkebunan, terutama mete.

✓ **KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Realisasi belanja pemerintah (APBD dan APBN) di NTT pada triwulan III tahun 2020 tercatat sebesar Rp27,32 triliun, dengan persentase serapan sebesar 57,09% dari total anggaran belanja. Persentase serapan ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh penyerapan APBN dan APBD Provinsi yang tinggi dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Sementara itu, realisasi pendapatan pemerintah (APBD) di NTT mencapai Rp18,69 triliun dengan persentase serapan sebesar 66,25% dari total anggaran pendapatan. Persentase serapan lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pendapatan Pemerintah Kota dan Kabupaten tertahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya akibat kinerja PAD yang menurun di tengah pandemi COVID-19.

✓ PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan III 2020 relatif terkendali, yaitu sebesar 1,10% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional dan inflasi NTT di triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 1,42% (yoy) dan 1,57% (yoy). Penurunan tekanan inflasi Provinsi NTT pada triwulan III terutama bersumber dari penurunan tarif angkutan udara, harga cabai rawit dan cabai merah, serta ikan ekor kuning dan ikan teri. Di sisi lain, kenaikan harga ikan kembung, ikan tongkol, emas perhiasan, rokok kretek filter, dan rokok putih menjadi faktor pendorong inflasi. Pada triwulan IV 2020, inflasi Provinsi NTT secara *year-on-year* diprakirakan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, seiring dengan konsumsi masyarakat yang masih terbatas serta curah hujan yang diprakirakan meningkat akibat *La Nina*.

✓ STABILITAS SISTEM KEUANGAN DAERAH

Secara umum, kondisi stabilitas sistem keuangan di Provinsi NTT pada triwulan III 2020 masih terjaga. Hal ini tercermin dari pertumbuhan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang meningkat, meskipun pertumbuhan penyaluran kredit melambat. DPK tumbuh sebesar 16,90% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,11% (yoy). Di sisi lain, penyaluran kredit tumbuh sebesar 4,13% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,49% (yoy). Kinerja penyaluran kredit rumah tangga masih kuat, namun kredit usaha UMKM mengalami kontraksi.

✓ PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Indikator sistem pembayaran di Provinsi NTT baik tunai maupun nontunai pada triwulan III 2020 menunjukkan perbaikan, sejalan dengan pemulihan ekonomi seiring kebijakan adaptasi kebiasaan baru. Pada triwulan III 2020, Provinsi NTT menunjukkan kondisi net outflow sebesar Rp699,93 miliar. Net outflow tersebut tumbuh 18,88% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 11,91% (yoy). Transaksi nontunai secara bertahap juga mengalami perbaikan, tercermin dari pertumbuhan volume transaksi SKNBI dan BI RTGS yang meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun, secara nominal, pertumbuhan SKNBI dan BI RTGS masih lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

✓ KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi NTT pada bulan Agustus 2020 tercatat sebesar 4,28%, naik dibandingkan bulan Agustus 2019 yang sebesar 3,14%. Persentase kemiskinan Provinsi NTT pada Maret 2020 tercatat sebesar 20,90%, naik dibandingkan September 2019 yang sebesar 20,62% sebagai dampak pandemi COVID-19. Koefisien gini yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat menurun dari 0,355 pada bulan September 2019 menjadi 0,354 pada bulan Maret 2020.

✓ PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Pemulihan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan I 2021 diperkirakan berlanjut. Kebijakan adaptasi kebiasaan baru mendorong membaiknya permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi, meskipun masih dibayangi perilaku berjaga-jaga yang dipengaruhi oleh perkembangan COVID-19. Dari sisi LU, akselerasi ekonomi Provinsi NTT pada triwulan I 2021 didorong oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Konstruksi seiring perbaikan permintaan komoditas bahan makanan dan tibanya musim penghujan serta berlanjutnya proyek pemerintah. Optimisme pemulihan ekonomi Provinsi NTT tetap berlanjut dan meningkat pada tahun 2021. Akselerasi ekonomi Provinsi NTT dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat sejalan dengan membaiknya mobilitas dan pendapatan, peningkatan kapasitas fiskal, serta kelanjutan pembangunan infrastruktur pemerintah terutama Proyek Strategis Nasional. Empat LU utama menopang pemulihan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2021 yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Konstruksi. Inflasi Provinsi NTT diperkirakan kembali ke sasaran $3\%\pm1\%$ (yoY) pada tahun 2021. Pada triwulan I 2021, inflasi diperkirakan meningkat dipengaruhi oleh membaiknya permintaan domestik pasca adaptasi kebiasaan baru, tercermin dari meningkatnya mobilitas masyarakat serta ketersediaan pasokan bahan makanan terutama ikan segar, bawang merah, dan kelompok cabai.

Tabel Indikator Ekonomi Terpilih Provinsi Nusa Tenggara Timur

I. EKONOMI MAKRO REGIONAL

INDIKATOR	2017	2018				2018	2019				2019	2020		
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III
Berdasarkan Sektor/ Lapangan Usaha - Harga Berlaku														
Produk Domestik Regional Bruto (Rp miliar)	90.759	22.919	24.231	25.732	26.212	99.094	24.891	26.550	27.384	28.068	106.893	25.967	26.068	26.975
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26.148	6.601	7.099	7.341	7.068	28.109	6.736	7.782	7.591	7.821	29.930	7.090	7.838	7.635
Pertambangan dan Penggalian	1.177	285	289	304	324	1.202	303	306	313	327	1.250	297	284	289
Industri Pengolahan	1.147	299	305	312	337	1.253	339	346	353	368	1.405	335	340	336
Pengadaan Listrik dan Gas	66	17	18	19	21	75	18	18	18	21	76	21	21	21
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	50	13	13	13	14	54	14	14	14	14	57	14	15	16
Konstruksi	9.719	2.379	2.556	2.831	2.979	10.745	2.626	2.749	2.950	3.282	11.606	2.646	2.480	2.654
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.959	2.537	2.666	2.863	3.008	11.075	2.885	3.013	3.210	3.209	12.316	3.164	2.875	2.971
Transportasi dan Pergudangan	4.939	1.240	1.331	1.414	1.474	5.459	1.360	1.474	1.493	1.506	5.833	1.430	1.064	1.184
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	667	174	188	195	199	757	192	205	207	201	806	177	120	134
Informasi dan Komunikasi	6.195	1.549	1.572	1.720	1.729	6.570	1.716	1.737	1.807	1.818	7.078	1.821	2.006	2.057
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.738	982	1.000	1.035	1.054	4.072	1.082	1.017	1.106	1.101	4.307	1.112	1.123	1.173
Real Estate	2.316	588	618	644	626	2.475	617	623	620	620	2.480	615	586	619
Jasa Perusahaan	279	70	72	75	75	292	72	75	80	79	306	76	37	38
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11.702	2.977	3.202	3.458	3.605	13.242	3.384	3.603	3.749	3.869	14.603	3.493	3.761	3.971
Jasa Pendidikan	8.770	2.197	2.262	2.431	2.576	9.466	2.438	2.454	2.720	2.634	10.246	2.473	2.442	2.801
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.941	505	522	546	578	2.151	568	574	576	609	2.328	620	623	625
Jasa lainnya	1.945	506	517	532	544	2.098	542	561	577	588	2.267	582	455	450
Berdasarkan Permintaan / Penggunaan (Harga Berlaku)														
Produk Domestik Regional Bruto (Rp miliar)	90.759	22.919	24.231	25.732	26.212	99.094	24.891	26.550	27.384	28.068	106.893	25.967	26.068	26.975
1. Konsumsi Rumah Tangga	66.708	17.130	17.582	17.676	18.866	71.254	18.361	19.271	19.142	20.118	76.891	19.569	18.455	18.264
2. Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPRT)	2.921	802	825	814	846	3.287	879	930	859	894	3.562	868	814	895
3. Konsumsi Pemerintah	25.754	4.394	6.542	8.886	9.664	29.486	4.465	6.745	9.032	10.068	30.310	4.601	6.108	7.144
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	43.583	10.253	10.985	12.780	13.181	47.199	11.000	11.578	13.207	14.015	49.801	11.177	10.667	11.759
5. Perubahan Inventori	571	159	234	249	243	884	221	260	263	266	1.009	266	278	282
6. Ekspor Luar Negeri	2.109	473	500	554	558	2.085	352	300	405	534	1.592	318	146	205
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	1.147	217	315	903	470	1.905	274	238	333	293	1.138	390	94	37
8. Net Ekspor Antar Daerah (Impor)	49.740	10.075	12.121	14.324	16.676	53.196	10.114	12.295	15.191	17.534	-55.135	10.442	10.307	11.537
Data Ekspor Impor di Provinsi NTT														
Nilai Ekspor Nonmigas (ribu USD)	65.047	9.841	5.729	21.658	22.765	59.993	9.904	5.318	12.570	24.877	52.669	11.780	3.980	8.450
Nilai Impor Nonmigas (ribu USD)	37.851	4.760	4.720	46.821	39.209	95.510	832	2.208	720	4.365	8.125	9.101	6	415

II. INFLASI

INDIKATOR	2017				2018				2019				2020		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Laju Inflasi Tahunan (yoy %)															
NTT	2,95	2,45	3,46	2,00	2,26	2,89	1,90	3,07	2,12	1,35	2,06	0,67	1,65	1,57	1,10
- Kota Kupang	2,83	2,18	3,30	2,05	2,19	3,00	1,96	3,23	2,33	1,30	2,23	0,50	1,70	1,28	0,23
- Maumere	3,84	4,34	4,57	1,70	2,63	2,12	1,50	2,00	0,69	1,73	0,84	1,84	2,07	0,67	2,69
- Waingapu													7,34	5,24	1,07

III. PERBANKAN

INDIKATOR	2017				2018				2019				2020		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Bank Umum Konvensional dan Syariah (dalam Rp. Miliar kecuali dinyatakan lain)															
1. Total Aset	30.575	35.648	33.629	33.147	34.878	38.891	36.851	37.017	37.265	40.849	42.870	42.943	43.917	46.159	48.994
2. DPK	22.565	25.236	24.152	23.163	25.012	26.865	26.658	25.098	25.680	28.817	28.748	29.497	29.651	31.154	33.605
- Giro	5.330	6.400	5.183	3.492	5.468	6.297	5.577	3.478	5.798	7.676	5.926	4.392	5.614	6.408	7.616
- Tabungan	11.311	12.162	12.095	14.117	12.617	13.369	13.784	15.463	13.531	14.306	14.386	16.364	14.665	15.605	16.549
- Deposito	5.924	6.675	6.875	5.554	6.928	7.200	7.297	6.157	6.351	6.835	8.436	8.741	9.372	9.141	9.441
3. Kredit Berdasarkan Lokasi Kantor	22.153	23.134	24.215	25.284	25.817	26.681	28.011	28.694	29.136	30.481	32.794	32.205	32.521	32.699	33.751
- Modal Kerja	6.694	7.348	7.637	7.946	7.815	8.410	8.739	8.999	8.988	9.739	10.571	10.292	10.293	11.394	11.599
- Investasi	1.531	1.413	1.870	1.951	1.991	2.077	2.172	2.234	2.531	2.590	3.089	2.578	2.653	3.225	3.644
- Konsumsi	13.929	14.373	14.708	15.387	16.011	16.194	17.101	17.461	17.616	18.152	19.134	19.335	19.574	19.788	20.703
4. LDR (%)	98,18	91,67	100,26	109,16	103,22	99,31	105,08	114,33	113,46	105,78	114,08	109,18	109,68	104,96	100,43
5. Kredit UMKM	7.352	7.897	8.262	9.221	8.527	9.057	9.361	10.189	10.404	11.014	11.617	11.524	11.854	11.804	11.409

IV. SISTEM PEMBAYARAN

INDIKATOR	2017				2018				2019				2020		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Transaksi Tunai															
Inflow (Rp. Triliun)	2,09	0,85	1,27	1,25	2,71	1,36	1,12	0,93	2,70	1,56	1,48	1,34	3,18	1,16	1,31
Outflow (Rp. Triliun)	0,35	2,20	1,47	3,54	0,53	2,63	1,50	2,90	0,45	2,41	1,71	3,18	0,57	1,92	2,01
Transaksi Non Tunai															
Kliring															
Nominal Kliring Penyerahan (Rp. Triliun)	2,57	2,32	3,02	3,29	2,63	2,59	3,32	3,59	2,58	2,56	3,37	4,12	2,93	2,65	3,26
Volume Perputaran Kliring Penyerahan (lembar warkat)	72.091	68.959	81.511	88.617	74.688	73.849	86.738	90.773	69.958	70.336	85.573	88.518	67.561	62.364	80.651

Bab I.

EKONOMI MAKRO REGIONAL

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan III 2020 membaik seiring pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT berkurang menjadi 1,68% (yoY) dari triwulan II 2020 sebesar 1,99% (yoY). Kebijakan adaptasi kebiasaan baru mendorong perbaikan permintaan domestik secara bertahap terutama konsumsi rumah tangga. Dari sisi lapangan usaha, perbaikan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan III 2020 dipengaruhi oleh peningkatan kinerja LU utama yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Adaptasi kebiasaan baru memengaruhi perbaikan permintaan komoditas bahan makanan dan memperlancar distribusi komoditas tersebut sehingga mendorong peningkatan produksi LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

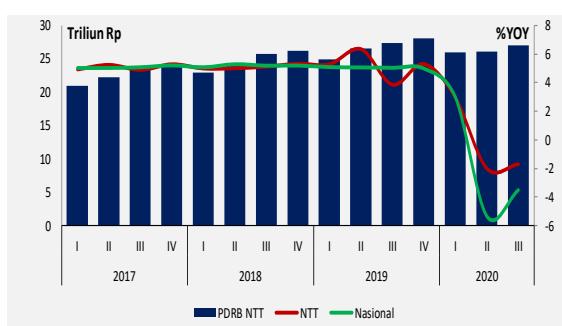
Pada triwulan IV 2020, perbaikan ekonomi Provinsi NTT diprakirakan berlanjut. Mobilitas masyarakat Provinsi NTT terus meningkat dan mendorong konsumsi rumah tangga pasca penerapan adaptasi kebiasaan baru. Dari sisi LU, kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran diprakirakan meningkat, didukung oleh momen Natal, pembukaan destinasi wisata, dan Pilkada serentak. LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga diprakirakan meningkat seiring masa panen komoditas perkebunan, terutama mete.

1.1 Kondisi Umum

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan III 2020 membaik seiring pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19¹. Secara tahunan, perbaikan ekonomi terlihat dari berkurangnya kontraksi pertumbuhan menjadi 1,68% (yoY) dari kontraksi pada triwulan II 2020 sebesar 1,99% (yoY). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan nasional yang terkontraksi sebesar 3,49% (yoY) pada triwulan III 2020. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT menempati peringkat ke-12 dari total 34 provinsi di Indonesia. Namun, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTT terhadap nasional relatif kecil. PDRB Provinsi NTT atas dasar harga berlaku pada triwulan III 2020 baru mencapai Rp26,97 triliun atau 0,68% Produk Domestik Bruto nasional.

¹ Corona Virus Disease 2019.

Kebijakan adaptasi kebiasaan baru di Provinsi NTT yang dimulai paling lambat tanggal 15 Juni 2020², mendorong pemulihan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Hal ini mendorong perbaikan permintaan domestik secara bertahap terutama konsumsi rumah tangga. Kinerja lapangan usaha (LU) di Provinsi NTT juga mulai membaik pada triwulan III 2020. LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang merupakan LU utama di Provinsi NTT tercatat mengalami peningkatan pertumbuhan secara tahunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring perbaikan permintaan komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan pasca adaptasi kebiasaan baru.



Sumber: BPS

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi NTT dan Nasional Secara Triwulanan



Sumber: BPS

Grafik 1.2. Peringkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Pada Triwulan III 2020

Pada triwulan IV 2020, perbaikan ekonomi Provinsi NTT diprakirakan berlanjut sebagai dampak bertahap kebijakan adaptasi kebiasaan baru. Dari sisi pengeluaran, perbaikan permintaan domestik diprakirakan berlanjut, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang didukung oleh stimulus Pemerintah. Sektor eksternal juga diprakirakan meningkat seiring pemulihan ekonomi global dan relaksasi pembatasan akses perdagangan. Dari sisi LU, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 diprakirakan didorong oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

² Hasil rapat koordinasi Gubernur NTT dan Bupati/Walikota di Provinsi NTT, 26 Mei 2020.

1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi Permintaan

Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan III 2020 ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan pangsa 67,71%. Konsumsi rumah tangga yang terkontraksi pada triwulan II 2020 sebagai dampak kebijakan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19, mulai menunjukkan perbaikan secara bertahap pada triwulan III 2020 pasca penerapan kebijakan adaptasi kebiasaan baru paling lambat 15 Juni 2020. Perbaikan kinerja konsumsi rumah tangga juga ditopang oleh stimulus Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menjaga daya beli masyarakat. Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan III 2020 masih terkontraksi seiring belum optimalnya realisasi anggaran belanja APBD. Sementara itu, kinerja investasi juga terkontraksi, lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, kinerja sektor eksternal Provinsi NTT pada triwulan III 2020 mengalami perbaikan, ditunjukkan oleh pertumbuhan defisit neraca perdagangan yang melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 diprakirakan meningkat, ditopang oleh permintaan domestik. Mobilitas masyarakat Provinsi NTT terus meningkat dan mendorong konsumsi rumah tangga pasca penerapan adaptasi kebiasaan baru. Di samping itu, konsumsi pemerintah juga diprakirakan meningkat sebagai upaya mencapai target realisasi belanja akhir tahun 2020. Berlanjutnya pembangunan proyek Pemerintah serta membaiknya *confidence* pelaku usaha diprakirakan mempengaruhi kinerja investasi, terutama bangunan pada triwulan IV 2020. Di sisi lain, perbaikan ekonomi global dan relaksasi pembatasan akses perdagangan baik luar negeri maupun antardaerah juga diprakirakan dapat memulihkan perdagangan dari dan ke luar Provinsi NTT pada triwulan IV 2020.

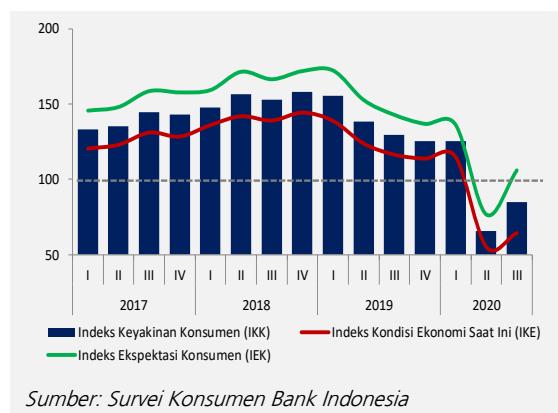
Tabel 1.1. Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Pengeluaran

Uraian	2018				2018	2019				2019	2020			Pangsa III 2020
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,20	4,37	4,63	2,79	4,45	5,02	6,40	5,63	4,58	5,40	4,41	(4,40)	(2,38)	67,71
2. Pengeluaran Konsumsi LNPT	19,77	10,91	7,10	2,78	9,76	4,74	9,25	2,60	4,26	5,21	(2,72)	(13,10)	1,68	3,32
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13,69	0,96	1,94	15,10	7,45	0,13	2,70	1,08	4,84	2,51	1,53	(7,49)	(19,33)	26,48
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,65	5,45	6,41	0,15	4,44	4,47	2,75	1,37	5,02	3,38	0,67	(8,57)	(12,15)	43,59
5. Perubahan Inventori	47,16	50,86	46,20	50,53	48,76	37,28	9,29	3,42	7,36	12,16	17,96	7,01	8,35	1,05
6. Eksport Luar Negeri	(1,07)	(20,71)	(23,60)	(28,20)	(19,45)	(23,44)	(33,70)	(16,65)	(4,25)	(19,82)	(9,86)	(48,16)	(44,36)	0,76
7. Impor Luar Negeri	(23,38)	(30,61)	557,93	(4,58)	30,79	43,85	(21,50)	(48,70)	(34,45)	(28,65)	55,44	(47,07)	(87,93)	0,14
8. Net Impor Antardaerah	14,36	3,70	(1,12)	2,37	3,82	0,51	1,21	4,64	4,94	3,14	0,44	(14,91)	(18,53)	42,77
P D R B	5,01	5,02	5,14	5,34	5,13	5,30	6,36	3,87	5,32	5,20	2,98	(1,99)	(1,68)	100,00

Sumber: BPS

1.2.1 Konsumsi

Kontraksi konsumsi rumah tangga Provinsi NTT pada triwulan III 2020 tercatat berkurang menjadi 2,38% (yoY) dari triwulan sebelumnya sebesar 4,40% (yoY). Kebijakan *physical distancing* dan pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 telah menahan aktivitas ekonomi dan menurunkan pendapatan masyarakat pada triwulan II 2020. Pemerintah Provinsi NTT mulai membuka aktivitas ekonomi dengan protokol kesehatan selambat-lambatnya mulai tanggal 15 Juni 2020. Kebijakan adaptasi kebiasaan baru tersebut mendorong optimisme konsumsi rumah tangga pada triwulan III. Secara triwulanan, ekonomi Provinsi NTT tumbuh 3,06% (qtq), meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2020 sebesar 0,89% (qtq). Di samping itu, Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) membaik dari 65,67 pada triwulan II 2020 menjadi 84,95 pada triwulan III 2020. Peningkatan IKK pada triwulan III 2020 ditopang oleh membaiknya ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi mendatang, tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen yang tercatat sebesar 105,78 (zona optimis), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2020 sebesar 76,44. Dari sisi perbankan, perbaikan konsumsi rumah tangga ditunjukkan oleh penyaluran kredit konsumsi yang tumbuh 7,51% (yoY) pada triwulan III 2020, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 7,03% (yoY).



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 1.3. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen di Provinsi NTT



Sumber: Laporan Bank Umum Bank Indonesia

Grafik 1.4. Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi Provinsi NTT

Perbaikan kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2020 juga didukung oleh stimulus Pemerintah. Di tingkat pusat, Pemerintah terus berupaya mendorong realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)³, termasuk perlindungan sosial. Anggaran PEN perlindungan sosial bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, anggaran PEN perlindungan sosial mencapai Rp203,90 triliun dan telah direalisasikan sebesar 81,94%⁴, antara lain Program Keluarga Harapan, Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU). BSU, yang baru diluncurkan Presiden pada tanggal 27 Agustus 2020 merupakan bantuan dalam bentuk uang sebesar Rp600.00 per bulan selama empat bulan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta dan terdaftar pada program jaminan sosial tenaga kerja⁵. Di Provinsi NTT, program BSU telah diterima oleh 113.438 pekerja⁶. Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTT juga telah merealisasikan program Jaring Pengaman Sosial kepada 77.524 keluarga penerima manfaat (KPM)⁷ di 18 kabupaten/kota⁸ Provinsi NTT pada bulan September 2020. Setiap KPM menerima uang tunai Rp150.000 dan beras senilai Rp350.000.

Konsumsi lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT) Provinsi NTT pada triwulan III 2020 tercatat tumbuh 1,68% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 13,10% (yoy). Secara triwulanan, kinerja konsumsi LNPRT juga meningkat menjadi 9,64% (qtq) pada triwulan III 2020 dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 6,13% (qtq). Di samping kebijakan adaptasi kebiasaan baru, kinerja konsumsi LNPRT juga didorong oleh persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Di Provinsi NTT, Pilkada serentak tahun 2020 diikuti oleh sembilan kabupaten yakni Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Sumba Barat, Sumba Timur, Belu, Timor Tengah Utara, Sabu Raijua, dan Malaka.

³ Anggaran PEN pada tahun 2020 mencapai Rp695,20 triliun, terdiri dari kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, dukungan kepada UMKM, pembiayaan korporasi, serta sektoral Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.

⁴ Rilis Kementerian Keuangan pada tanggal 19 Oktober 2020.

⁵ Rilis Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 27 Agustus 2020.

⁶ Rilis Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara pada tanggal 14 Oktober 2020.

⁷ Keterangan Dinas Sosial Provinsi NTT pada tanggal 10 September 2020.

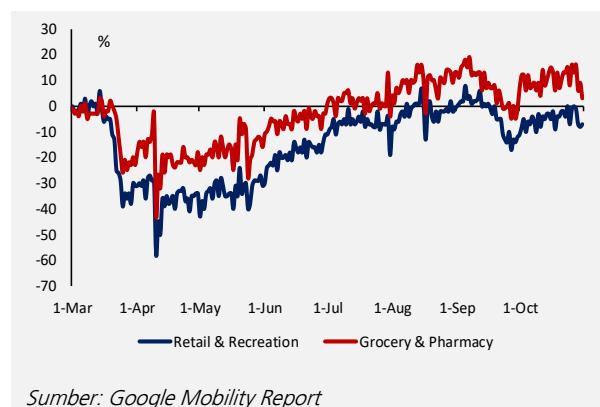
⁸ Penyaluran program Jaring Pengaman Sosial di empat kabupaten lainnya yakni Alor, Lembata, Sumba Timur, dan Sumba Tengah menyusul karena masih dalam proses pendataan.

Di sisi lain, kinerja konsumsi pemerintah di Provinsi NTT masih terkontraksi sebesar 19,33% (yoY), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 7,49% (yoY). Pertumbuhan konsumsi pemerintah secara triwulanan melambat dari 30,72% (qtq) pada triwulan II 2020 menjadi 17,18% (qtq) pada triwulan III 2020. Perlambatan konsumsi pemerintah ini dipengaruhi oleh belum optimalnya realisasi belanja APBD, meskipun Pemerintah Provinsi NTT mulai membuka aktivitas pemerintahan pasca kebijakan *work from home* untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Persentase realisasi belanja APBD⁹ pada triwulan III 2020 tercatat baru mencapai 50,15%, lebih rendah dibandingkan persentase triwulan III 2019 sebesar 55,14%. Belum optimalnya realisasi belanja pemerintah juga tercermin dari meningkatnya pertumbuhan giro pemerintah menjadi 15,72% (yoY) pada triwulan III 2020 dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 35,47% (yoY).



Sumber: Laporan Bank Umum Bank Indonesia

Grafik 1.5. Perkembangan Giro Pemerintah Daerah di Bank Umum



Sumber: Google Mobility Report

Grafik 1.6. Perkembangan Mobilitas Masyarakat Provinsi NTT di Sektor Perdagangan

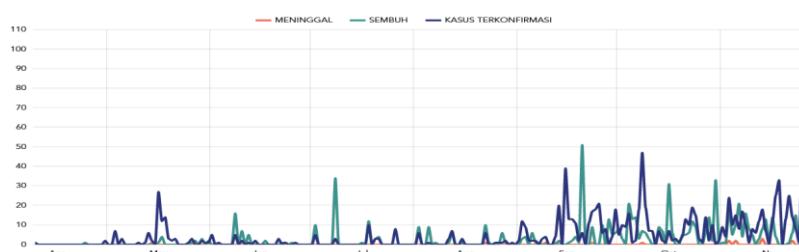
Pada triwulan IV 2020, perbaikan kinerja konsumsi baik swasta maupun pemerintah diprakirakan akan berlanjut. Hal ini tercermin dari indeks mobilitas masyarakat di sektor *retail and recreation* serta *grocery and pharmacy* secara bertahap mengalami pemulihan setelah melandai cukup dalam di bulan April 2020 seiring kebijakan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Di samping itu, adanya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal pada bulan Desember 2020 diprakirakan mendorong konsumsi rumah tangga yang didukung oleh cuti bersama pengganti HBKN Idul Fitri pada tanggal 28-31 Desember 2020¹⁰. Kinerja konsumsi rumah tangga juga

⁹ Realisasi belanja APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, tidak termasuk belanja modal.

¹⁰ Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 440 Tahun 2020. 3 Tahun 2020, dan 3 Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020.

ditopang oleh stimulus Pemerintah baik pusat maupun daerah yang masih berlanjut pada triwulan IV 2020. Sementara itu, konsumsi pemerintah juga diprakirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring upaya Pemerintah Daerah untuk mencapai target realisasi belanja akhir tahun 2020. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mempercepat realisasi APBD dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah, didukung oleh percepatan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa¹¹. Penyelenggaraan Pilkada serentak juga mendorong konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2020. Dari alokasi APBN untuk penyelenggaraan Pilkada serentak di Provinsi NTT, anggaran pengamanan baru terealisasi 51,20% dari total pagu Rp37,39 miliar hingga bulan Oktober 2020. Sementara itu, anggaran lainnya yakni KPU dan Bawaslu telah direalisasikan seluruhnya dengan total Rp261,65 miliar¹².

Perbaikan kinerja konsumsi juga bergantung pada pengendalian COVID-19 di Provinsi NTT. Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Provinsi NTT mulai meningkat pada bulan September 2020. Pemerintah Provinsi NTT memperketat penerapan protokol kesehatan dan memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar¹³. Namun demikian, kasus positif COVID-19 terus bertambah, terutama melalui transmisi lokal. Pada bulan November 2020, Kota Kupang termasuk zona merah atau beresiko tinggi COVID-19¹⁴. Pemerintah Kota Kupang melarang kegiatan yang melibatkan banyak orang, termasuk pesta dan mengawasi penerapan protokol kesehatan. Pengendalian COVID-19 mendorong optimisme konsumsi masyarakat dan menentukan pengetatan atau pelonggaran kebijakan Pemerintah untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19.



Sumber: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional

Grafik 1.7. Perkembangan Kasus COVID-19 di Provinsi NTT

¹¹ Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor SE-33/MK.07/2020 dan Nomor 440/4918/SJ tanggal 3 September 2020

¹² Sumber: KPU, Bawaslu, Kementerian Keuangan, 27 Oktober 2020 (diolah).

¹³ Peraturan Gubernur NTT Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 tanggal 8 September 2020.

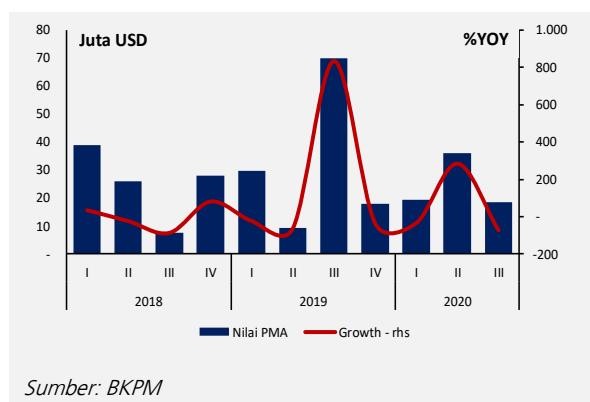
¹⁴ Berdasarkan peta risiko yang dirilis Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional dengan data per 8 November 2020.

1.2.2 Investasi

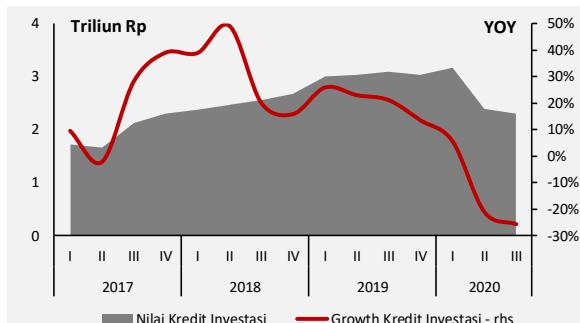
Pada triwulan III 2020, pembentukan modal tetap bruto (investasi) Provinsi NTT terkontraksi 12,15% (yoY), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 8,57% (yoY). Realisasi investasi di Provinsi NTT pada triwulan III 2020 baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan PMDN pada triwulan III 2020 mengalami kontraksi sebesar 47,52% (yoY), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2020 yang tumbuh 29,85% (yoY). Realisasi PMDN pada triwulan III 2020 didominasi oleh sektor hotel dan restoran dengan pangsa 44,13%. Sementara itu, pertumbuhan PMA pada triwulan III 2020 juga terkontraksi sebesar 73,30% (yoY), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 284,34% (yoY). PMA pada triwulan III 2020 ditopang oleh sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi dengan pangsa 49,36%. Negara asal PMA pada triwulan III 2020 terutama adalah Singapura (57,50%). Berdasarkan lokasinya, Kabupaten Manggarai Barat menempati peringkat pertama PMDN dan PMA di Provinsi NTT dengan pangsa masing-masing 42,71% dan 55,17%. Melambatnya pertumbuhan PMDN dan PMA secara tahunan sejalan dengan penyaluran kredit investasi yang terkontraksi 25,75% (yoY) pada triwulan III 2020, lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 21,16% (yoY).



Grafik 1.8. Perkembangan PMDN Provinsi NTT

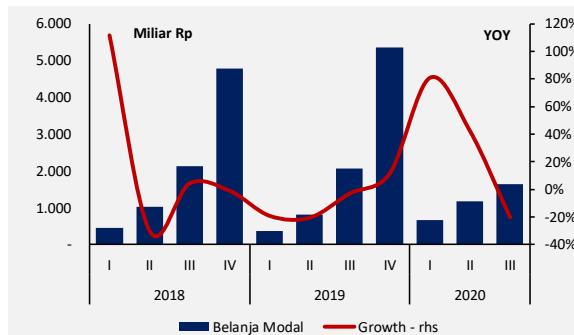


Grafik 1.9. Perkembangan PMA Provinsi NTT



Sumber: Laporan Bank Umum Bank Indonesia

Grafik 1.10. Perkembangan Penyaluran Kredit Investasi Provinsi NTT



Sumber: Kanwil DJPb dan Badan Keuangan Daerah NTT

Grafik 1.11. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Pemerintah di Provinsi NTT

Sementara itu, realisasi belanja modal pemerintah daerah menunjukkan perlambatan pada triwulan III 2020. Pertumbuhan realisasi belanja modal pada triwulan III 2020 terkontraksi sebesar 20,31% (yo), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2020 yang tumbuh 42,88% (yo). Meskipun demikian, persentase realisasi belanja modal pada triwulan III 2020 tercatat 46,48% dari pagu belanja modal tahun 2020, lebih tinggi dibandingkan persentase triwulan III 2019 sebesar 33,49%. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan pagu belanja modal tahun 2020 yang mencapai 22,93% (yo). Menurunnya pagu belanja modal dipengaruhi oleh *refocusing* dan *reallocating* anggaran pemerintah untuk pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19¹⁵.

Pada triwulan IV 2020, kinerja investasi di Provinsi NTT diprakirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara triwulanan, kinerja investasi di Provinsi NTT mulai membaik pada triwulan III 2020 dengan tumbuh 9,94% (qtq), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 4,97% (qtq) seiring kebijakan adaptasi kebiasaan baru. Pada triwulan IV 2020, kinerja investasi diprakirakan didorong oleh kelanjutan pembangunan proyek Pemerintah serta membaiknya *confidence* pelaku usaha. Hal ini tercermin dari Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia yang menunjukkan kontraksi omzet penjualan bahan konstruksi berkurang menjadi 50,16% (yo) pada triwulan IV 2020 (sampai dengan November 2020) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 52,13% (yo).

¹⁵ Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pengurangan belanja modal yang digunakan untuk mendanai belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.



Grafik 1.12. Perkembangan Omzet Penjualan Bahan Konstruksi Provinsi NTT

1.2.3 Ekspor dan Impor

Secara umum, kinerja sektor eksternal Provinsi NTT pada triwulan III 2020 mengalami perbaikan. Pertumbuhan defisit neraca perdagangan mengalami perlambatan dari -14,86% (yoY) pada triwulan II 2020 menjadi -19,80% (yoY) pada triwulan III 2020. Perlambatan tersebut terutama bersumber dari kinerja net impor antardaerah yang terkontraksi sebesar 18,53% (yoY), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 14,91% (yoY). Secara triwulanan, defisit neraca perdagangan Provinsi NTT justru meningkat menjadi 17,74% (qtq) pada triwulan III 2020, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 3,95% (qtq). Kebijakan adaptasi kebiasaan baru pada triwulan III 2020 mendorong aktivitas perekonomian antardaerah pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di luar Provinsi NTT pada triwulan II 2020 untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19.

Pada triwulan III 2020, kontraksi ekspor luar negeri Provinsi NTT berkurang menjadi 44,36% (yoY), dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 48,16% (yoY). Buah-buahan menjadi komoditas utama ekspor Provinsi NTT pada triwulan III 2020, meskipun pertumbuhan ekspor luar negeri komoditas tersebut melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, komoditas daging dan ikan olahan mengalami peningkatan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Berdasarkan tujuan negara, Timor Leste merupakan negara utama ekspor Provinsi NTT pada triwulan III 2020 dengan pangsa mencapai 55,12%. Ekspor ke Timor Leste juga tercatat tumbuh 19,69% (yoY), meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2020 yang terkontraksi sebesar 30,51% (yoY). Hal ini didorong oleh normalisasi aktivitas ekspor

Provinsi NTT ke Timor Leste melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sejak akhir Juni 2020¹⁶. Sebelumnya, kegiatan ekspor melalui PLBN hanya dibuka seminggu sekali untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 dari luar Provinsi NTT. Di sisi lain, ekspor jasa juga masih terbatas seiring dihentikan sementara beberapa rute kedatangan langsung luar negeri, termasuk Dili-Kupang. Kebijakan pembatasan akses masuk dan keluar orang melalui PLBN Provinsi NTT juga masih terus berlanjut¹⁷.

Ekspor antardaerah Provinsi NTT terutama adalah ternak (sapi, kerbau, dan kuda). Pada triwulan III 2020, kinerja ekspor ternak Provinsi NTT terkontraksi 33,61% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan II 2020 yang tumbuh 14,24%. Menurunnya kinerja ekspor ternak pada triwulan III 2020 dipengaruhi oleh berkurangnya permintaan sapi terutama Idul Adha seiring himbauan Pemerintah untuk melaksanakan penyembelihan kurban di Rumah Pemotongan Hewan dalam rangka mengurangi risiko penyebaran pandemi COVID-19¹⁸. Sampai dengan triwulan III 2020, persentase realisasi ekspor ternak Provinsi NTT mencapai 88,05% dari total kuota ekspor ternak tahun 2020. Provinsi Kalimantan Timur dan Jawa Barat menjadi tujuan utama ekspor ternak Provinsi NTT dengan pangsa masing-masing 34,95% dan 29,14%.

Impor luar negeri Provinsi NTT triwulan III 2020 juga terkontraksi sebesar 87,93% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan II 2020 sebesar 47,07% (yoy). Perlambatan impor luar negeri Provinsi NTT dipengaruhi oleh menurunnya impor barang modal. Hal ini juga berpengaruh terhadap perlambatan kinerja investasi Provinsi NTT pada triwulan III 2020. Berdasarkan asal negara, Timor Leste juga menjadi negara asal impor luar negeri terbesar di Provinsi NTT pada triwulan III 2020 dengan pangsa 91,26%. Sementara itu, komoditas biji-bijian berminyak menjadi komoditas utama impor Provinsi NTT pada triwulan III 2020 dengan pangsa 52,46%.

¹⁶ Keterangan Kepala Kantor Bea Cukai Atambua, 29 Juni 2020

¹⁷ Instruksi Gubernur NTT Nomor BU.443/02/BPP/2020 tentang Pembatasan Akses Bagi WNI dan WNA Pelintas Batas di PLBN Terpadu dan Pos Lintas Batas di Wilayah Provinsi NTT tanggal 16 Maret 2020.

¹⁸ Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441H/2020M Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 tanggal 30 Juni 2020.

Pada triwulan IV 2020, kinerja perdagangan Provinsi NTT baik luar negeri maupun antardaerah diprakirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perbaikan ekonomi global mendorong kenaikan volume perdagangan dunia dan berdampak pada perdagangan luar negeri nasional dan Provinsi NTT. Di samping itu, perdagangan antardaerah juga membaik, didukung oleh pemulihan aktivitas ekonomi pasca adaptasi kebiasaan baru. Meskipun demikian, PSBB masih berlangsung di beberapa daerah seiring peningkatan kasus COVID-19, yakni Provinsi Jawa Barat (Kota Bogor, Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi), DKI Jakarta, dan Banten.

1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

Struktur ekonomi Provinsi NTT pada triwulan III 2020 didominasi oleh empat LU utama, yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Jasa Pendidikan. Struktur ekonomi tersebut berbeda dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. LU Jasa Pendidikan mengantikan LU Konstruksi yang turun menjadi peringkat kelima penyumbang PDRB Provinsi NTT. Hal ini tidak lepas dari dampak pandemi COVID-19 yang menahan kinerja LU Konstruksi. Secara *year on year*, tujuh dari 17 LU di Provinsi NTT mengalami akselerasi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yakni LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; *Real Estate*; serta Jasa Pendidikan. Secara triwulanan, kinerja LU di Provinsi NTT menunjukkan perbaikan seiring pembukaan aktivitas ekonomi dengan penerapan protokol kesehatan. Hanya enam LU yang mengalami perlambatan pertumbuhan secara triwulanan yakni LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Pengadaan Air, Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang; Informasi dan Komunikasi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Pada triwulan IV 2020, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT diprakirakan meningkat pasca kebijakan adaptasi kebiasaan baru yang dimulai di triwulan III 2020. Kebijakan tersebut diprakirakan mendorong perbaikan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, didukung oleh momen HBKN Natal, pembukaan destinasi wisata, dan Pilkada serentak. Sementara itu, kinerja LU Konstruksi juga diprakirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2020 seiring realisasi belanja modal pemerintah dan berlanjutnya pembangunan konstruksi pihak swasta pasca adaptasi kebiasaan baru di Provinsi NTT. Di sisi lain, kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga meningkat, didorong oleh masa panen komoditas perkebunan terutama mete yang merupakan komoditas ekspor utama Provinsi NTT.

Tabel 1.2. Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Lapangan Usaha

Kategori	Uraian	2018				2018	2019				2019	2020			Pangsa III 2020
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,30	4,08	1,50	4,31	3,03	(0,82)	6,80	1,06	7,79	3,75	3,09	(0,45)	0,05	28,30
B	Pertambangan dan Penggalian	4,12	0,33	0,82	2,56	1,94	6,22	5,59	2,72	(0,70)	3,32	(7,18)	(12,96)	(13,81)	1,07
C	Industri Pengolahan	10,00	6,04	0,90	4,28	5,16	9,22	9,53	10,54	7,40	9,14	(3,28)	(4,10)	(7,17)	1,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,54	9,29	8,06	11,22	9,57	3,68	2,48	(5,11)	2,35	0,82	14,50	11,76	17,18	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,71	5,52	2,75	5,17	5,47	5,29	6,43	6,79	3,32	5,44	(2,00)	4,16	6,17	0,06
F	Konstruksi	6,64	5,31	6,63	6,92	6,39	5,78	2,94	0,75	8,18	4,43	(0,01)	(9,80)	(9,99)	9,84
G	Pengadaan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,82	7,19	7,16	8,08	7,33	8,77	8,33	8,79	4,89	7,64	4,64	(7,75)	(10,05)	11,02
H	Transportasi dan Pengudungan	8,89	8,03	7,07	7,81	7,92	5,46	7,05	1,76	(0,06)	3,42	5,34	(23,23)	(16,05)	4,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19,68	17,73	9,60	4,13	12,16	9,19	8,21	5,67	1,37	5,99	(8,64)	(42,35)	(35,84)	0,50
J	Informasi dan Komunikasi	4,64	3,53	7,52	3,84	4,89	8,39	7,89	2,91	5,58	5,59	6,13	15,36	14,03	7,63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,03	2,77	3,55	1,80	3,50	5,93	(1,83)	5,44	3,29	3,22	1,88	12,32	7,16	4,35
L	Real Estate	5,76	7,06	6,27	0,54	4,85	4,15	0,35	(3,45)	(0,74)	(0,00)	0,26	(5,58)	(0,83)	2,29
M,N	Jasa Perusahaan	1,63	2,17	2,36	0,57	1,67	4,94	3,94	5,24	1,42	3,86	0,87	(52,51)	(53,35)	0,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,99	7,46	8,52	7,21	7,56	9,05	8,59	7,45	7,74	8,17	5,26	6,75	5,85	14,72
P	Jasa Pendidikan	0,56	0,46	4,85	3,57	2,41	8,33	6,02	7,49	0,06	5,34	(0,90)	(2,38)	3,07	10,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,39	6,73	7,28	6,17	7,11	9,06	6,93	2,59	4,42	5,67	7,49	5,49	3,81	2,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,31	6,57	5,08	5,18	6,47	6,93	7,42	5,84	6,08	6,55	4,63	(21,19)	(21,63)	1,67
P D R B		5,01	5,02	5,14	5,34	5,13	5,30	6,36	3,87	5,32	5,20	2,98	(1,99)	(1,68)	100,00

Sumber: BPS

1.3.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan III 2020 tumbuh 0,05% (yoY), meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2020 yang terkontraksi 0,45% (yoY). Adaptasi kebiasaan baru memengaruhi perbaikan permintaan komoditas bahan makanan dan memperlancar distribusi komoditas tersebut sehingga mendorong peningkatan produksi LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Peningkatan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memengaruhi perbaikan rata-rata nilai tukar petani (NTP) dari 95,67 pada triwulan II 2020 menjadi 95,85 pada triwulan III 2020. Perbaikan NTP pada triwulan III 2020 didorong oleh subsektor tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Secara triwulanan, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terkontraksi sebesar 3,33% (qtq), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2020

yang tumbuh 11,77% (qtq) seiring berakhirnya masa panen padi dan palawija pada triwulan II 2020.



Sumber: BPS

Grafik 1.13. Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi NTT



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia

Grafik 1.14. Survei Kegiatan Dunia Usaha LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi NTT

Pada triwulan IV 2020, perbaikan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi NTT diprakirakan berlanjut. Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia, prakiraan saldo bersih tertimbang (SBT) kegiatan dunia usaha LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan IV 2020 mencapai -7,88%, meningkat dibandingkan dengan realisasi triwulan III 2020 sebesar -11,48%. Peningkatan SBT tersebut didorong oleh subsektor tanaman perkebunan dan tanaman pangan. Pada triwulan IV 2020, komoditas perkebunan memasuki masa panen, terutama mete yang merupakan komoditas ekspor utama Provinsi NTT. Pada tahun 2019, pangsa ekspor mete mencapai 49,79% dari keseluruhan ekspor Provinsi NTT.

1.3.2 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

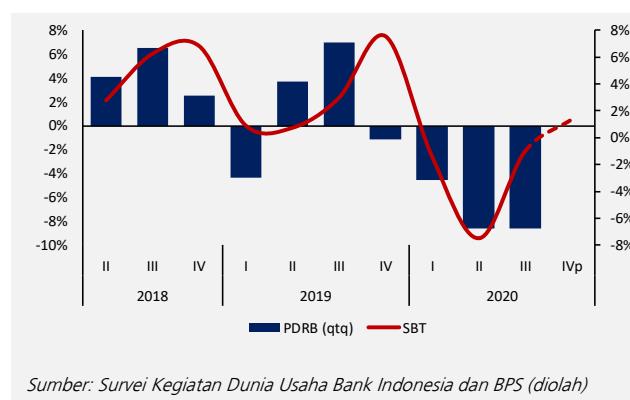
Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor melambat dari -7,75% (yoY) pada triwulan II 2020 menjadi -10,05% (yoY) pada triwulan III 2020. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh penjualan kendaraan bermotor yang tidak setinggi tahun sebelumnya seiring belum pulihnya permintaan sebagai dampak pandemi COVID-19. Hal ini tercermin dari Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia yang menunjukkan omzet penjualan kendaraan bermotor pada triwulan III 2020 masih menunjukkan kontraksi sebesar 29,12% (yoY), meskipun sedikit membaik dibandingkan dengan kontraksi triwulan II 2020 sebesar 37,61% (yoY). Menurunnya

penjualan kendaraan bermotor juga dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan pembiayaan yang meningkatkan besaran *down payment* sebagai mitigasi gagal bayar debitur di tengah pandemi COVID-19. Di samping itu, *refocusing* dan *reallocating* APBD juga berdampak pada pengurangan anggaran belanja barang dan jasa sehingga memengaruhi kinerja sektor ritel. Meskipun demikian, secara triwulanan, kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menunjukkan perbaikan dengan tumbuh 4,32% (qtq), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 8,59% (qtq) seiring membaiknya ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi pasca kebijakan adaptasi kebiasaan baru.

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada triwulan IV 2020 diprakirakan meningkat. *Google mobility index* menunjukkan adanya peningkatan mobilitas masyarakat di sektor ritel secara bertahap pasca penerapan adaptasi kebiasaan baru di Provinsi NTT. Di samping itu, perbaikan ekonomi global dan relaksasi pembatasan akses perdagangan baik luar negeri maupun antardaerah juga diprakirakan dapat memulihkan perdagangan dari dan ke luar Provinsi NTT. Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia menunjukkan prakiraan SBT LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor membaik dari -1,00% pada triwulan III 2020 menjadi 1,35% pada triwulan IV 2020. Peningkatan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada triwulan IV 2020 juga didukung oleh momen HBKN Natal, pembukaan destinasi wisata pasca adaptasi kebiasaan baru, dan Pilkada serentak yang dilaksanakan di sembilan kabupaten Provinsi NTT.



Grafik 1.15. Perkembangan Omzet Penjualan Kendaraan Bermotor Provinsi NTT



Grafik 1.16. Survei Kegiatan Dunia Usaha LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Provinsi NTT

1.3.3 Konstruksi

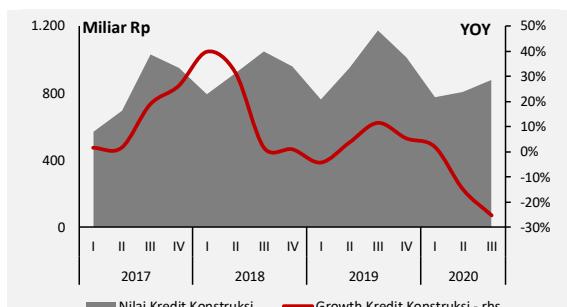
Kinerja LU Konstruksi pada triwulan III 2020 terkontraksi 9,99% (yoY), sedikit lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 9,80% (yoY). Perlambatan kinerja LU Konstruksi sejalan dengan menurunnya pertumbuhan realisasi belanja modal Pemerintah di Provinsi NTT sebagai dampak pandemi COVID-19 yang mendorong Pemerintah melaksanakan *refocusing* dan *reallocating* anggaran. Pandemi COVID-19 juga memengaruhi kelancaran mobilitas bahan konstruksi dan metode kerja konstruksi dengan menerapkan protokol kesehatan. Perlambatan kinerja LU Konstruksi juga tercermin dari penurunan realisasi investasi swasta baik PMDN dan PMA serta penyaluran kredit konstruksi yang terkontraksi 25,25% (yoY), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 14,99% (yoY). Meskipun demikian, secara triwulanan, kinerja LU Konstruksi membaik pada triwulan III 2020 dengan tumbuh 6,83% (qtq), dibandingkan dengan triwulan II 2020 yang terkontraksi 6,52% (qtq).

Pembangunan proyek strategis Pemerintah di Provinsi NTT masih berjalan di tengah pandemi COVID-19. Pembangunan Bendungan Napun Gete (Kabupaten Sikka) dan Bendungan Temef (Kabupaten Timor Tengah Selatan) yang merupakan Proyek Strategis Nasional di Provinsi NTT masih *on track*¹⁹. Progress pembangunan Bendungan Napun Gete telah mencapai 88,42% dengan target penyelesaian akhir Desember 2020. Di sisi lain, progress pembangunan Bendungan Temef rata-rata telah mencapai 69,70% dengan target penyerahan pertama pada tahun 2022. Pembangunan bendungan di Provinsi NTT diperkirakan dapat mendukung kinerja LU utama di Provinsi NTT yakni LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sebagai informasi, dua bendungan PSN juga telah selesai dibangun di Provinsi NTT yakni Bendungan Raknamo (Kabupaten Kupang) dan Bendungan Rotiklot (Kabupaten Belu). Sementara itu, pembangunan Destinasi Super Prioritas di Labuan Bajo juga masih berlanjut. Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian proyek pembangunan Labuan Bajo tahun anggaran 2020 pada Desember 2020 antara lain penataan Puncak Waringin, Gua Batu Cermin, serta jalan dan trotoar. Proyek pemindahan pelabuhan logistik dari Pelabuhan Labuan Bajo ke Wae Kelambu juga terus berlanjut dengan progress saat ini mencapai 48,67%. Pembangunan Bandar Udara

¹⁹ Informasi Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kementerian PUPR pada tanggal 20 Oktober 2020.

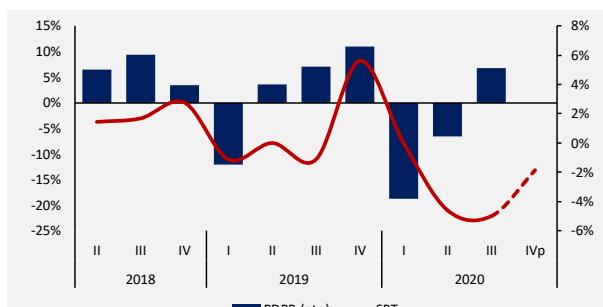
Internasional Komodo melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) juga tengah berlangsung, meskipun sedikit tertunda sebagai dampak pandemi COVID-19.

Pada triwulan IV 2020, kinerja LU Konstruksi diprakirakan membaik dibandingkan dengan triwulan II 2020. Hal tersebut tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia yang menunjukkan prakiraan SBT LU Konstruksi pada triwulan IV 2020 terkontraksi sebesar 1,84%, lebih baik dibandingkan dengan kontraksi triwulan III 2020 sebesar 5,00%. Di samping itu, Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia juga mengonfirmasi perbaikan omzet penjualan bahan konstruksi pada triwulan IV 2020 (sampai dengan November 2020). Perbaikan kinerja LU Konstruksi pada triwulan IV 2020 didorong oleh realisasi belanja modal pemerintah dan berlanjutnya pembangunan konstruksi pihak swasta pasca adaptasi kebiasaan baru di Provinsi NTT.



Sumber: Laporan Bank Umum Bank Indonesia

Grafik 1.17. Perkembangan Penyaluran Kredit Konstruksi di Provinsi NTT



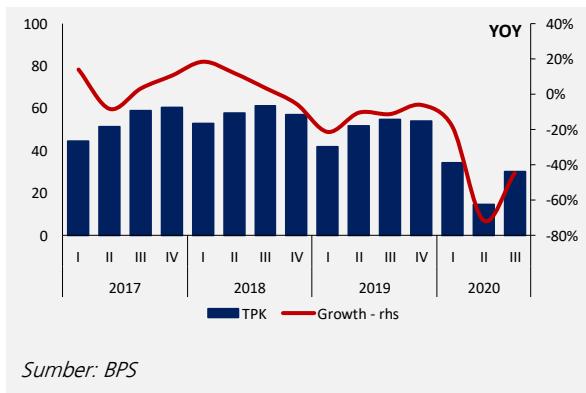
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia dan BPS (diolah)

Grafik 1.18. Survei Kegiatan Dunia Usaha LU Konstruksi Provinsi NTT

1.3.4 Lapangan Usaha Lainnya

Pada triwulan III 2020, kontraksi LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Provinsi NTT berkurang menjadi 35,84% (yoY) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 42,35% (yoY). Peningkatan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tersebut terkonfirmasi dari rata-rata tingkat penghunian kamar (TPK) pada triwulan III 2020 sebesar 30,35%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata TPK triwulan II 2019 sebesar 14,86%. Peningkatan TPK tersebut didorong oleh adaptasi kebiasaan baru dan didukung oleh promosi dan diskon untuk menarik minat pengunjung hotel. Penyelenggaraan rapat dan kegiatan lainnya baik Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah juga turut meningkatkan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Provinsi NTT. Sementara itu, aktivitas

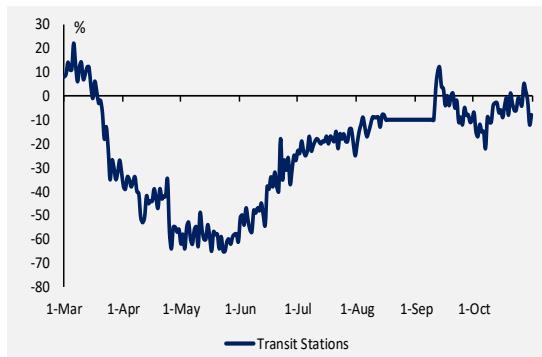
ekonomi di restoran dan rumah makan berangsur pulih, didukung oleh penerapan protokol kesehatan pasca pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 pada triwulan II 2020.



Grafik 1.19. Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Provinsi NTT

Perbaikan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan III 2020 sejalan dengan perbaikan kinerja LU Transportasi dan Pergudangan. Kontraksi LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan III 2020 berkurang menjadi 16,05% (yoY), dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 23,23% (yoY). Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional telah mencabut larangan mobilitas masyarakat antardaerah dan mewajibkan penerapan protokol kesehatan bagi setiap individu yang melaksanakan perjalanan baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Di samping itu, Pemerintah juga telah mencabut pembatasan perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara, dengan persyaratan tertentu²⁰. Kebijakan-kebijakan ini berdampak pada peningkatan penggunaan jasa transportasi penumpang, yang tercermin dari mobilitas masyarakat Provinsi NTT di *transit station* pada triwulan III 2020 cenderung meningkat, meskipun belum kembali seperti kondisi sebelum COVID-19. Aktivitas penumpang di Bandara Internasional El Tari (Kupang) juga menunjukkan peningkatan. Keberangkatan dan kedatangan penumpang di Bandara Internasional El Tari pada triwulan III 2020 tercatat tumbuh sebesar -50,26% (yoY), membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar -85,50% (yoY).

²⁰ Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020



Sumber: Google Mobility Report

Grafik 1.20. Perkembangan Mobilitas Masyarakat Provinsi NTT di *Transit Station*



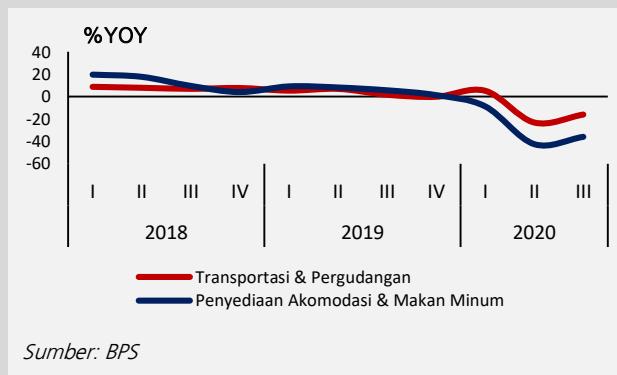
Sumber: PT Angkasa Pura I (Persero)

Grafik 1.21. Perkembangan Jumlah Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang Bandara Internasional El Tari Kupang

Pada triwulan IV 2020, perbaikan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta LU Transportasi dan Pergudangan diprakirakan berlanjut. Hal ini merupakan dampak bertahap penerapan kebijakan adaptasi kebiasaan baru yang mendorong pembukaan objek wisata di Provinsi NTT serta normalisasi penggunaan transportasi penumpang dengan menerapkan protokol kesehatan mulai triwulan III 2020. Pemulihan kedua LU tersebut masih ditopang oleh kunjungan domestik seiring pembatasan kunjungan luar negeri untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Namun demikian, perbaikan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta LU Transportasi dan Pergudangan bergantung pada pengendalian COVID-19 karena memengaruhi *level of confidence* pengunjung.

Boks 1. Pemulihan Sektor Pariwisata Provinsi NTT di Tengah Adaptasi Kebiasaan Baru

Sektor pariwisata Provinsi NTT menunjukkan perbaikan kinerja pada triwulan III 2020, tercemin dari pengurangan kontraksi LU Transportasi dan Pergudangan serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Kontraksi LU Transportasi dan Pergudangan mengalami perbaikan dari triwulan II 2020 sebesar 23,23% (yo) menjadi 16,05% (yo) pada triwulan III 2020. Bandara Internasional El Tari (Kupang) tercatat mengalami kenaikan pertumbuhan kedatangan penumpang dari -85,10% (yo) pada triwulan II 2020 menjadi -49,61% (yo) pada triwulan III 2020. Sementara itu, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga mencatatkan perbaikan dari kontraksi triwulan II 2020 sebesar 42,35% menjadi 35,84% (yo) di triwulan III 2020. Hal tersebut didorong oleh kenaikan TPK dari rata-rata 14,86% pada triwulan II 2020 menjadi 30,35% pada triwulan III 2020.



Grafik Boks 1.1. Pertumbuhan LU Transportasi dan Pergudangan serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Perbaikan kinerja sektor pariwisata didorong oleh penyesuaian kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah. Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional telah mencabut larangan mobilitas masyarakat¹ dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi

¹ SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 menjelaskan bahwa pembatasan mobilitas masyarakat, kecuali kriteria tertentu yang ditetapkan SE ini, berlaku sejak 6 Mei 2020 sampai 7 Juni 2020

provinsi/kabupaten/kota melalui Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2020² yang berlaku mulai 6 Juni 2020. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum wajib mematuhi protokol kesehatan sebagaimana diatur oleh SE tersebut. Sementara itu, sejak tanggal 15 Juni 2020 Pemerintah Provinsi NTT juga telah membuka kembali destinasi wisata³, sebagai upaya pemulihan ekonomi di daerah. Sejalan dengan Pemerintah Provinsi NTT, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga melakukan pembukaan kembali Taman Nasional⁴ sejak 23 Juni 2020. Tiga diantaranya terdapat di Provinsi NTT yakni Taman Nasional Komodo (Manggarai Barat), Kelimutu (Ende), serta Riung 17 Pulau (Ngada). Pembukaan kembali destinasi wisata di Provinsi NTT dan Taman Nasional dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Pemulihan sektor pariwisata pada triwulan III 2020 ditopang oleh wisatawan domestik. Sampai dengan triwulan III 2020, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) masih terbatas. Hal tersebut sebagai dampak pembatasan akses masuk dan keluar orang di wilayah PLBN sejak 20 Maret 2020. Pembatasan tersebut dilakukan untuk mencegah risiko masuknya COVID-19 dari luar Provinsi NTT mengingat letak Provinsi NTT berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste⁵. Penerbangan langsung dari Bandara Internasional El Tari (Kupang) menuju Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato (Dili-Timor Leste) juga masih dihentikan sementara. Kunjungan wisman dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai (Denpasar-Bali) sebagai pintu masuk utama wisman menuju destinasi super prioritas di Provinsi NTT yakni Labuan Bajo⁶, juga masih terbatas. Hal tersebut mengingat Pemerintah masih menutup penerbangan internasional dari dan ke Bali.

² SE telah diubah melalui SE Gugus Tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19.

³ Surat Sekretariat Daerah Provinsi NTT Nomor BU.005/17/Parekraf/2020 tanggal 29 Mei 2020

⁴ Keputusan Menteri LHK No. SK.261/MENLHK/KSDAE/ KSA.0/6/2020

⁵ Instruksi Gubernur NTT Nomor BU.443/02/BPP/2020 tentang Pembatasan Akses Bagi WNI dan WNA Pelintas Batas di PLBN Terpadu dan Pos Lintas Batas di Wilayah Provinsi NTT tanggal 16 Maret 2020.

⁶ Hasil Survei *Exit Flores* (2018) oleh Dinas Pariwisata Manggarai Barat & SUSTOUR



Sumber: BPS

Grafik Boks 1.2. Perkembangan Kunjungan Melalui Pos Lintas Batas Negara Timor Leste



Sumber: PT Angkasa Pura I (diolah)

Grafik Boks 1.3. Perkembangan Kedatangan Penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali

Kementerian Keuangan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) telah menyiapkan program hibah pariwisata periode September hingga Desember 2020. Program hibah pariwisata adalah suatu strategi percepatan untuk membantu pengusaha hotel dan restoran yang merupakan padat karya dan saat ini secara umum sedang mengalami gangguan finansial serta pemerintah kabupaten/kota yang kehilangan atau mengalami penurunan pendapatan asli daerah (PAD) akibat tidak adanya pergerakan wisatawan⁷. Alokasi anggaran program hibah pariwisata secara nasional adalah Rp3,3 triliun yang ditujukan kepada 101 kabupaten/kota. Kriteria kabupaten/kota yang menerima program hibah pariwisata antara lain: 1) sepuluh destinasi pariwisata prioritas dan lima destinasi super prioritas, 2) ibukota provinsi, 3) destinasi *branding*, 4) daerah dengan realisasi pajak hotel dan restoran minimal 15%, serta 5) daerah yang termasuk 100 *calender of event*. Dana hibah pariwisata yang diterima masing-masing kabupaten/kota akan dibagi dengan ketentuan 70% industri hotel dan restoran serta 30% pemerintah daerah. Provinsi NTT sendiri menerima alokasi program hibah pariwisata sebesar Rp23,85 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Boks 1.1. Alokasi Program Hibah Pariwisata Untuk Provinsi NTT

Kabupaten/Kota	Nilai Hibah
Kota Kupang	Rp4,79 Miliar
Manggarai Barat	Rp12,48 Miliar
Sumba Barat	Rp5,55 Miliar
Flores Timur	Rp0,51 Miliar
Ende	Rp0,52 Miliar

Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

⁷ Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 tanggal 8 September 2020

Pemerintah mengimbau agar seluruh pelaku parekraf menerapkan *Clean, Health, Safety, and Environment* (CHSE) dan mendapatkan sertifikasi CHSE. Sertifikasi CHSE berfungsi sebagai jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan telah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Program ini merupakan salah satu strategi adaptasi kebiasaan baru di sektor parekraf. Pemilik/pengelola usaha dan destinasi pariwisata yang lolos audit/penilaian akan mendapatkan Sertifikat CHSE dari Lembaga Sertifikasi, dan selanjutnya diberi label InDonesia CARE (I Do Care) oleh Kementerian Parekraf. Tahun ini, Pemerintah menargetkan 6.606 pelaku usaha parekraf baik hotel dan nonhotel (restoran, pusat oleh-oleh, kerajinan tangan, dan lain-lain) untuk memperoleh sertifikat CHSE⁸. Provinsi NTT sendiri ditargetkan sebanyak 49 sertifikat CHSE yang terdiri dari 24 hotel dan 25 nonhotel. Sampai dengan Oktober 2020, sertifikat CHSE telah diterima oleh 14 hotel dan 5 nonhotel di Provinsi NTT, terutama di Kota Kupang.

Perbaikan kinerja sektor pariwisata diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2021. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemulihan sektor pariwisata baik secara nasional maupun Provinsi NTT antara lain pemulihan ekonomi global terutama negara asal wisman utama, kebijakan mobilitas wisatawan baik domestik maupun mancanegara serta ketersediaan vaksin COVID-19. Untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata pasca adaptasi kebiasaan baru, rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan antara lain: 1) melanjutkan perluasan sertifikasi CHSE, 2) mengelola persepsi positif destinasi pariwisata salah satunya melalui kampanye digital antara lain #ExoticNTT atau #RinduLabuanBajo, 3) perpanjangan alokasi hibah pariwisata pada tahun 2021, 4) mendorong *quality* dan *sustainable tourism*, serta 5) digitalisasi pada aktivitas pariwisata antara lain sistem pembayaran.

⁸ Siaran Pers Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Cbc JW

LFVB OHBO QFN FSJOUBI E B FSBI

Realisasi belanja pemerintah (APBD dan APBN) di NTT pada triwulan III tahun 2020 tercatat sebesar Rp27,32 triliun, dengan persentase serapan sebesar 57,09% dari total anggaran belanja. Persentase serapan ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh penyerapan APBN dan APBD Provinsi yang tinggi dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Sementara itu, realisasi pendapatan pemerintah (APBD) di NTT mencapai Rp18,69 triliun dengan persentase serapan sebesar 66,25% dari total anggaran pendapatan. Persentase serapan lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pendapatan Pemerintah Kota dan Kabupaten tertahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya akibat kinerja PAD yang menurun di tengah pandemi COVID-19.

2.1 Kondisi Umum

Pagu anggaran perubahan belanja pemerintah di NTT (APBD & APBN) pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp47,86 triliun atau tumbuh 0,34% (yoY). Pagu anggaran belanja tersebut turun dari Rp51,43 triliun (terkontraksi 6,94%) akibat *refocusing* anggaran di tengah pandemi COVID-19. Komposisi pagu anggaran belanja terdiri atas anggaran Kementerian dan Lembaga Vertikal (APBN) sebesar Rp17,99 triliun, anggaran Provinsi NTT (APBD-P) sebesar Rp6,42 triliun, dan anggaran gabungan 1 kota dan 21 kabupaten (APBD-P) sebesar Rp23,45 triliun.

Posisi realisasi belanja pemerintah (APBD & APBN) di NTT sampai dengan triwulan III 2020 tercatat sebesar Rp27,32 miliar, atau 57,09% dari total pagu anggaran perubahan belanja tahun 2020. Realisasi belanja terhadap anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh realisasi belanja Kementerian dan Lembaga Vertikal (APBN) yang tinggi dalam rangka mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta realisasi belanja Pemerintah Provinsi NTT (APBD) yang tinggi dalam mendorong penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS). Di sisi lain, realisasi belanja gabungan Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten (APBD) lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya akibat kendala administratif di tengah *refocusing* anggaran.

Tabel 2.1. Anggaran Belanja Perubahan Pemerintah di Provinsi NTT Tahun 2019-2020

Kategori	Pagu Belanja APBN-P/APBD-P (Rp Miliar)		Growth Pagu (% yoy)	
	2019	2020	2019	2020
APBN	17.456	17.995	0,86	3,09 ▲
APBD Provinsi	5.770	6.415	11,16	11,18 ▲
APBD Kabupaten/Kota	24.468	23.447	6,08	-4,18 ▼
Total	47.694	47.856	4,68	0,34 ▼

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi NTT dan Badan Keuangan Daerah NTT (diolah)
Tabel 2.2. Realisasi Belanja Pemerintah di Provinsi NTT Triwulan III Tahun 2019-2020

Kategori	Posisi Realisasi Belanja (Rp Miliar)		Realisasi terhadap Anggaran (%)	
	Tw III 2019	Tw III 2020	Tw III 2019	Tw III 2020
APBN	9.415	12.317	53,94	68,45 ▲
APBD Provinsi	2.958	4.175	51,26	65,09 ▲
APBD Kabupaten/Kota	11.461	10.831	46,84	46,19 ▼
Total	23.834	27.323	49,97	57,09 ▲

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi NTT dan Badan Keuangan Daerah NTT (diolah)

Pagu anggaran perubahan pendapatan pemerintah di NTT (APBD) pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp28,22 triliun atau terkontraksi 1,92% (yoy) (Tabel 2.3). Pagu anggaran pendapatan tersebut turun dari Rp29,26 triliun (kontraksi 3,53%) akibat *refocusing* anggaran di tengah pandemi COVID-19. Komposisi pagu anggaran pendapatan terdiri atas anggaran Provinsi NTT (APBD-P) sebesar Rp5,81 triliun dan anggaran gabungan 1 kota dan 21 kabupaten (APBD-P) sebesar Rp22,41 triliun.

Posisi realisasi pendapatan pemerintah (APBD) di NTT sampai dengan triwulan III 2020 tercatat sebesar Rp18,67 triliun, atau 66,25% dari total pagu anggaran pendapatan tahun 2020 (Tabel 2.4). Serapan realisasi pendapatan terhadap anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, persentase serapan realisasi anggaran yang lebih tinggi disebabkan oleh pagu anggaran yang berkurang. Bila dilihat lebih detail, realisasi pendapatan Provinsi NTT yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya didorong oleh penyaluran dana perimbangan dari pemerintah pusat yang meningkat dalam rangka PEN. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru berkurang akibat penerimaan pajak yang terkontraksi di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya, pendapatan pemerintah kota dan kabupaten di

NTT juga berkurang dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh berkurangnya penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota dan kabupaten di NTT.

Tabel 2.3. Anggaran Pendapatan Perubahan Pemerintah di Provinsi NTT Tahun 2019-2020

Kategori	Pagu Pendapatan APBD-P (Rp Miliar)		<i>Growth</i> Pagu (% yoy)	
	2019	2020	2019	2020
APBD Provinsi	5.561	5.812	13,25	4,51 ▼
APBD Kabupaten/Kota	23.218	22.414	7,36	-3,46 ▼
Total	28.779	28.226	8,45	-1,92 ▼

Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT (diolah)

Tabel 2.4. Anggaran Pendapatan Perubahan Pemerintah di Provinsi NTT Tahun 2019-2020

Kategori	Posisi Realisasi Pendapatan (Rp Miliar)		Realisasi terhadap Anggaran (%)	
	Tw III 2019	Tw III 2020	Tw III 2019	Tw III 2020
APBD Provinsi	4.042	4.516	72,69	77,70 ▲
APBD Kabupaten/Kota	14.369	14.182	61,89	63,27 ▲
Total	18.411	18.698	63,97	66,25 ▲

Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT (diolah)

2.2 APBD Pemerintah Provinsi NTT

2.2.1 Pendapatan APBD Pemerintah Provinsi NTT

Anggaran (target) pendapatan APBD Pemprov NTT tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun 2019, bersumber dari peningkatan target penerimaan dari komponen PAD dan Dana Perimbangan. PAD ditargetkan tumbuh 8,91% (yoY) dengan komponen utama bersumber dari pendapatan pajak. Dana Perimbangan ditargetkan tumbuh 1,60% (yoY) dengan komponen utama bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Di sisi lain, target komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terkontraksi 20,89% (yoY).

Realisasi pendapatan APBD Pemprov NTT sampai dengan triwulan III 2020 mencapai 77,70% dari pagu anggaran pendapatan, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun 2019. Hal ini terutama didorong oleh penerimaan Dana Perimbangan yang meningkat, yang bersumber dari peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat kepada Pemprov NTT dalam rangka mendorong PEN.

Di sisi lain, realisasi PAD terkontraksi, disebabkan oleh menurunnya pendapatan seluruh komponen PAD akibat dampak dari COVID-19.

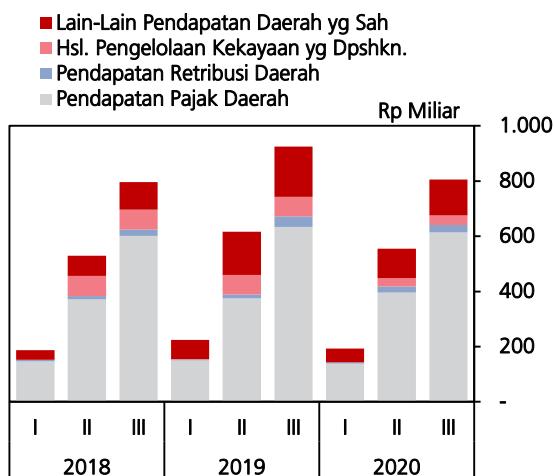
Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemprov NTT Triwulan III Tahun 2019-2020

Kategori	2019					2020				
	Pagu APBD-P (Rp M)	Growth Pagu (% yoy)	Realisasi APBD Tw III (Rp M)	Persentase Realisasi Tw III (%)	Growth Realisasi Tw III (% yoy)	Pagu APBD-P (Rp M)	Growth Pagu (% yoy)	Realisasi APBD Tw III (Rp M)	Persentase Realisasi Tw III (%)	Growth Realisasi Tw III (% yoy)
PENDAPATAN DAERAH	5.561	13,25	4.042	72,69	10,96	5.812	4,51	4.516	77,70	11,72
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.346	23,42	925	68,76	16,15	1.466	8,91	805	54,93	-12,99
- Pendapatan Pajak Daerah	955	15,38	634	66,34	5,29	1.031	7,98	614	59,51	-3,13
- Pendapatan Retribusi Daerah	70	154,54	39	55,05	73,33	104	48,84	27	26,28	-28,93
- Hsl. Pengelolaan Kekayaan yg Dpshkn.	82	11,93	70	85,20	-3,25	142	72,14	34	24,21	-51,09
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yg Sah	238	47,53	183	76,80	82,70	189	-20,89	130	68,77	-29,16
Dana Perimbangan	4.174	9,87	3.116	74,64	9,63	4.241	1,60	3.694	87,11	18,58
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	63	-26,91	26	41,59	-48,76	65	2,98	54	82,73	104,83
- Dana Alokasi Umum	1.875	2,61	1.563	83,33	2,61	1.722	-8,16	1.446	83,97	-7,46
- Dana Alokasi Khusus	2.236	18,58	1.527	68,28	20,42	2.454	9,75	2.194	89,43	43,74
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	41	99,19	1	3,27	-70,36	105	155,47	17	15,81	1135,22
- Pendapatan Hibah	41	99,19	1	3,27	-70,36	98	139,01	1	0,68	-50,29
- Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	0	-	0	-	-	7	-	16	-	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT (diolah)

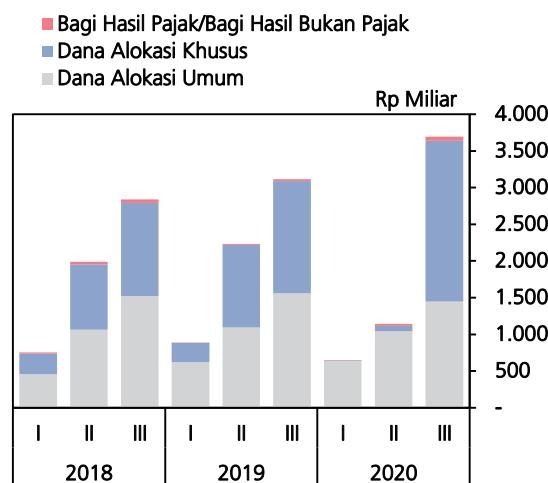
Realisasi PAD Pemprov NTT sampai dengan triwulan III 2020 tercatat sebesar Rp805 miliar atau terkontraksi 12,99% (yoy). Bila dilihat lebih detil, kontraksi terjadi di seluruh komponen PAD. Realisasi pendapatan pajak daerah mencapai Rp614 miliar, terkontraksi 3,13% (yoy). Menurut informasi dari Badan Keuangan Daerah NTT, hal ini disebabkan oleh menurunnya penerimaan berbagai macam pajak, terutama pajak kendaraan bermotor (PKB). Penjualan kendaraan bermotor yang masih lesu serta kepatuhan masyarakat membayar pajak yang menurun di tengah pandemi COVID-19 merupakan faktor utama berkurangnya penerimaan PKB.

Realisasi Dana Perimbangan Pemprov NTT sampai dengan triwulan III 2020 tercatat sebesar Rp3,69 triliun, tumbuh 18,58% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini terutama bersumber dari penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2,19 triliun, tumbuh 43,74% (yoy). Selanjutnya, penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) tercatat sebesar Rp54 miliar, tumbuh 104,83% (yoy). Di sisi lain, penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) tercatat sebesar Rp1,45 triliun, terkontraksi 7,46% (yoy).



Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik 2.1. Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Pemprov NTT s.d. Triwulan III Pada Tahun 2018-2020



Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik 2.2. Realisasi Dana Perimbangan Pemprov NTT s.d. Triwulan III Pada Tahun 2018-2020

2.2.2 Belanja APBD Provinsi NTT

Anggaran belanja APBD Pemprov NTT tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun 2019, bersumber dari peningkatan anggaran hampir semua komponen belanja. Belanja daerah ditargetkan tumbuh 12,81% (yoY), terutama bersumber dari peningkatan anggaran belanja modal dan belanja tak terduga. Di sisi lain, anggaran belanja transfer terkontraksi akibat penerimaan daerah yang berkurang di tengah pandemi COVID-19.

Realisasi belanja APBD Pemprov NTT terhadap total anggaran sampai dengan triwulan III 2020 mencapai 65,09% lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini terutama didorong oleh Belanja Hibah dan Belanja Tak Terduga yang meningkat dalam rangka pengendalian COVID-19 serta program pemulihan ekonomi.

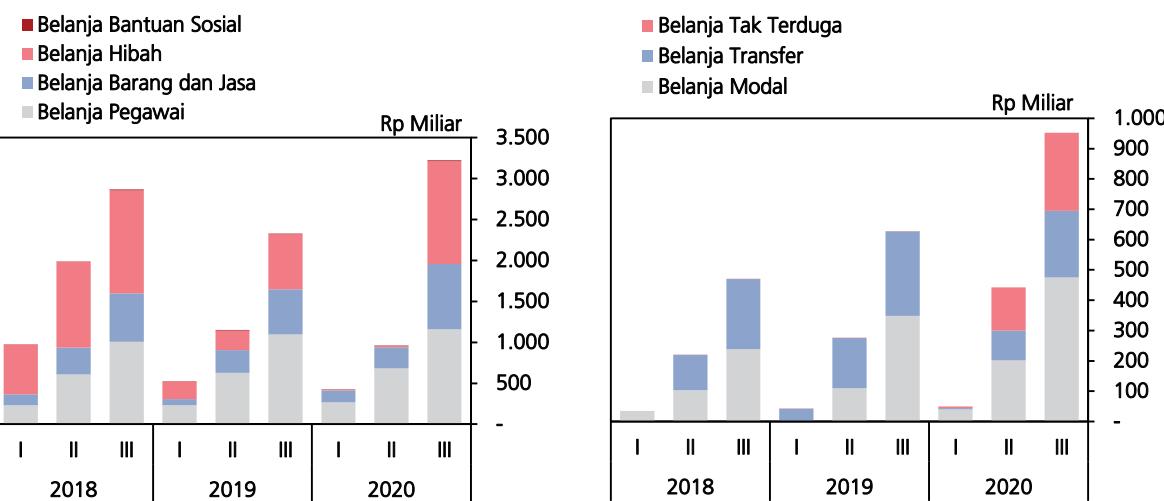
Realisasi Belanja Operasi Pemprov NTT sampai dengan triwulan III 2020 tercatat sebesar Rp3,22 triliun, tumbuh 38,32% (yoY) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Bila dilihat lebih detail, pertumbuhan bersumber dari seluruh komponen Belanja Operasi, terutama belanja barang dan jasa serta belanja hibah. Realisasi belanja barang dan jasa mencapai Rp795 miliar, tumbuh 44,79% (yoY) terutama karena banyak pengadaan barang dan jasa yang berlangsung lagi setelah tertunda akibat COVID-19. Sementara itu, realisasi belanja hibah mencapai Rp1,26 triliun, tumbuh 86,99% (yoY).

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemprov NTT Triwulan III Tahun 2019-2020

Kategori	2019					2020				
	Pagu APBD-P (Rp M)	Growth Pagu (% yoy)	Realisasi APBD Tw III (Rp M)	Persentase Realisasi Tw III (%)	Growth Realisasi Tw III (% yoy)	Pagu APBD-P (Rp M)	Growth Pagu (% yoy)	Realisasi APBD Tw III (Rp M)	Persentase Realisasi Tw III (%)	Growth Realisasi Tw III (% yoy)
BELANJA DAERAH DAN TRANSFER	5.770	16,12	2.958	51,26	-11,37	6.415	11,18	4.175	65,09	41,17
Belanja Daerah	5.222	14,01	2.679	51,29	-13,75	5.891	12,81	3.956	67,15	47,67
Belanja Operasi	4.290	6,69	2.330	54,31	-18,73	4.371	1,89	3.223	73,73	38,32
- Belanja Pegawai	1.740	19,01	1.098	63,10	8,91	1.824	4,85	1.160	63,60	5,67
- Belanja Barang dan Jasa	1.104	14,69	549	49,74	-6,95	1.094	-0,90	795	72,68	44,79
- Belanja Hibah	1.417	-10,13	672	47,42	-46,67	1.432	1,08	1.256	87,72	86,99
- Belanja Bantuan Sosial	30	46,65	11	37,80	22,53	21	-28,99	11	53,95	1,36
Belanja Modal	920	65,84	348	37,85	45,85	1.245	35,43	475	38,15	36,52
Belanja Tak Terduga	13	154,00	1	5,57	465,33	275	2.062,65	258	93,85	36.321,01
Belanja Transfer	547	40,95	279	50,94	20,71	523	-4,37	219	41,90	-21,35

Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Realisasi Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga Pemprov NTT meningkat, namun Belanja Transfer terkontraksi. Realisasi Belanja Modal mencapai Rp475 miliar, tumbuh 36,53% (yoy) terutama didorong oleh proyek-proyek infrastruktur yang kembali berlangsung setelah sempat tertunda akibat COVID-19. Realisasi Belanja Tak Terduga mencapai Rp258 miliar, tumbuh drastis sebesar 36.321,01% (tumbuh 364 kali lipat) akibat belanja berbagai fasilitas kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19. Di sisi lain, realisasi Belanja Transfer kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten mencapai Rp219 miliar, terkontraksi 21,35% (yoy) akibat berkurangnya pendapatan daerah Pemprov NTT.



Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik 2.3. Realisasi Belanja Operasi Pemprov NTT s.d. Triwulan III Pada Tahun 2018-2020

Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik 2.4. Realisasi Belanja Modal, Transfer, dan Tak Terduga Pemprov NTT s.d. Triwulan III Pada Tahun 2018-2020

2.3 APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

2.3.1 Pendapatan APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

Anggaran (target) pendapatan APBD Pemerintah Kota dan Kabupaten NTT tahun 2020 terkontraksi 3,46% (yoY), bersumber dari penyesuaian target penerimaan PAD dan Dana Perimbangan. Anggaran PAD terkontraksi 1,93% (yoY), bersumber dari penyesuaian target penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara itu, anggaran Dana Perimbangan juga terkontraksi 6,34% (yoY) seiring dengan *refocusing* alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah kota dan kabupaten. Persentase realisasi pendapatan APBD Pemerintah Kota dan Kabupaten sampai dengan triwulan III 2020 mencapai 63,27% dari pagu anggaran pendapatan, lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Meskipun demikian, persentase realisasi yang lebih tinggi lebih dipengaruhi oleh penyesuaian jumlah anggaran. Bila dilihat secara nominal, realisasi pendapatan Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT justru mengalami kontraksi 1,30% (yoY), terutama dipengaruhi oleh kinerja PAD yang menurun.

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

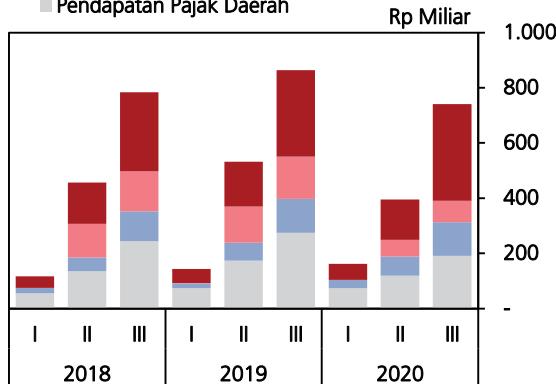
Kategori	2019					2020				
	Pagu APBD-P (Rp M)	Growth Pagu (% yoY)	Realisasi APBD Tw III (Rp M)	Persentase Realisasi Tw III (%)	Growth Realisasi Tw III (% yoY)	Pagu APBD-P (Rp M)	Growth Pagu (% yoY)	Realisasi APBD Tw III (Rp M)	Persentase Realisasi Tw III (%)	Growth Realisasi Tw III (% yoY)
PENDAPATAN DAERAH	23.218	7,36	14.369	61,89	-1,80	22.414	-3,46	14.182	63,27	-1,30
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.739	5,56	864	49,66	10,23	1.706	-1,93	741	43,42	-14,25
- Pendapatan Pajak Daerah	511	17,23	275	53,69	12,45	480	-6,17	192	39,92	-30,24
- Pendapatan Retribusi Daerah	271	7,16	123	45,39	13,31	250	-7,79	122	48,78	-0,91
- Hsl. Pengelolaan Kekayaan yg Dpshkn.	154	4,60	153	99,03	5,54	156	1,24	78	49,69	-49,20
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yg Sah	803	-1,05	313	39,03	9,54	820	2,14	350	42,65	11,60
Dana Perimbangan	17.190	5,57	11.254	65,46	-5,95	16.100	-6,34	11.903	73,93	5,77
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	241	-9,69	148	61,40	-5,64	210	-12,75	173	82,51	17,25
- Dana Alokasi Umum	12.168	4,40	9.366	76,97	-0,29	11.680	-4,01	8.727	74,72	-6,83
- Dana Alokasi Khusus	4.781	9,62	1.740	36,39	-27,99	4.211	-11,94	3.003	71,33	72,62
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	4.288	16,03	2.251	52,50	19,58	4.608	7,46	1.539	33,39	-31,66

Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Realisasi PAD Pemerintah Kota dan Kabupaten NTT sampai dengan triwulan III 2020 tercatat sebesar Rp741 miliar atau terkontraksi 14,25% (yoY). Pandemi COVID-19 berdampak pada kontraksi pendapatan pajak sebesar 30,24% (yoY), kontraksi

pendapatan retribusi sebesar 0,91% (yoY), dan hasil pengelolaan kekayaan yang terkontraksi 49,20% (yoY). Sementara itu, lain-lain pendapatan yang sah tumbuh 11,60% (yoY), terutama bersumber dari dana hibah dari pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka penanganan COVID-19. Realisasi Dana Perimbangan Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT sampai dengan triwulan III 2020 tercatat sebesar Rp11,90 triliun, tumbuh 5,77% (yoY) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan realisasi Dana Perimbangan bersumber dari penerimaan DBH yang tumbuh 17,25% (yoY) dan penerimaan DAK yang tumbuh 72,62% (yoY). Di sisi lain, penerimaan DAK terkontraksi 6,83% (yoY).

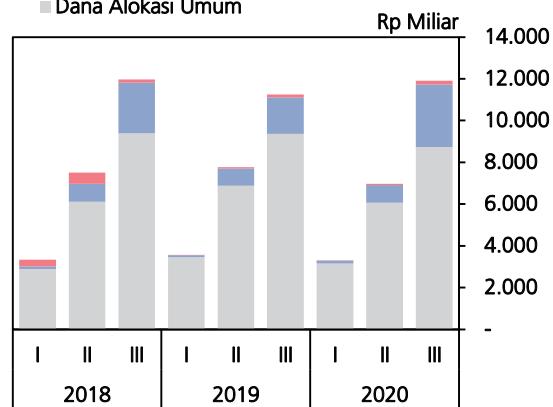
■ Lain-Lain Pendapatan Daerah yg Sah
 ■ Hsl. Pengelolaan Kekayaan yg Dpshkn.
 ■ Pendapatan Retribusi Daerah
 ■ Pendapatan Pajak Daerah



Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik 2.5. Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Pemkot dan Pemkab NTT s.d. Triwulan III Pada Tahun 2018-2020

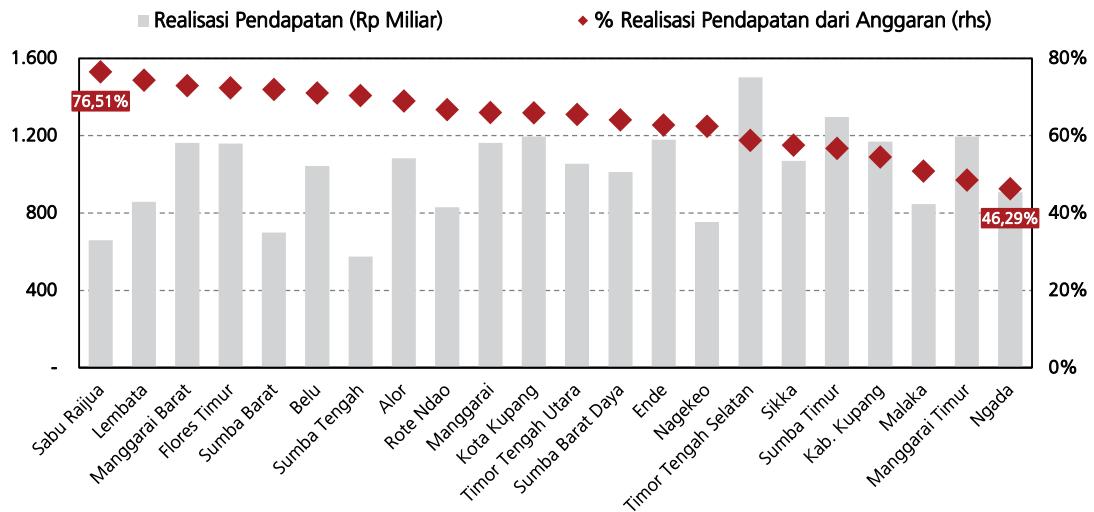
■ Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 ■ Dana Alokasi Khusus
 ■ Dana Alokasi Umum



Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik 2.6. Realisasi Dana Perimbangan Pemkot dan Pemkab NTT s.d. Triwulan III Pada Tahun 2018-2020

Secara spasial, persentase realisasi pendapatan Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT sampai dengan triwulan III 2020 yang tertinggi adalah Kabupaten Sabu Raijua. Realisasi pendapatan Kabupaten Sabu Raijua tercatat sebesar Rp658 miliar, atau mencapai 76,51% dari target pendapatan. Di sisi lain, Kabupaten Ngada mencatat persentase realisasi terendah, sebesar 46,29% dari target pendapatan. Sementara itu, nominal realisasi pendapatan tertinggi di triwulan III 2020 dicapai oleh Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan realisasi pendapatan mencapai Rp1,50 triliun.



Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik 2.7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT Secara Spasial Pada Triwulan III Tahun 2020

2.3.2 Belanja APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

Anggaran belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten NTT tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun 2019. Target belanja terkontraksi 4,18% (yoY), terutama bersumber dari anggaran Belanja Operasi yang terkontraksi 1,40% (yoY) dan anggaran Belanja Modal yang terkontraksi 26,38% (yoY). Di sisi lain, anggaran Belanja Hibah tumbuh 279,66% (yoY) dan anggaran Belanja Tak Terduga tumbuh 992,81% (yoY) yang ditujukan untuk penanganan COVID-19, program pemulihan ekonomi, serta persiapan Pilkada serentak di akhir tahun.

Sampai dengan triwulan III 2020, persentase realisasi belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten NTT mencapai 46,19% dari total anggaran, lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Secara nominal, realisasi belanja terkontraksi 5,50% (yoY). Hal ini terutama didorong oleh realisasi Belanja Barang dan Jasa serta realisasi Belanja Modal yang terkontraksi. Di sisi lain, realisasi Belanja Hibah dan Belanja Tak Terduga mengalami pertumbuhan.

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota dan Kabupaten NTT sampai dengan triwulan III 2020 tercatat sebesar Rp8,34 triliun, tumbuh 3,58% (yoY) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Bila dilihat lebih detil, pertumbuhan terutama bersumber dari Belanja Pegawai yang tumbuh 3,20% (yoY). Selanjutnya, Belanja Hibah juga tumbuh 517,06% (yoY), sedangkan Belanja Bantuan Sosial tumbuh 4,01% (yoY). Kedua komponen belanja tersebut ditujukan untuk penanganan COVID-19

dan program pemulihan ekonomi. Di sisi lain, Belanja Barang dan Jasa terkontraksi 13,84% (yoY) akibat kendala administratif di tengah *refocusing* APBD.

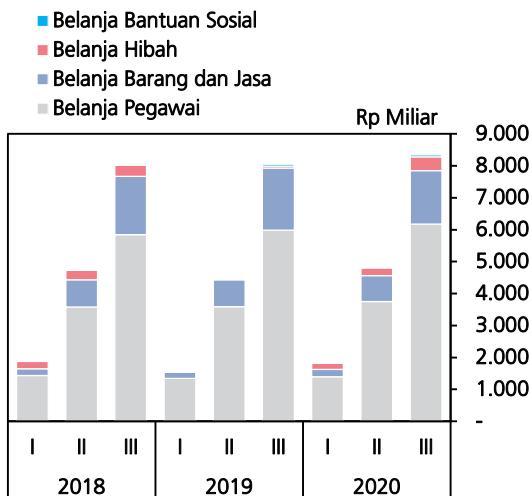
Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

Kategori	2019					2020				
	Pagu APBD-P (Rp M)	Growth Pagu (% yoY)	Realisasi APBD Tw III (Rp M)	Persentase Realisasi Tw III (%)	Growth Realisasi Tw III (% yoY)	Pagu APBD-P (Rp M)	Growth Pagu (% yoY)	Realisasi APBD Tw III (Rp M)	Persentase Realisasi Tw III (%)	Growth Realisasi Tw III (% yoY)
BELANJA DAERAH DAN TRANSFER	24.468	6,08	11.461	46,84	-2,81	23.447	-4,18	10.831	46,19	-5,50
Belanja Daerah	20.203	4,72	9.293	46,00	-3,37	19.121	-5,36	9.533	49,85	2,58
Belanja Operasi	14.938	4,27	8.051	53,90	-0,05	14.730	-1,40	8.339	56,62	3,58
- Belanja Pegawai	9.254	4,13	5.987	64,69	2,37	9.334	0,87	6.178	66,19	3,20
- Belanja Barang dan Jasa	5.340	9,40	1.938	36,28	6,38	4.513	-15,49	1.670	36,99	-13,84
- Belanja Hibah	203	-55,16	70	34,54	-79,93	771	279,66	433	56,13	517,06
- Belanja Bantuan Sosial	141	33,73	57	40,09	56,20	111	-21,06	59	52,81	4,01
Belanja Modal	5.214	6,12	1.226	23,50	-20,64	3.839	-26,38	1.063	27,70	-13,23
Belanja Tak Terduga	51	-3,64	16	32,40	-8,46	552	992,81	130	23,52	693,52
Belanja Transfer	4.265	13,07	2.168	50,84	-0,30	4.325	1,41	1.298	30,01	-40,14

Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

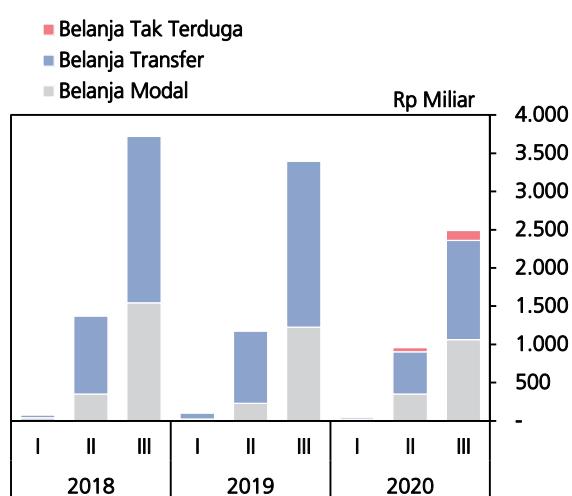
Realisasi Belanja Modal dan Belanja Transfer menurun, namun Belanja Tak Terduga meningkat. Realisasi Belanja Modal mencapai Rp1,06 triliun, terkontraksi 13,23% (yoY). Hal ini disebabkan oleh banyaknya proyek-proyek infrastruktur milik Pemerintah Kota dan Kabupaten yang masih tertunda akibat COVID-19. Belanja transfer mencapai Rp1,30 triliun, terkontraksi 40,14% (yoY) akibat kinerja PAD yang menurun. Di sisi lain, realisasi Belanja Tak Terduga mencapai Rp130 miliar, tumbuh 693,52% (yoY) untuk penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi, dan persiapan Pilkada Serentak.

Secara spasial, persentase serapan belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT yang tertinggi sampai dengan triwulan III tahun 2020 adalah Kabupaten Rote Ndao. Realisasi belanja Kabupaten Rote Ndao tercatat sebesar Rp846 miliar, atau mencapai serapan 59,80% dari total pagu anggaran belanja. Di sisi lain, Kabupaten Manggarai Timur mencatat persentasi serapan terendah, sebesar 34,04% dari total anggaran belanja. Sementara itu, nominal realisasi belanja tertinggi diraih oleh Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan realisasi belanja mencapai Rp1,59 triliun.



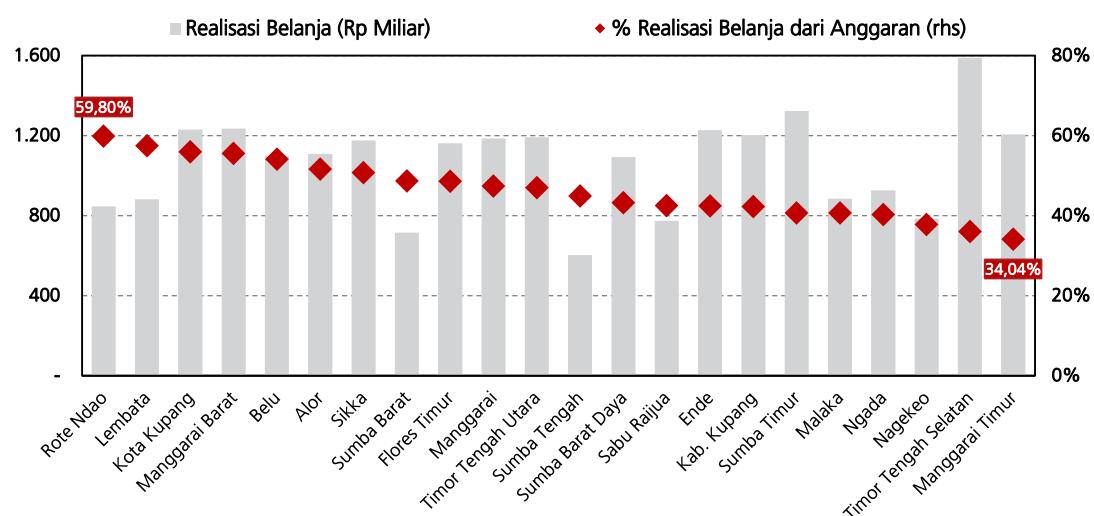
Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik 2.8. Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT s.d. Triwulan III Pada Tahun 2018-2020



Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik 2.9 Realisasi Belanja Modal, Transfer, dan Tak Terduga Pemeritah Kota dan Kabupaten di NTT s.d. Triwulan III Pada Tahun 2018-2020



Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah

Grafik 2.10. Realisasi Belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT Secara Spasial Pada Triwulan III Tahun 2020

2.4 APBN di Provinsi NTT

Pagu anggaran belanja APBN di NTT pada tahun 2020 mencapai Rp17,99 triliun, tumbuh 3,09% (yoY) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terutama dipengaruhi oleh anggaran Belanja Transfer yang tumbuh 15,15% (yoY). Anggaran Belanja Pegawai juga tumbuh 4,17% (yoY). Di sisi lain, Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal terkontraksi masing-masing sebesar 13,45% (yoY) dan 0,24% (yoY).

Realisasi belanja APBN di NTT pada tahun 2020 mencapai Rp12,32 triliun, atau mencapai serapan 68,45% dari total anggaran. Persentase serapan tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini terutama didorong oleh realisasi Belanja Transfer yang mencapai Rp6,19 triliun, tumbuh 108,92% (yoy) dalam rangka penanganan COVID-19. Realisasi Belanja Modal juga tumbuh 18,02% (yoy) seiring dengan berlanjutnya beberapa proyek infrastruktur milik pemerintah pusat di NTT setelah sempat tertunda di triwulan sebelumnya.

Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di NTT

Kategori	2019					2020				
	Pagu APBN-P (Rp M)	Growth Pagu (%) yoy	Realisasi APBN Tw III (Rp M)	Persentase Realisasi Tw III (%)	Growth Realisasi Tw III (% yoy)	Pagu APBN-P (Rp M)	Growth Pagu (%) yoy	Realisasi APBN Tw III (Rp M)	Persentase Realisasi Tw III (%)	Growth Realisasi Tw III (% yoy)
BELANJA	17.456	0,86	9.415	53,94	-0,23	17.995	3,09	12.317	68,45	30,82
Belanja Pegawai	3.021	0,97	2.264	74,92	11,36	3.147	4,17	2.284	72,58	0,91
Belanja Barang	4.180	-15,23	2.517	60,22	12,38	3.618	-13,45	1.875	51,84	-25,50
Belanja Modal	3.738	0,41	1.664	44,53	-11,99	3.729	-0,24	1.964	52,68	18,02
Belanja Bantuan Sosial	14	-34,91	9	62,43	-5,42	13	-7,65	7	52,35	-22,56
Belanja Transfer	6.503	15,32	2.961	45,54	-9,26	7.488	15,15	6.187	82,62	108,92

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi NTT, diolah

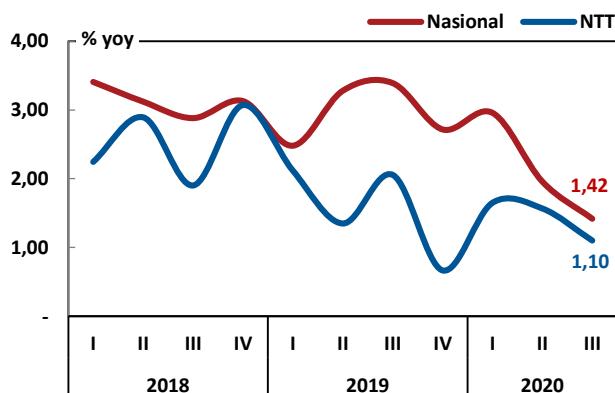
Bab III.

PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan III 2020 relatif terkendali, yaitu sebesar 1,10% (yoY), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional dan inflasi NTT di triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 1,42% (yoY) dan 1,57% (yoY). Penurunan tekanan inflasi Provinsi NTT pada triwulan III terutama bersumber dari penurunan tarif angkutan udara, harga cabai rawit dan cabai merah, serta ikan ekor kuning dan ikan teri. Di sisi lain, kenaikan harga ikan kembung, ikan tongkol, emas perhiasan, rokok kretek filter, dan rokok putih menjadi faktor pendorong inflasi. Pada triwulan IV 2020, inflasi Provinsi NTT secara *year-on-year* diprakirakan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, seiring dengan konsumsi masyarakat yang masih terbatas serta curah hujan yang diprakirakan meningkat akibat La Nina.

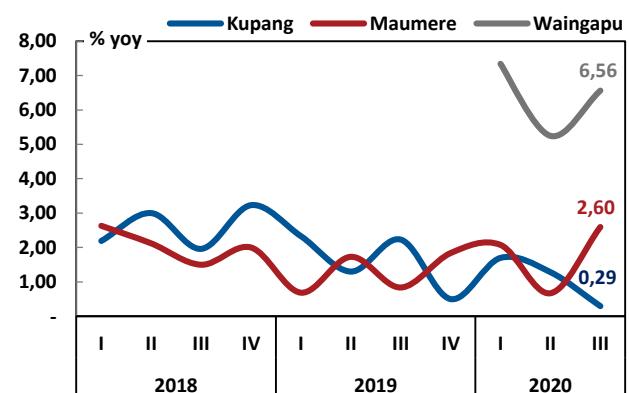
3.1. Perkembangan Inflasi Secara Umum

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan III 2020 terkendali dan tercatat sebesar 1,10% (yoY), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi secara nasional sebesar 1,42% (yoY). Realisasi inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi Provinsi NTT pada triwulan III dalam tiga tahun sebelumnya sebesar 1,98% (*average-oy*). Secara spasial pada triwulan III 2020, Kota Kupang mencatat inflasi sebesar 0,29% (yoY), Kota Maumere inflasi sebesar 2,60% (yoY), dan Kota Waingapu inflasi sebesar 6,56% (yoY).



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.1. Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi NTT Secara Tahunan



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.2. Perkembangan Inflasi Kota Kupang, Maumere, dan Waingapu Secara Tahunan

Tabel 3.1. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Tahunan di Provinsi NTT, Triwulan III 2020

Triwulan III 2020			Triwulan III 2020		
Komoditas Inflasi	% yoy	Andil (% yoy)	Komoditas Deflasi	% yoy	Andil (% yoy)
Ikan Kembung	39,76	0,38	Angkutan Udara	-17,27	-0,62
Ikan Tongkol	35,53	0,23	Cabai Rawit	-49,87	-0,16
Emas Perhiasan	32,52	0,20	Ikan Ekor Kuning	-24,75	-0,09
Rokok Kretek Filter	9,49	0,19	Biaya Pulsa Ponsel	-3,37	-0,08
Kangkung	21,72	0,13	Ikan Teri	-39,33	-0,08
Rokok Putih	12,78	0,11	Cabai Merah	-45,57	-0,07
Sirih	71,34	0,07	Pisang	-20,47	-0,05
Pepaya Muda	74,67	0,07	Tempe	-8,73	-0,05
Gula Pasir	10,31	0,07	Semen	-4,02	-0,04
Sawi Putih	31,49	0,06	Bensin	-0,81	-0,03

Sumber: BPS (diolah)

Secara triwulanan, realisasi inflasi Provinsi NTT pada triwulan III 2020 yang tercatat sebesar 1,10% (yoy), melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,57% (yoy). Hal tersebut terutama bersumber dari deflasi kelompok transportasi yang lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, tekanan kenaikan harga kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kenaikan harga kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi faktor pendorong inflasi. Beberapa komoditas ikan segar seperti ikan kembung dan ikan tongkol masing-masing mencatat inflasi yang tinggi, namun melandai dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyesuaian tarif bea cukai rokok yang diterapkan pada bulan Januari juga berdampak terhadap inflasi sejak awal tahun 2020. Gula pasir dan emas perhiasan juga masih menjadi faktor inflasi, disebabkan oleh pasokan gula impor yang terhambat serta permintaan emas di pasar global yang meningkat.

Sementara itu, tarif angkutan udara, beberapa komoditas makanan, konstruksi dan transportasi mencatat penurunan harga, sehingga menahan laju inflasi secara keseluruhan di triwulan III 2020. Tarif angkutan udara terus mencatat penurunan harga di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlanjut, sejalan dengan jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang di bandara-bandara NTT yang masih terbatas. Cabai rawit dan cabai merah memasuki masa panen di triwulan III, sehingga mencatat penurunan harga. Beberapa jenis ikan seperti ikan ekor kuning dan ikan teri mencatat penurunan harga, akibat produksi dan pasokan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Semen mencatat penurunan harga yang disebabkan banyak

pembangunan infrastruktur yang tertunda. Sementara itu, bensin juga mencatat penurunan harga akibat permintaan yang berkurang. Meskipun tidak ada penurunan harga bensin dari pemerintah, masih banyak bensin di NTT yang dijual secara informal oleh masyarakat dalam bentuk botol/jeriken.

3.2. Inflasi Berdasarkan Kelompok Komoditas

Berdasarkan kelompok komoditas, inflasi pada triwulan III 2020 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok makanan, minuman dan tembakau mencatat inflasi sebesar 3,74% (yoy). Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi sebesar 6,38% (yoy). Di sisi lain, kelompok transportasi mencatat deflasi sebesar 4,40% (yoy) dan merupakan faktor utama penahan laju inflasi pada triwulan III 2020 secara keseluruhan.

Tabel 3.2. Inflasi di Provinsi NTT Berdasarkan Kelompok Komoditas

Kelompok Komoditas	(% mtm)			(% yoy)	
	Jul '20	Agu '20	Sep '20	Tw II '20	Tw III '20
Inflasi Umum (Total)	-0,32	-0,71	-0,15	1,57	1,10
Makanan, Minuman & Tembakau	-0,13	-2,19	-0,27	4,06	3,74
Pakaian & Alas Kaki	-0,33	-0,08	-0,02	1,64	0,87
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT	-0,03	-0,03	0,03	-0,14	-0,12
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	0,01	-0,01	0,13	0,72	0,67
Kesehatan	0,29	1,23	0,30	3,72	5,47
Transportasi	-1,95	-0,73	-0,48	-3,10	-4,40
Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan	0,06	-0,05	-0,08	-0,94	-1,67
Rekreasi, Olahraga & Budaya	-0,02	0,28	0,06	0,02	-0,26
Pendidikan	-0,14	0,52	0,00	2,75	0,31
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	-0,01	-0,03	0,01	0,95	0,86
Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	0,08	1,21	-0,21	6,73	6,38

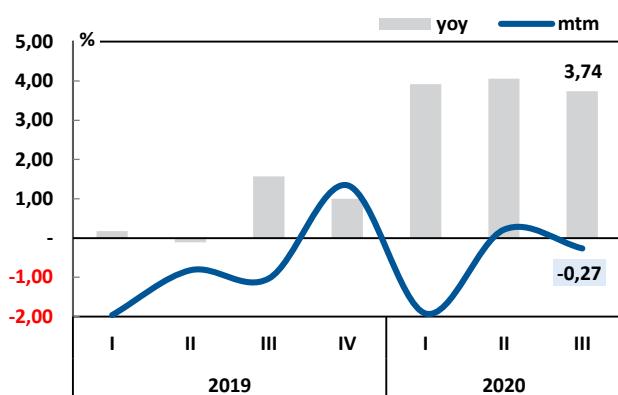
Sumber: BPS (diolah)

3.2.1 Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

Kelompok makanan, minuman dan tembakau pada triwulan III 2020 mencatat inflasi sebesar 3,74% (yoy), melandai dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,06% (yoy). Tekanan inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau yang menurun menjadi salah satu faktor penurunan inflasi NTT secara keseluruhan. Inflasi kelompok yang melandai bersumber dari penurunan harga cabai rawit dan cabai merah

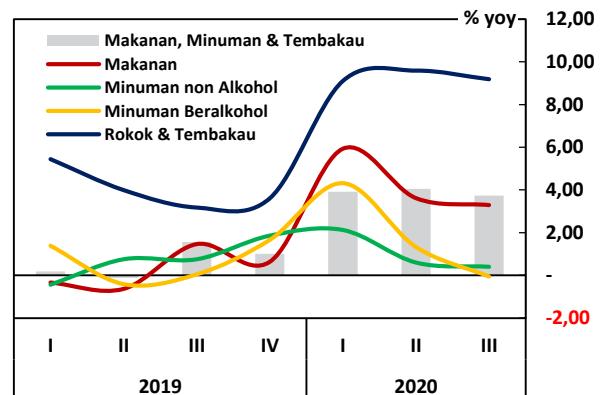
yang memasuki masa panen di triwulan III 2020. Beberapa jenis ikan segar seperti ikan ekor kuning dan ikan teri juga mengalami penurunan harga karena populasi ikan yang meningkat, sehingga turut menjadi faktor penahan inflasi kelompok.

Di sisi lain, kenaikan harga beberapa komoditas makanan dan tembakau menjadi faktor pendorong inflasi. Ikan kembung dan ikan tongkol merupakan jenis ikan segar yang paling banyak dikonsumsi masyarakat NTT. Harga kedua jenis ikan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu akibat faktor cuaca di laut, sehingga menjadi faktor pendorong inflasi kelompok. Harga kangkung juga masih lebih tinggi dibandingkan tahun lalu karena produktivitas petani yang lebih rendah. Gula pasir juga masih menjadi faktor pendorong inflasi akibat pasokan gula impor yang terbatas, meskipun kenaikan harganya melandai dibandingkan triwulan sebelumnya.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.3. Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau secara Tahunan dan Bulanan

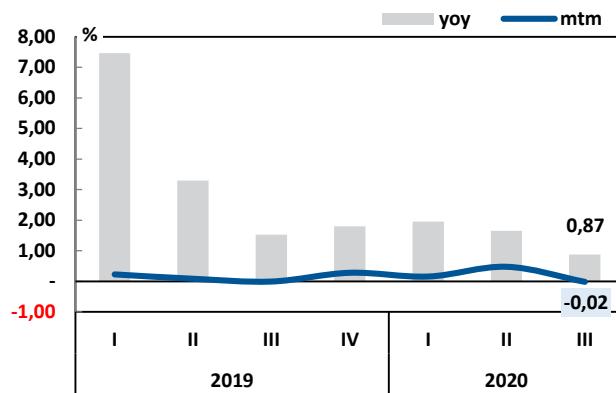


Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.4. Inflasi Kelompok Bahan Makanan per Sub Kelompok Komoditas

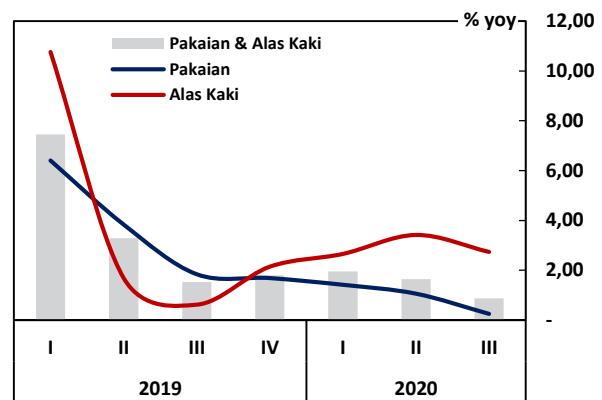
3.2.2 Kelompok Pakaian dan Alas Kaki

Kelompok pakaian dan alas kaki mencatat inflasi sebesar 0,87% (oy), melandai dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,64% (oy). Tekanan inflasi kelompok pakaian dan alas kaki yang menurun menjadi salah sumber penurunan tekanan inflasi NTT secara keseluruhan. Inflasi kelompok yang melandai bersumber dari penurunan harga komoditas sub kelompok pakaian, terutama blus wanita, gaun anak, dan gaun/terusan wanita. Hal ini disebabkan oleh tertahannya konsumsi masyarakat untuk kebutuhan sandang.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.5. Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki Secara Tahunan dan Bulanan

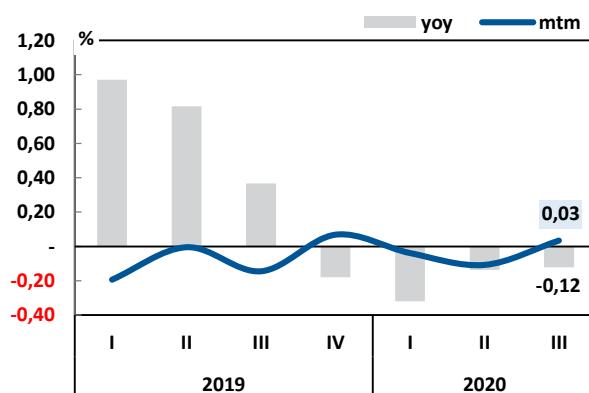


Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.6. Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki per Sub Kelompok Komoditas Secara Tahunan

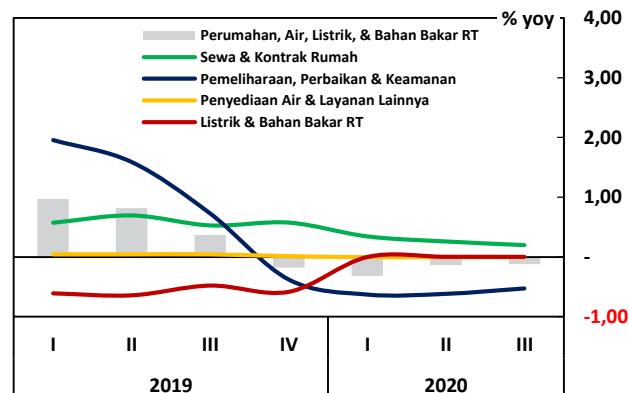
3.2.3 Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga tercatat mengalami deflasi sebesar 0,12% (yoY), tidak sedalam triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,14% (yoY). Tekanan kenaikan harga cat tembok dan kayu balokan menjadi faktor pendorong inflasi kelompok. Di sisi lain, harga semen, seng dan besi beton masih tercatat mengalami penurunan, sehingga masih menjadi faktor penahan inflasi kelompok. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya proyek konstruksi yang tertunda karena pandemi COVID-19,



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.7. Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga Secara Tahunan dan Bulanan

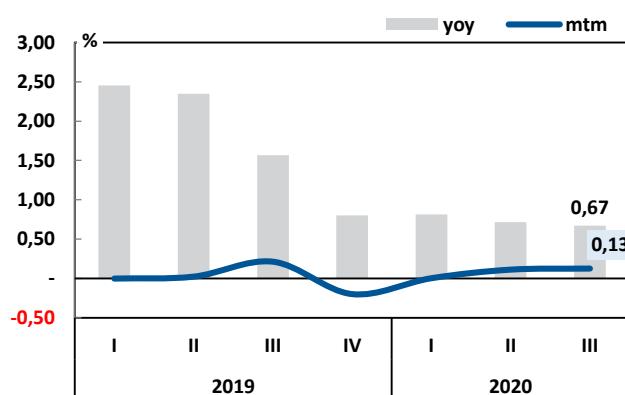


Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.8. Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga per Sub Kelompok Komoditas Secara Tahunan

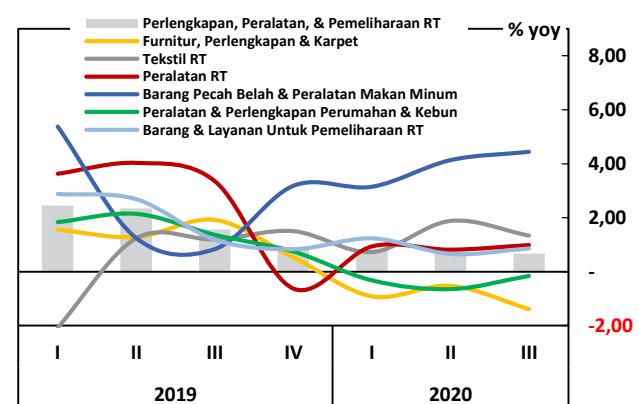
3.2.4 Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga

Kelompok perlengkapan peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga tercatat mengalami inflasi sebesar 0,67% (yoY), melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 0,72% (yoY). Tekanan inflasi kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga yang menurun menjadi salah satu sumber penurunan tekanan inflasi NTT secara keseluruhan. Penurunan harga sabun detergen, lemari pakaian dan handuk menjadi faktor penahan laju inflasi. Di sisi lain, kenaikan upah asisten rumah tangga, piring, dan kulkas/lemari es menjadi faktor pendorong inflasi.



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.9. Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga secara Tahunan dan Bulanan

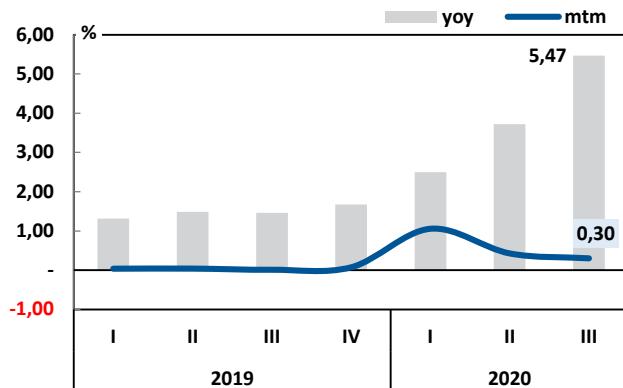


Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.10. Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga per Sub Kelompok Komoditas Secara Tahunan

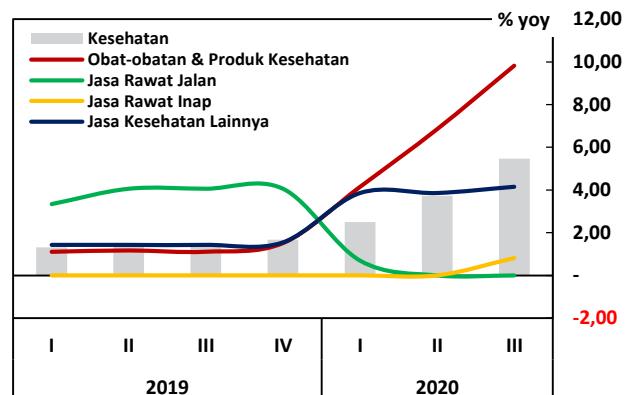
3.2.5 Kelompok Kesehatan

Kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 5,47% (yoY), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,72% (yoY). Inflasi kelompok ini terutama didorong oleh kenaikan harga obat-obatan dan produk kesehatan, antara lain obat gosok, obat dengan resep, dan obat maag. Harga vitamin dan tarif rumah sakit juga turut meningkat, sejalan dengan pandemi COVID-19. Sementara itu, tidak ada komoditas lain dalam kelompok kesehatan yang mengalami deflasi.



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.11. Inflasi Kelompok Kesehatan secara Tahunan dan Bulanan

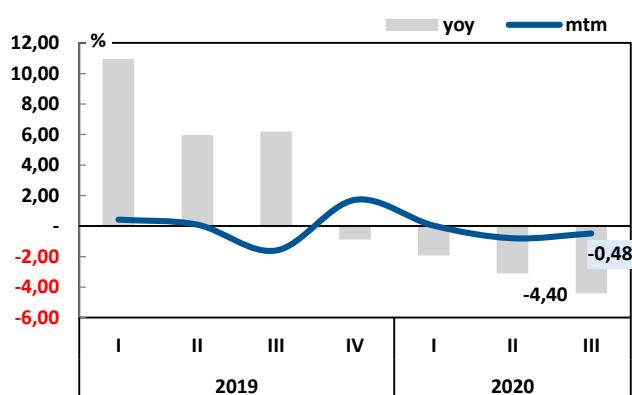


Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.12. Inflasi Kelompok Kesehatan per Sub Kelompok Komoditas

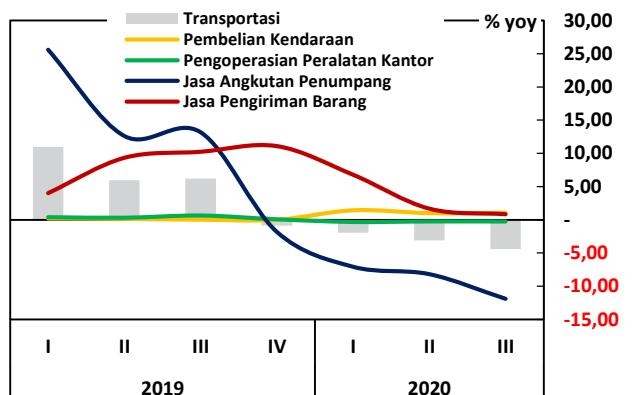
3.2.6 Kelompok Transportasi

Kelompok transportasi tercatat mengalami deflasi sebesar 4,40% (yo), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatat deflasi sebesar 3,10% (yo). Deflasi di kelompok ini terutama bersumber dari penurunan tarif angkutan udara yang terus berlanjut di tengah pandemi COVID-19. Bensin dan angkutan laut juga turut mengalami penurunan harga di tengah mobilitas masyarakat yang terbatas. Meskipun tidak ada penurunan harga bensin oleh pemerintah, harga bensin yang banyak dijual secara informal oleh masyarakat dalam bentuk botol/jeriken mengalami penurunan. Di sisi lain, kenaikan harga sepeda motor, ban mobil, dan mobil menjadi faktor pendorong inflasi kelompok.



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.13. Inflasi Kelompok Transportasi secara Tahunan dan Bulanan

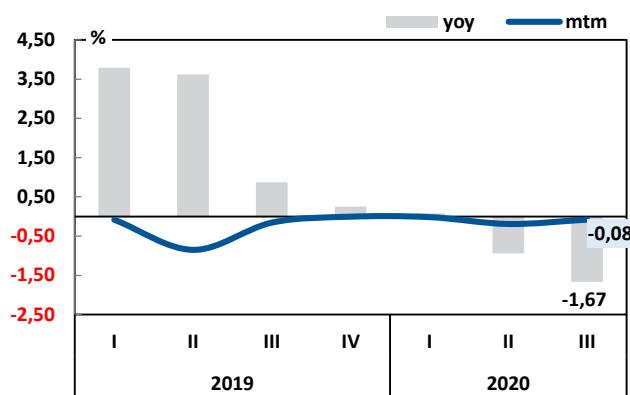


Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.14. Inflasi Kelompok Transportasi, per Sub Kelompok Komoditas

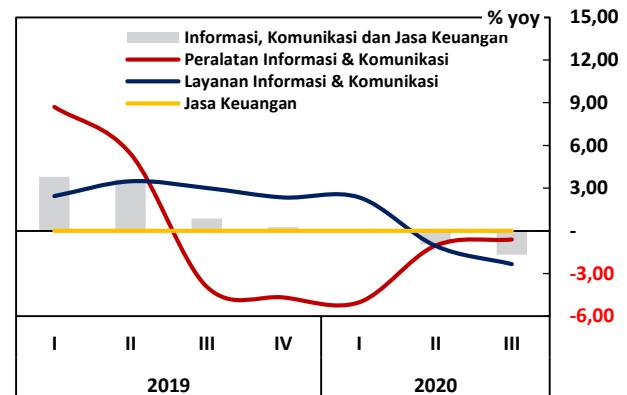
3.2.7 Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mencatatkan deflasi sebesar 1,67% (yoY), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat deflasi sebesar 0,94% (yoY). Deflasi kelompok ini terutama didorong oleh penurunan biaya pulsa ponsel, telepon seluler, dan *flash disk*. Di sisi lain, kenaikan harga televisi berwarna dan biaya jaringan saluran TV menjadi faktor pendorong inflasi kelompok.



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.15. Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan secara Tahunan dan Bulanan

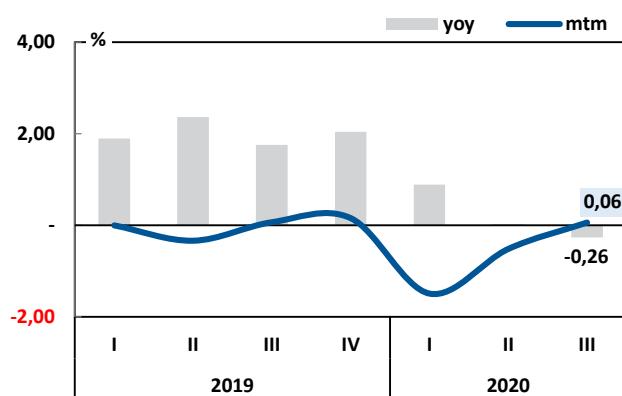


Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.16. Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan, per Sub Kelompok Komoditas

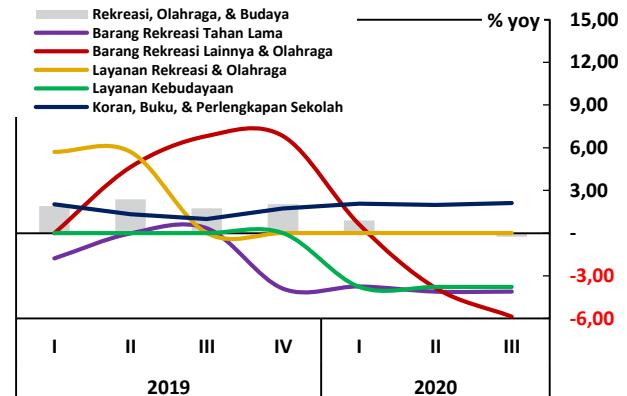
3.2.8 Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya mencatat deflasi sebesar 0,26% (yoY), setelah di triwulan sebelumnya mencatat inflasi sebesar 0,02% (yoY). Deflasi kelompok ini terutama didorong oleh penurunan harga sepeda anak, tas sekolah, dan bioskop. Hal ini disebabkan oleh tertahannya konsumsi peralatan sekolah serta rekreasi di tengah pandemi COVID-19.



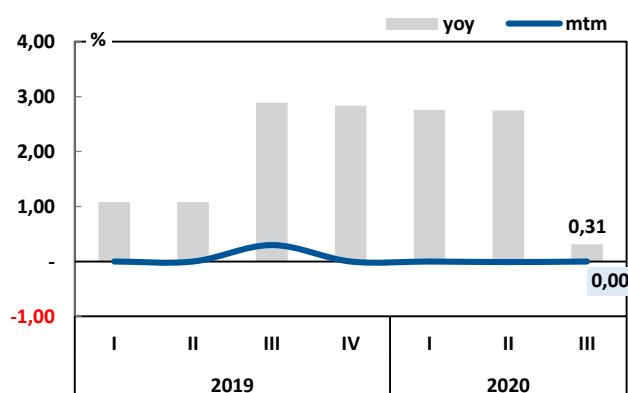
Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.17. Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya secara Tahunan dan Bulanan



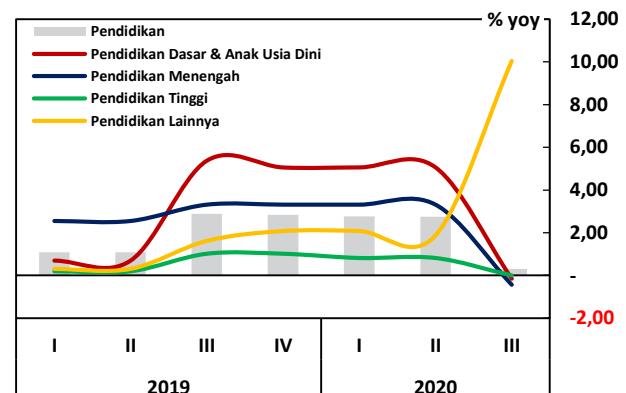
3.2.9 Kelompok Pendidikan

Kelompok pendidikan mencatat inflasi sebesar 0,31% (yo), melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatat inflasi sebesar 2,75% (yo). Tekanan inflasi kelompok pendidikan yang menurun menjadi salah satu sumber penurunan tekanan inflasi NTT secara keseluruhan. Penurunan tekanan inflasi kelompok ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya Sekolah Dasar (SD) yang terjadi di bulan Juli tahun 2019, sehingga tidak lagi tercermin sebagai pendorong inflasi tahunan di triwulan III tahun 2020. Selanjutnya, biaya SMP/SLTP dan Taman Kanak-Kanak mengalami penurunan, sehingga juga menjadi faktor penahan inflasi kelompok. Di sisi lain, kenaikan biaya bimbingan belajar menjadi faktor utama pendorong inflasi kelompok, sejalan dengan diberlakukannya kebijakan *learning from home* di tengah pandemi COVID-19.



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.19. Inflasi Kelompok Pendidikan secara Tahunan dan Bulanan

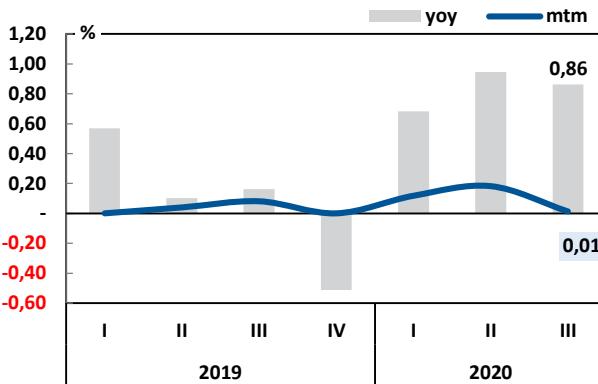


Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.20. Inflasi Kelompok Pendidikan per Sub Kelompok Komoditas

3.2.10 Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

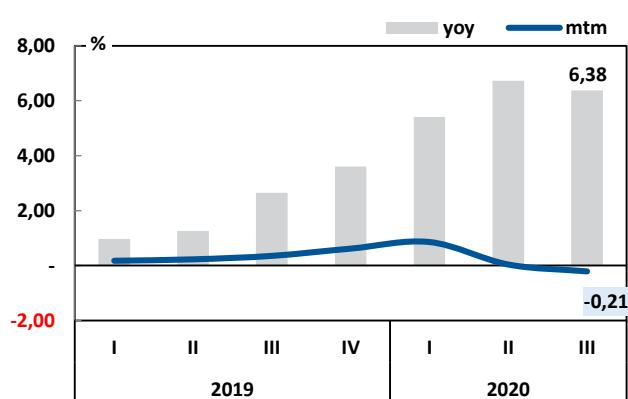
Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mencatat inflasi sebesar 0,86% (yo), melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatat inflasi sebesar 0,95% (yo). Tekanan inflasi kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran yang menurun menjadi salah satu sumber penurunan tekanan inflasi NTT secara keseluruhan. Tekanan inflasi kelompok yang menurun terutama bersumber dari inflasi mi yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, penurunan harga ayam goreng dan soto juga menjadi faktor penahan inflasi. Sementara itu, harga ikan bakar menjadi pendorong inflasi kelompok, sejalan dengan kenaikan harga ikan kembung dan ikan tongkol.


Sumber: BPS (diolah)

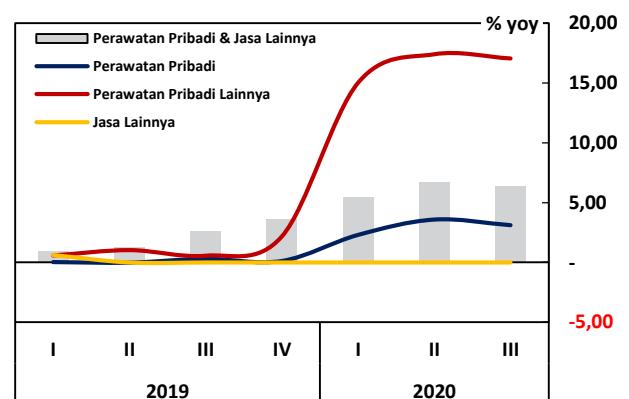
Grafik 3.21. Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran secara Tahunan dan Bulanan

3.2.11 Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya tercatat mengalami inflasi sebesar 6,38% (oy), melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatat inflasi sebesar 6,74% (oy). Tekanan inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang menurun menjadi salah satu sumber penurunan tekanan inflasi NTT secara keseluruhan. Penurunan tekanan inflasi kelompok terutama bersumber dari inflasi sirih yang melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, harga emas perhiasan masih menjadi faktor pendorong inflasi, seiring dengan harga emas global yang masih tinggi di tengah pandemi COVID-19. Di sisi lain, penurunan harga parfum, popok bayi, dan sabun wajah menjadi faktor penahan laju inflasi kelompok.


Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.22. Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya secara Tahunan dan Bulanan


Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.23. Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya per Sub Kelompok Komoditas

3.3. Inflasi Berdasarkan Kota

3.3.1 Inflasi Kota Kupang

Inflasi Kota Kupang pada triwulan III tercatat sebesar 0,29% (oy), melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatat inflasi sebesar 1,28% (oy). Tekanan inflasi Kota Kupang yang menurun terutama bersumber dari penurunan harga/tarif angkutan udara, cabai rawit, dan cabai merah. Tarif angkutan udara terus mengalami penurunan di tengah pandemi COVID-19. Cabai rawit dan cabai merah juga mengalami penurunan harga, seiring dengan masuknya masa panen di triwulan III 2020.

Di sisi lain, tekanan kenaikan harga ikan kembung, rokok, emas perhiasan, dan kangkung menjadi faktor pendorong inflasi Kota Kupang. Ikan kembung menjadi komoditas pendorong inflasi utama karena konsumsi masyarakat yang tinggi serta produksi yang menurun di tengah cuaca laut yang sulit diprediksi oleh nelayan. Rokok kretek filter dan rokok putih masih menjadi faktor pendorong inflasi semenjak kenaikan tarif cukai rokok di akhir tahun 2019. Selanjutnya, kenaikan harga emas perhiasan juga menjadi faktor pendorong inflasi, seiring dengan kenaikan harga emas global di tengah pandemi COVID-19.

3.3.2 Inflasi Kota Maumere

Inflasi Kota Maumere pada triwulan III tercatat sebesar 2,60% (oy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatat inflasi sebesar 0,67% (oy). Tekanan inflasi yang meningkat terutama bersumber dari kenaikan harga ikan layang dan ikan selar. Kenaikan harga ikan layang dan ikan selar disebabkan oleh permintaan masyarakat yang meningkat serta harga dari distributor yang juga meningkat, di tengah kondisi cuaca di laut yang sulit diprediksi oleh nelayan.

Di sisi lain, penurunan harga angkutan udara, cabai rawit, dan cabai merah menjadi faktor penurunan tekanan inflasi Kota Maumere. Sejalan dengan Kota Kupang, tarif angkutan udara di Kota Maumere terus mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Cabai rawit dan cabai merah juga mengalami penurunan harga di tengah masa panen di triwulan III 2020.

3.3.3 Inflasi Kota Waingapu

Inflasi Kota Waingapu pada triwulan III 2020 tercatat sebesar 6,56% (yoY), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat inflasi sebesar 5,24% (yoY). Tekanan inflasi yang meningkat terutama bersumber dari kenaikan harga ikan tongkol, ikan tembang dan ikan kembung. Kenaikan harga ikan-ikan segar tersebut disebabkan oleh konsumsi masyarakat yang tinggi dan meningkat, serta harga dari distributor yang meningkat di tengah kondisi cuaca di laut yang sulit diprediksi oleh nelayan.

Di sisi lain, penurunan harga angkutan udara, cabai rawit, dan daging ayam ras menjadi faktor penurunan tekanan inflasi Kota Waingapu. Seperti Kota Kupang dan Kota Maumere, tarif angkutan udara di Kota Waingapu juga terus mengalami penurunan di tengah pandemi COVID-19. Cabai rawit juga mengalami penurunan harga di tengah masa panen di triwulan III 2020. Selanjutnya, harga daging ayam ras juga mengalami penurunan karena produksi *day-old-chick* (DOC) yang sebelumnya diproduksi di luar NTT, sudah diproduksi di NTT (termasuk di Sumba Timur).

**Tabel 3.3 Inflasi Kota Kupang, Maumere, dan Waingapu di Triwulan III 2020 Secara Tahunan
Berdasarkan Kelompok Komoditas**

Kelompok Komoditas	Tw III '20 (% yoY)		
	Kupang	Maumere	Waingapu
Inflasi Umum	0,29	2,60	6,56
Makanan, Minuman & Tembakau	1,98	5,58	13,79
Pakaian & Alas Kaki	0,10	5,93	2,71
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT	-0,17	0,16	0,01
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	0,35	0,58	4,46
Kesehatan	5,55	3,73	7,28
Transportasi	-4,47	-4,41	-3,69
Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan	-1,50	-2,59	-2,43
Rekreasi, Olahraga & Budaya	-1,93	2,67	11,30
Pendidikan	0,60	-1,08	0,11
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	0,62	7,08	-3,59
Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	4,98	5,67	17,86

Sumber : BPS (diolah)

3.4. Tracking dan Proyeksi Inflasi Triwulan III 2020

Secara bulanan, pada Oktober 2020 Provinsi NTT mengalami inflasi sebesar 0,26% (mtm), setelah di bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar 0,15% (mtm). Secara tahunan, inflasi pada bulan Oktober 2020 mencapai 1,04% (oy). Inflasi pada bulan Oktober terutama didorong oleh kenaikan harga komoditas *volatile food* seperti ikan kembung, sawi putih dan cabai merah. Di sisi lain, penurunan harga apel, telepon seluler dan telur ayam ras menjadi faktor penahan inflasi.

Secara tahunan, prospek inflasi Provinsi NTT secara *year-on-year* pada triwulan IV 2020 diprakirakan lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2019 yang mencapai 0,67% (oy). Secara *year-to-date*, sampai dengan bulan Oktober 2020 Provinsi NTT masih mengalami deflasi sebesar 0,46% (ytd) sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Daya beli dan konsumsi masyarakat masih lemah, meskipun terdapat tanda-tanda pemulihan seiring dengan adaptasi kebiasaan baru. Beberapa komoditas sayuran seperti kangkung dan bayam yang biasanya menjadi pendorong inflasi di akhir tahun, diprakirakan mengalami deflasi di Desember 2020. Hal ini sejalan dengan kondisi cuaca di akhir tahun 2020 yang diprediksi lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya akibat fenomena *La Nina*. Sementara itu, berdasarkan pola bulanan, inflasi Provinsi NTT secara *month-to-month* diprakirakan meningkat, sejalan dengan libur perayaan Natal dan Tahun Baru.

3.5. Aktivitas Pengendalian Inflasi oleh TPID

KPw BI Provinsi NTT telah mengadakan FGD bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 19 Oktober 2020. Rapat tersebut memaparkan program-program yang sedang dilaksanakan sebagai berikut:

- Mendistribusikan produksi perikanan dari kota-kota besar menuju pelosok-pelosok daerah untuk stabilisasi harga, dibantu oleh penggunaan SLID (Sistem Logistik Ikan Daerah).
- Menyelenggarakan Pasar Murah Bersubsidi yang menggunakan APBD Pemda, terutama ditargetkan bagi masyarakat dengan penghasilan yang terdampak COVID-19.

- Memastikan ketersediaan pasokan gula pasir dan bawang putih yang didatangkan dari luar daerah, terutama menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru di bulan Desember 2020.
- Menstabilkan pasokan ayam ras agar harga daging ayam mendekati target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian secara nasional.
- Memperketat pengawasan arus keluar/masuk ternak babi agar mempercepat pemulihan ekonomi para peternak babi pasca wabah African Swine Flu.
- Mempersiapkan petani untuk memanfaatkan musim hujan yang diprediksi BMKG akan mulai pada bulan November 2020

Bab IV.

STABILITAS SISTEM KEUANGAN DAERAH

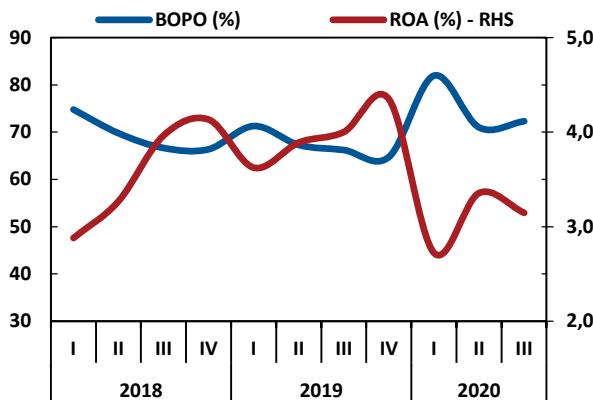
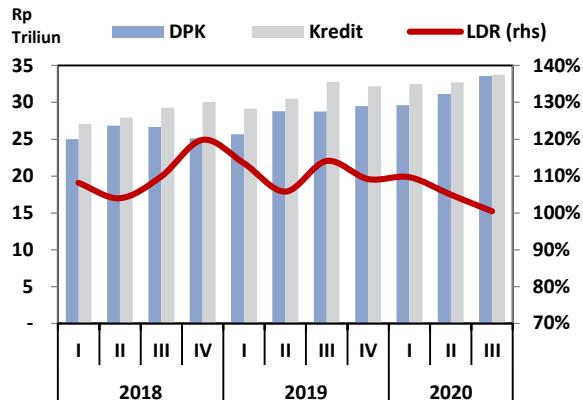
Secara umum, kondisi stabilitas sistem keuangan di Provinsi NTT pada triwulan III 2020 masih terjaga. Hal ini tercermin dari pertumbuhan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang meningkat, meskipun pertumbuhan penyaluran kredit melambat. DPK tumbuh sebesar 16,90% (yoY), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,11% (yoY). Di sisi lain, penyaluran kredit tumbuh sebesar 4,13% (yoY), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,49% (yoY). Kinerja penyaluran kredit rumah tangga masih kuat, namun kredit usaha UMKM mengalami kontraksi.

4.1 Kondisi Umum

4.1.1 Kinerja Bank Umum

Pada triwulan III 2020, kinerja bank umum di Provinsi NTT masih cukup terjaga. *Return on Asset (ROA)* perbankan di triwulan III 2020 tercatat sebesar 3,15%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,36%. Sementara itu, tingkat efisiensi perbankan juga menurun. Hal ini tercermin dari Beban Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) yang tercatat sebesar 72,32%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 71,01% (Grafik 4.1).

Fungsi intermediasi perbankan masih terjaga, meskipun terus melanjutkan tren penurunan sejak triwulan I 2020. *Loan to Deposit ratio (LDR)* tercatat sebesar 100,45%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 104,96% (Grafik 4.2). Hal ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan kredit yang terus melambat di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, rasio *Non-Performing Loan (NPL)* tercatat sebesar 1,86%, masih lebih rendah dari level 5%. Meskipun demikian, di tengah pandemi COVID-19, rasio NPL tidak cukup mencerminkan tingkat risiko kredit yang sebenarnya. Hal ini disebabkan banyak debitur yang mengajukan restrukturisasi kredit akibat usaha yang terdampak COVID-19. Maka dari itu, di beberapa segmen pembahasan ini, rasio *Loan at Risk (LaR)* akan digunakan. Bila NPL mengukur jumlah kredit dengan tingkat kolektabilitas 3 s.d. 5, maka LaR mengukur jumlah kredit dengan kolektabilitas tingkat 1 yang direstrukturasi, ditambah dengan kredit dengan kolektabilitas tingkat 2 s.d. 5.


Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.1: Perkembangan Profitabilitas Bank Umum

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.2: Perkembangan LDR Bank Umum

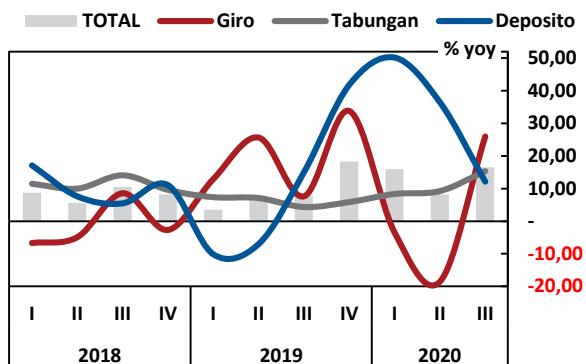
Tabel 4.1: Perkembangan Indikator Bank Umum di Provinsi NTT

Indikator	Nominal (dalam Rp Miliar)							Pertumbuhan (% yoy)						
	2019				2020			2019				2020		
	I	II	III	IV	I	II	III	I	II	III	IV	I	II	III
Aset	37.265	40.849	42.870	42.943	43.917	46.159	48.994	6,84	5,04	16,33	16,01	17,85	13,00	14,29
DPK	25.680	28.817	28.748	29.497	29.651	31.154	33.605	2,67	7,26	7,84	17,53	15,46	8,11	16,90
Giro	5.798	7.676	5.926	4.392	5.614	6.408	7.616	6,05	21,91	6,25	26,28	(3,18)	(16,51)	28,53
Tabungan	13.531	14.306	14.386	16.364	14.665	15.605	16.549	7,25	7,01	4,37	5,83	8,38	9,08	15,03
Deposito	6.351	6.835	8.436	8.741	9.372	9.141	9.441	(8,33)	(5,07)	15,61	41,96	47,58	33,74	11,91
Kredit	29.136	30.481	32.794	32.205	32.521	32.699	33.751	7,68	9,11	11,98	7,11	11,62	7,28	2,92
Modal Kerja	8.988	9.739	10.571	10.292	10.293	11.394	11.599	10,87	12,10	17,05	9,99	14,52	16,99	9,73
Investasi	2.531	2.590	3.089	2.578	2.653	3.225	3.644	6,30	4,86	21,00	(3,39)	4,81	24,48	17,97
Konsumsi	17.616	18.152	19.134	19.335	19.574	19.788	20.703	6,32	8,19	8,09	7,17	11,11	9,01	8,20
% LDR	113,46	105,78	114,08	109,18	109,68	104,96	100,43							
% NPL (Gross)	2,10	2,49	2,41	2,01	2,02	1,85	1,86							

Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi KC/KCP), diolah

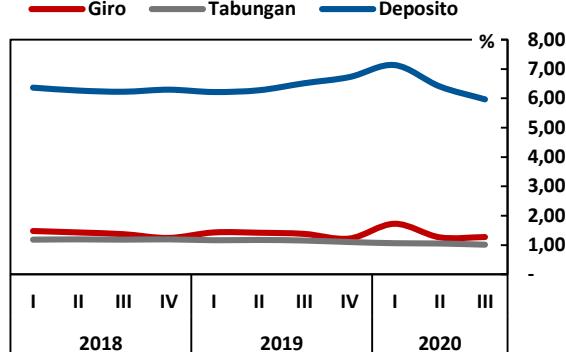
4.1.2 Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai 16,90% (yoY), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 8,11% (yoY) (Grafik 4.3). Akselerasi pertumbuhan DPK didorong oleh pertumbuhan DPK jenis tabungan yang tumbuh 15,03% (yoY). Pertumbuhan tabungan terutama bersumber dari nasabah dengan rekening senilai Rp1 miliar atau lebih. Hal ini diakibatkan banyak nasabah yang memindahkan dana deposito menjadi tabungan seiring dengan penurunan suku bunga deposito. Sementara itu, giro tumbuh sebesar 28,53% (yoY) setelah di triwulan sebelumnya mengalami kontraksi 16,51% (yoY), juga didorong oleh pemindahan dana dari deposito. Di sisi lain, deposito tumbuh melambat menjadi 11,91% (yoY), seiring dengan suku bunga deposito yang berangsur menurun (Grafik 4.4).



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.3: Pertumbuhan DPK dan Komponennya

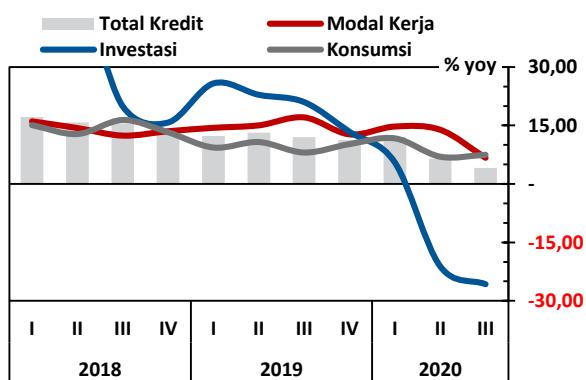


Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.4: Suku Bunga Tertimbang Berdasarkan Jenis Simpanan

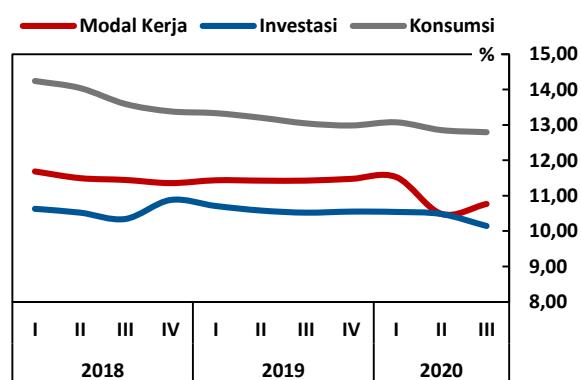
4.1.3 Penyaluran Kredit

Pertumbuhan kredit mencapai 4,13% (yoY), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 6,49% (yoY) (Grafik 4.5). Pertumbuhan kredit yang terus melanjutkan tren perlambatan terutama dipengaruhi oleh kredit investasi yang mengalami kontraksi sebesar 25,75% (yoY). Sementara itu, kredit modal kerja tumbuh melambat sebesar 6,74% (yoY). Kinerja penyaluran kredit investasi dan modal kerja yang menurun terutama dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang masih tertekan, serta perbankan yang masih berhati-hati menyalurkan kredit usaha di tengah pandemi COVID-19. Hal ini sesuai dengan tingkat *Loan-at-Risk (LaR)* kredit investasi dan modal kerja yang masih tinggi (Grafik 4.7). Di sisi lain, kredit konsumsi tumbuh sebesar 7,51% (yoY), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan keyakinan konsumen yang membaik di triwulan III 2020.



Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi proyek), diolah

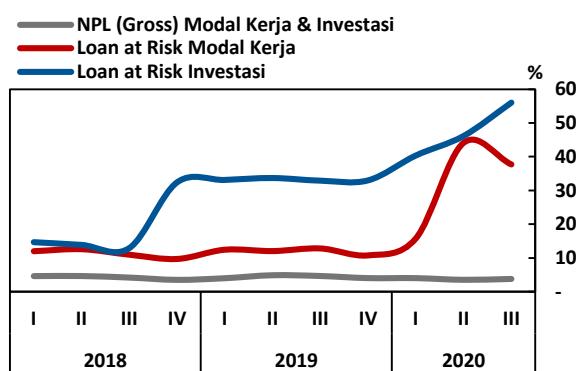
Grafik 4.5: Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

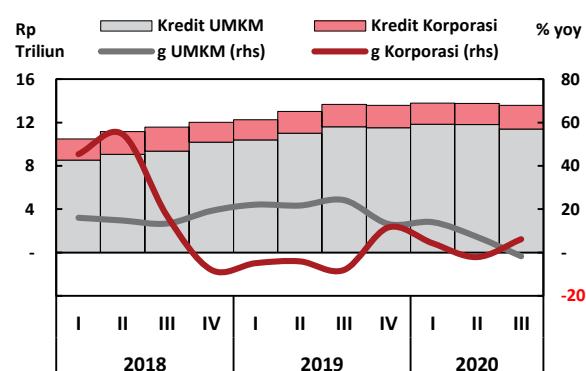
Grafik 4.6: Suku Bunga Tertimbang Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

Kredit usaha di Provinsi NTT masih didominasi oleh UMKM, belum berubah dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan mesin penggerak ekonomi NTT. Meskipun demikian, kredit UMKM mencatat kontraksi sebesar 1,79% (yo), melanjutkan tren penurunan kinerja sejak triwulan I 2020 akibat dampak dari COVID-19. Di sisi lain, kredit korporasi non-UMKM tumbuh sebesar 6,11% (yo), setelah mencatat kontraksi di triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit korporasi didorong oleh penyaluran kredit usaha ke sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, serta sektor akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman. Hal ini sejalan dengan adaptasi kebiasaan baru dan prospek ekonomi yang menunjukkan pemulihan.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

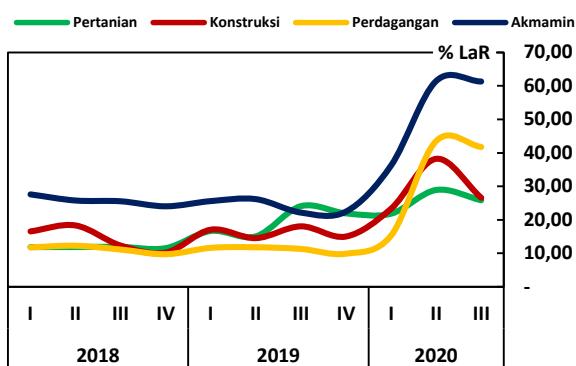
Grafik 4.7: Risiko Kredit Usaha



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

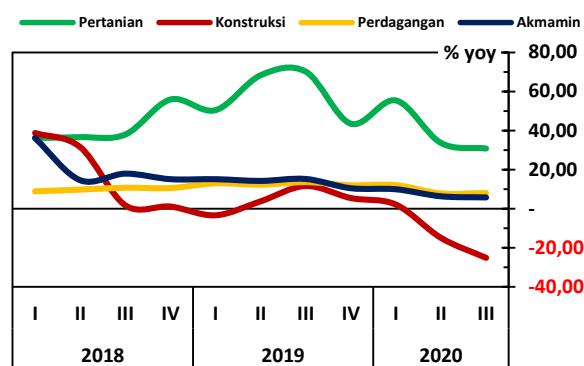
Grafik 4.8: Perkembangan Kredit Usaha Berdasarkan Kategori Usaha

Di triwulan III 2020, hampir semua sektor lapangan usaha mencatatkan risiko kredit yang menurun, yang menunjukkan perbaikan kualitas kredit. Hal ini tercermin dari LaR kredit sektor pertanian, konstruksi, perdagangan dan akmamin yang menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, mengindikasikan bahwa kinerja sektor-sektor tersebut berangsur-angsur pulih. Meskipun demikian, tingkat risiko kredit masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19. Hal ini tercermin dari LaR kredit modal kerja dan investasi yang melonjak tinggi sejak triwulan I 2020 (grafik 4.7). Selanjutnya, kredit usaha sektor pertanian, perdagangan dan akmamin masih mampu mencatat pertumbuhan di triwulan III 2020. Namun, kredit sektor konstruksi masih mencatat kontraksi yang terus berlanjut dari triwulan sebelumnya, mengingat bahwa masih banyak proyek konstruksi yang tertunda di triwulan III 2020.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.9: Risiko Kredit Usaha (*Loan at Risk*) di Beberapa Sektor Ekonomi



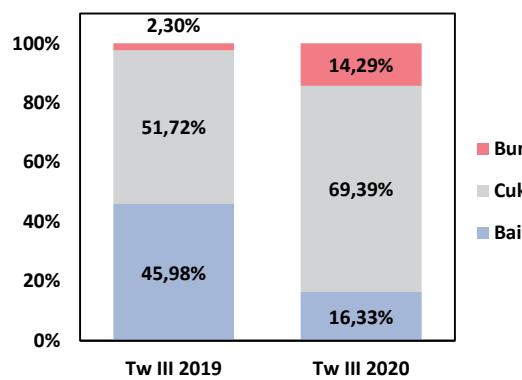
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.10: Pertumbuhan Kredit Usaha di Beberapa Sektor Ekonomi

4.2 Kinerja Korporasi Nonkeuangan

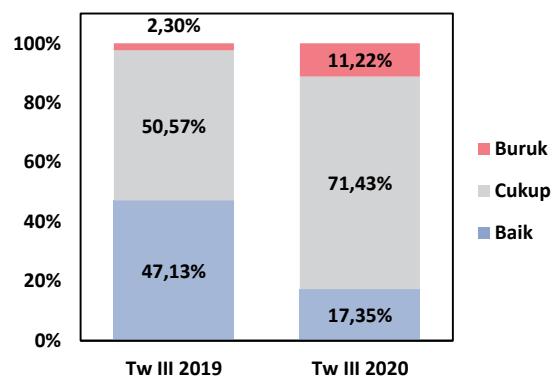
4.2.1 Kondisi dan Prospek Usaha

Di triwulan III 2020, korporasi nonkeuangan cenderung mengalami penurunan kondisi usaha. Hal ini tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh KPw BI NTT. Dari segi rentabilitas (kemampuan korporasi menghasilkan laba operasional), sebanyak 14,29% dari perusahaan responden menyatakan mengalami kondisi buruk, lebih tinggi dibandingkan 2,30% di periode yang sama di tahun sebelumnya. Sementara itu, hanya 16,33% dari perusahaan responden menyatakan berada pada kondisi rentabilitas yang baik, lebih sedikit dibandingkan 45,98% di periode yang sama di triwulan sebelumnya (Grafik 4.11). Hal yang serupa juga terjadi pada segi likuiditas korporasi (jumlah kas/setara kas yang dimiliki oleh korporasi) yang juga memburuk (Grafik 4.12)



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha BI, diolah

Grafik 4.11: Kondisi Rentabilitas Korporasi

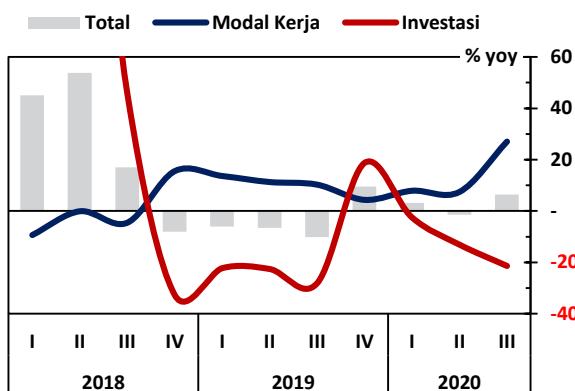


Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha BI, diolah

Grafik 4.12: Kondisi Likuiditas Korporasi

4.2.2 Penyaluran Kredit Korporasi

Kredit korporasi di triwulan III 2020 tumbuh sebesar 6,45% (yoY), meningkat setelah di triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 1,49% (yoY) (Grafik 4.13). Pertumbuhan kredit korporasi terutama bersumber dari kredit modal kerja yang tumbuh 27,04% (yoY). Hal ini didorong oleh penyaluran kredit ke sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan, sejalan dengan adaptasi kebiasaan baru serta prospek ekonomi yang mulai menunjukkan pemulihan. Di sisi lain, kredit investasi mengalami kontraksi sebesar 21,38% (yoY), melanjutkan tren dari triwulan I 2020. Hal ini disebabkan oleh penyaluran kredit ke sektor konstruksi yang menurun seiring dengan banyaknya proyek infrastruktur yang tertunda. Kualitas kredit investasi juga terus memburuk, tercermin dari LaR kredit investasi yang terus meningkat (Grafik 4.14).



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.13: Pertumbuhan Kredit Korporasi Non Keuangan



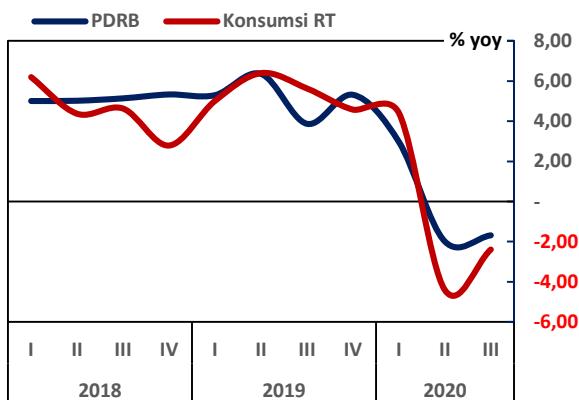
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.14: Risiko Kredit (Loan at Risk) Korporasi Non Keuangan

4.3 Kinerja Keuangan Rumah Tangga

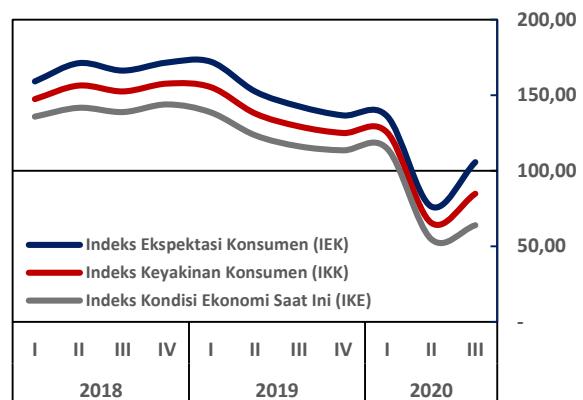
4.3.1 Kondisi Rumah Tangga

Kondisi keuangan sektor rumah tangga di triwulan III 2020 menunjukkan indikasi pemulihan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Konsumsi rumah tangga tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,38% (yoY), lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi sebesar 4,40% (yoY) (Grafik 4.15). Indikasi pemulihan konsumsi rumah tangga juga terkonfirmasi oleh hasil Survei Konsumen (SK) yang dilakukan oleh KPw BI NTT yang menunjukkan perbaikan tingkat keyakinan konsumen (Grafik 4.16). Meskipun demikian, keyakinan konsumen masih belum pulih ke level sebelum pandemi COVID-19.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

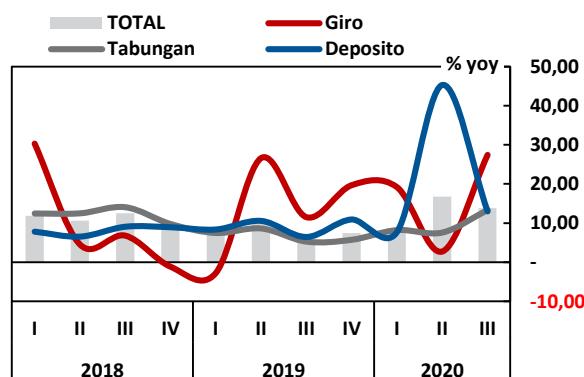
Grafik 4.15: Pertumbuhan PDRB dan Konsumsi Rumah Tangga



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

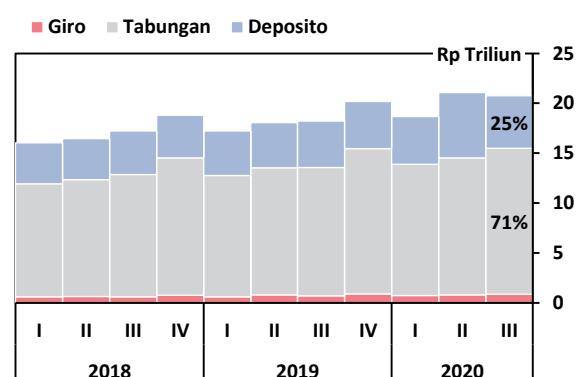
Grafik 4.16: Survei Konsumen Bank Indonesia

Sementara itu, DPK rumah tangga mencatat pertumbuhan sebesar 13,80% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,79% (yoy) (Grafik 4.17). Bila dilihat lebih rinci, perlambatan pertumbuhan DPK terutama bersumber dari dana deposito rumah tangga yang tumbuh melambat seiring dengan menurunnya tingkat suku bunga deposito. Di sisi lain, dana tabungan tumbuh sebesar 13,38% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, pertumbuhan tabungan didorong oleh nasabah-nasabah dengan nilai rekening Rp1 miliar atau lebih. Hal ini diakibatkan banyak nasabah yang memindahkan dana deposito menjadi tabungan seiring dengan penurunan suku bunga deposito. Selanjutnya, dana giro tumbuh sebesar 27,40% (yoy). Pertumbuhan giro tidak terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan DPK rumah tangga karena pangannya yang minim (Grafik 4.18).



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.17: Pertumbuhan DPK Rumah Tangga

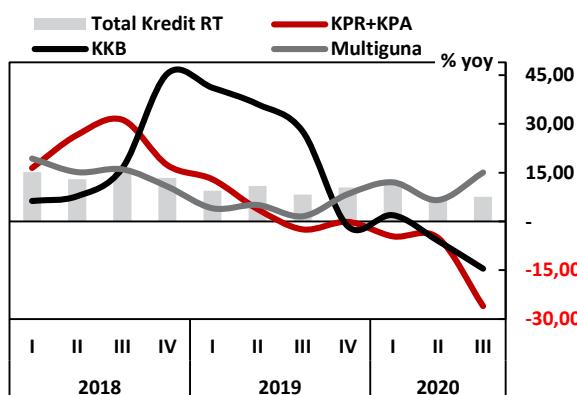


Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.18: Preferensi Jenis Simpanan Nasabah Rumah Tangga

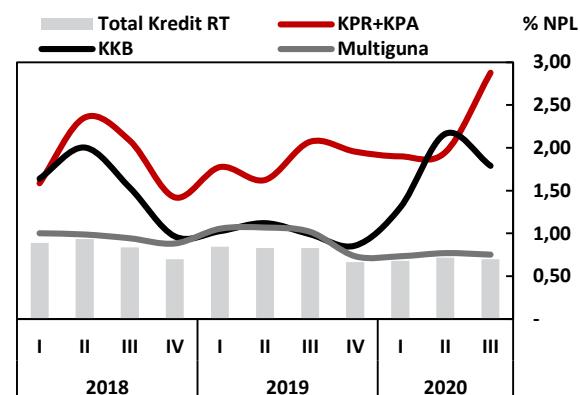
4.3.2 Penyaluran Kredit Rumah Tangga

Kredit rumah tangga di triwulan III 2020 tercatat tumbuh sebesar 7,61% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 7,19% (yoy) (Grafik 4.19). Akselerasi pertumbuhan kredit rumah tangga terutama bersumber dari kredit multiguna yang tumbuh sebesar 15,03% (yoy). Di sisi lain, kredit rumah dan apartemen (KPR & KPA) serta kredit kendaraan bermotor (KKB) masih mencatat kontraksi di triwulan III 2020. Kualitas kredit KPR & KPA juga memburuk, tercermin dari NPL yang meningkat menjadi 2,88% (Grafik 4.20). Hal ini mencerminkan terdapat kenaikan jumlah debitur KPR/KPA yang tidak mampu membayar cicilan pinjaman. Meskipun demikian, KKB dan KPR/KPA memiliki pangsa yang relatif kecil dibandingkan dengan kredit Multiguna. Kualitas kredit Multiguna menunjukkan perbaikan, tercermin dari NPL yang menurun. Hal ini pada akhirnya juga berdampak pada perbaikan kualitas kredit rumah tangga secara keseluruhan, tercermin dari NPL kredit rumah tangga sebesar 0,70%, sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 0,72%.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.19: Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.20: Risiko Kredit Rumah Tangga (Non Performing Loan)

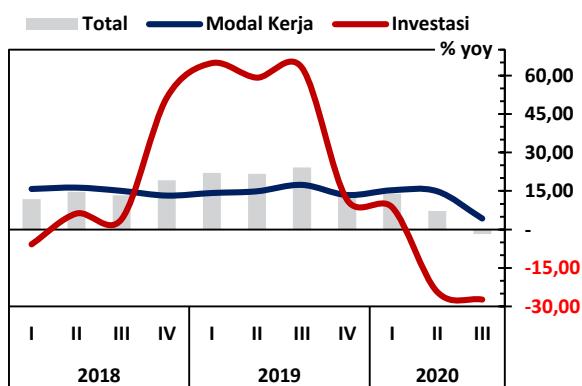
4.4 Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

4.4.1 Penyaluran Kredit UMKM

Kredit UMKM di triwulan III 2020 tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,79% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat masih tumbuh sebesar 7,16% (yoy) (Grafik 4.21). Kontraksi penyaluran kredit UMKM didorong oleh pertumbuhan kredit modal kerja yang melambat serta kredit investasi yang masih mengalami kontraksi. Hal ini mencerminkan berkurangnya aktivitas usaha UMKM

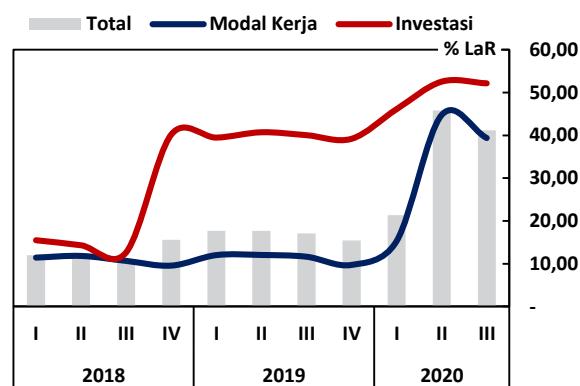
di triwulan III akibat COVID-19, terutama aktivitas investasi. Sementara itu, kualitas kredit UMKM membaik, tercermin dari LaR yang menurun dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 4.22). Meskipun demikian, LaR kredit UMM masih lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi COVID-19.

Dari skala usaha, kredit UMKM paling banyak disalurkan kepada usaha kecil, diikuti oleh usaha menengah, lalu usaha mikro (Grafik 4.23). Di triwulan III 2020, kredit UMKM skala mikro dan menengah mengalami kontraksi, sementara kredit UMKM skala kecil masih dapat tumbuh meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 4.24)



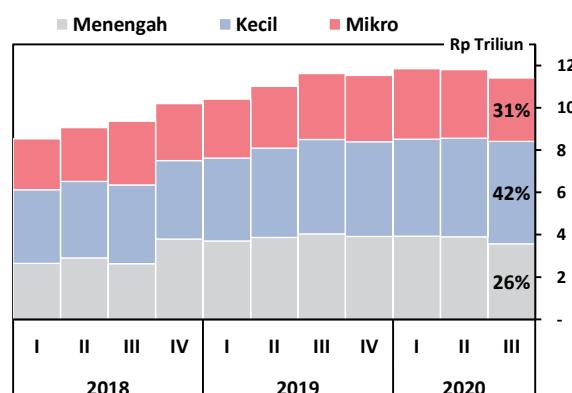
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.21: Pertumbuhan Kredit UMKM



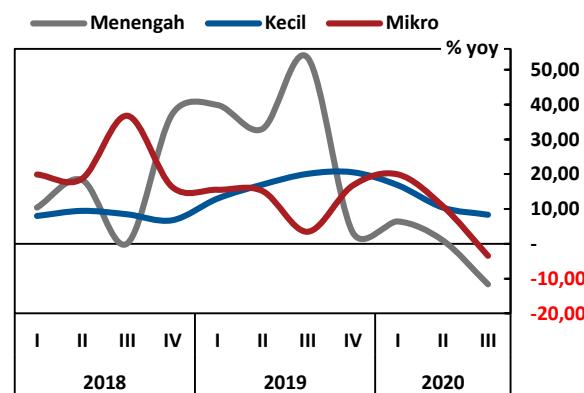
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.22: Risiko Kredit UMKM (Loan at Risk)



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.23: Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.24: Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha

Bab V.

PENYELENGGARAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Indikator sistem pembayaran di Provinsi NTT baik tunai maupun nontunai pada triwulan III 2020 menunjukkan perbaikan, sejalan dengan pemulihan ekonomi seiring kebijakan adaptasi kebiasaan baru. Pada triwulan III 2020, Provinsi NTT menunjukkan kondisi *net outflow* sebesar Rp699,93 miliar. *Net outflow* tersebut tumbuh 18,88% (yoY), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 11,91% (yoY). Transaksi nontunai secara bertahap juga mengalami perbaikan, tercemin dari pertumbuhan volume transaksi SKNBI dan BI RTGS yang meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun, secara nominal, pertumbuhan SKNBI dan BI RTGS masih lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

5.1. Kondisi Umum

Indikator sistem pembayaran di Provinsi NTT baik tunai maupun nontunai pada triwulan III 2020 menunjukkan perbaikan, sejalan dengan pemulihan ekonomi seiring kebijakan adaptasi kebiasaan baru. Pada triwulan III 2020, transaksi tunai di Provinsi NTT menunjukkan kondisi *net outflow* sebesar Rp699,93 miliar. *Net outflow* tersebut tumbuh 18,88% (yoY), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 11,91% (yoY). Transaksi nontunai secara bertahap juga mengalami perbaikan, tercemin dari pertumbuhan volume transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI RTGS) yang meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun, secara nominal, pertumbuhan SKNBI dan BI RTGS masih lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

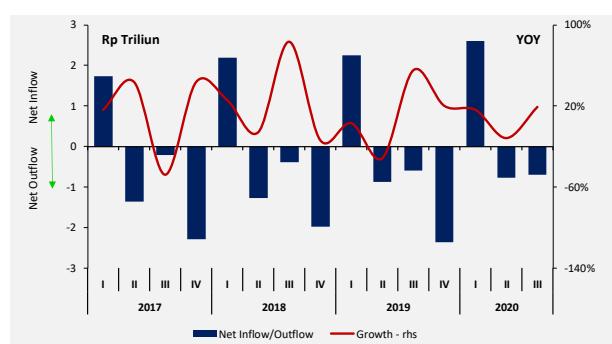
5.2. Transaksi Pembayaran Tunai

5.2.1. Perkembangan *Inflow* dan *Outflow*

Pada triwulan III 2020, Provinsi NTT menunjukkan kondisi *net outflow* atau aliran uang keluar lebih besar dibandingkan dengan uang masuk sebesar Rp699,93 miliar. *Net outflow* tersebut tumbuh 18,88% (yoY), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 11,91% (yoY). Hal ini sejalan dengan

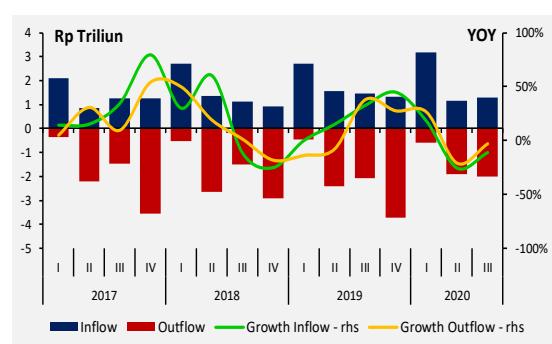
perbaikan ekonomi di Provinsi NTT, di mana secara tahunan, kontraksi ekonomi berkurang menjadi 1,68% (yoY) dari kontraksi pada triwulan II 2020 sebesar 1,99% (yoY).

Meskipun terkontraksi, *inflow* dan *outflow* Provinsi NTT pada triwulan III 2020 menunjukkan perbaikan. *Inflow* atau aliran uang masuk ke Bank Indonesia pada triwulan III 2020 tercatat sebesar Rp1,31 triliun atau terkontraksi sebesar 11,39% (yoY). Kontraksi *inflow* tersebut berkurang dibandingkan dengan triwulan II 2020 sebesar 25,80% (yoY). Sementara itu, *outflow* pada triwulan III 2020 mencapai Rp2,01 triliun atau terkontraksi sebesar 2,77% (yoY). *Outflow* tersebut membaik dibandingkan dengan triwulan II 2020 yang terkontraksi sebesar 20,83% (yoY).



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Tunai di Provinsi NTT



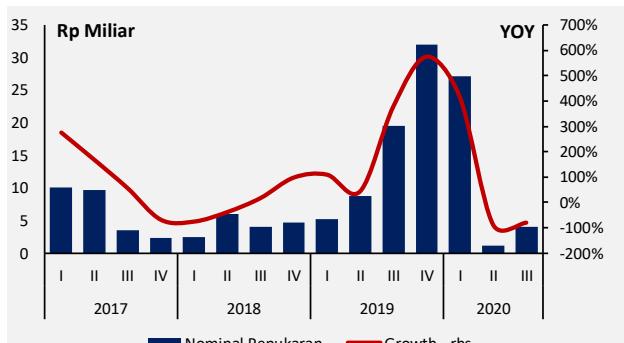
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.2 Perkembangan Inflow dan Outflow Transaksi Tunai Provinsi NTT

5.2.2. Perkembangan Kegiatan Layanan Kas

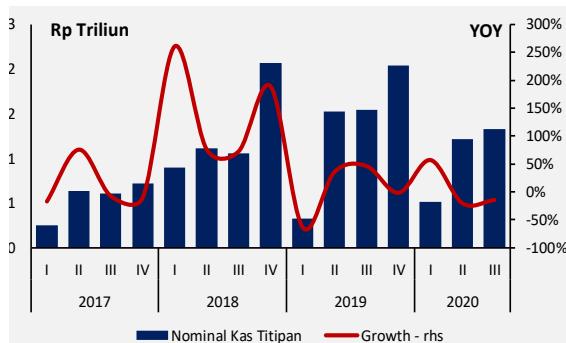
Secara umum, layanan kas di Provinsi NTT pada triwulan III 2020 mengalami peningkatan. Layanan penukaran yang dilakukan di loket Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT pada triwulan III 2020 mencapai Rp3,99 triliun atau terkontraksi sebesar 79,57% (yoY). Meskipun demikian, kondisi tersebut lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 87% (yoY). Pengiriman uang layak edar di kas titipan pada triwulan III 2020 mencapai Rp1,33 triliun. Kinerja pengiriman uang ke kas titipan meningkat, tercermin dari kontraksi yang berkurang menjadi 14,06% (yoY) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 20,13% (yoY). Peningkatan ini dipengaruhi oleh kebijakan adaptasi kebiasaan baru di sektor transportasi yang mendukung distribusi uang layak edar di wilayah Provinsi NTT. Di samping itu, peningkatan juga didorong oleh pembukaan kas titipan kesembilan di Provinsi NTT yakni

Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat). Di sisi lain, layanan kas keliling pada triwulan III 2020 tidak dilaksanakan sebagai upaya antisipasi penyebaran pandemi COVID-19.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.3 Perkembangan Layanan Penukaran Bank Indonesia Provinsi NTT



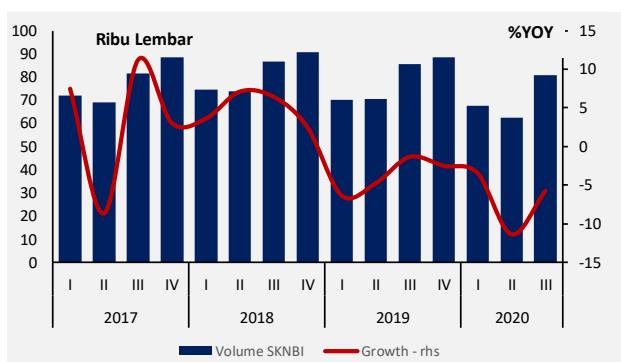
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.4 Perkembangan Pengiriman Uang Kepada Kas Titipan Provinsi NTT

5.3. Transaksi Pembayaran Nontunai

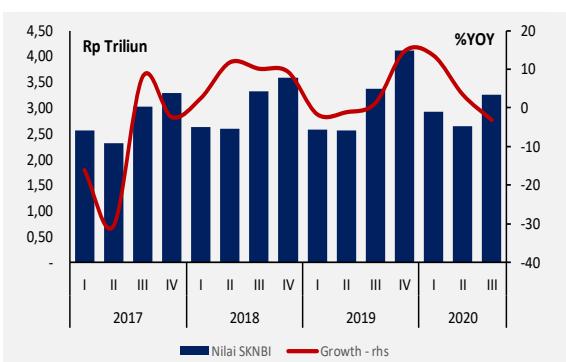
5.3.1. Perkembangan SKNBI

Pada triwulan III 2020, penggunaan transaksi kliring di Provinsi NTT mulai menunjukkan perbaikan. Berdasarkan volume, transaksi kliring pada triwulan III 2020 mencapai 80.651 lembar atau terkontrak sebesar 5,75% (yoym). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2020 yang terkontrak sebesar 11,33% (yoym). Nominal kliring di Provinsi NTT pada triwulan III 2020 tercatat sebesar Rp3,26 triliun, terkontrak 3,19% (yoym), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh positif 3,42% (yoym). Secara triwulan, pertumbuhan nominal kliring meningkat menjadi 22,87% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontrak sebesar 9,59% (qtq).



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.5 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.6 Perkembangan Nominal Transaksi SKNBI

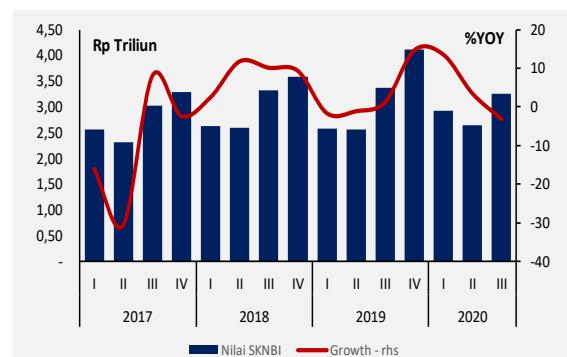
5.3.2. Perkembangan BI RTGS

Pada triwulan III 2020, transaksi nontunai nilai besar melalui BI RTGS menunjukkan peningkatan volume. Volume BI RTGS pada triwulan III 2020 mencapai 5.025 transaksi atau tumbuh 100,76% (yo), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 93,86% (yo). Di sisi lain, nominal transaksi BI RTGS mengalami penurunan kinerja. Nominal transaksi BI RTGS pada triwulan III 2020 tercatat sebesar Rp28,32 triliun. Pertumbuhan nominal BI RTGS melambat dari 465,98% (yo) pada triwulan II 2020 menjadi 66,78% (yo) pada triwulan III 2020. Secara triwulanan, pertumbuhan nominal BI RTGS juga menunjukkan perlambatan menjadi 5,40% (qtq), dibandingkan dengan triwulan II 2020 yang tumbuh 135,39% (qtq).



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.7 Perkembangan Volume Transaksi BI RTGS



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.8 Perkembangan Nominal Transaksi BI RTGS

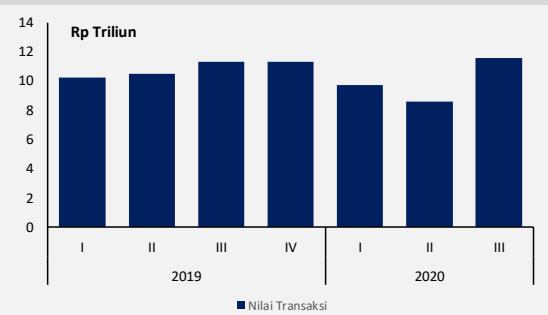
Boks 2. Elektronifikasi Pembayaran Provinsi NTT Di Tengah Pandemi COVID-19

Penggunaan transaksi nontunai di tengah pandemi COVID-19 dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi sekaligus antisipasi penyebaran pandemi COVID-19. Bank Indonesia terus mendukung penggunaan transaksi nontunai. Pemerintah dalam mempercepat realisasi penyaluran bansos secara nontunai antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako Nontunai (BSNT). Di Provinsi NTT, PKH telah diterima oleh 373.963 KPM dengan nilai realisasi sebesar Rp121,16 miliar pada bulan September 2020. Sementara itu, BSNT telah diterima oleh 515.944 KPM dengan nilai realisasi sebesar Rp103,19 miliar. Kebijakan Bank Indonesia lainnya untuk mendorong transaksi nontunai antara lain penurunan biaya layanan SKNBI, penurunan batas minimum pembayaran dan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit, penurunan biaya layanan sistem BI RTGS, perluasan akseptansi digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS¹ antara lain perpanjangan kebijakan *merchant discount rate* (MDR) 0% untuk Usaha Mikro sampai dengan 31 Desember 2020, serta percepatan elektronifikasi transaksi keuangan khususnya pemerintah daerah.

Transaksi nontunai melalui Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) serta transaksi melalui *e-commerce* di Provinsi NTT meningkat pada triwulan III 2020. Jumlah ekspansi kartu kredit dan ATM/debit hingga triwulan III 2020 masing-masing mencapai 40 ribu unit dan 2,23 juta unit atau tumbuh 39,44% (yoy) dan 20,31% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Perluasan pengguna APMK menggambarkan bahwa akseptansi masyarakat terhadap pembayaran nontunai semakin meningkat di tengah pandemi COVID-19. Nominal transaksi kartu ATM/debit pada triwulan III mencapai Rp11,58 triliun, tumbuh meningkat menjadi 2,42% (yoy) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 16,44% (yoy). Di sisi lain, nominal transaksi kartu kredit pada triwulan III 2020 mencapai Rp47,44 miliar, terkontraksi sebesar 77,74% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 38,87% (yoy). Sementara itu, akselerasi transaksi *e-commerce* di Provinsi NTT terus meningkat di tengah pandemi COVID-19. Pada triwulan III 2020,

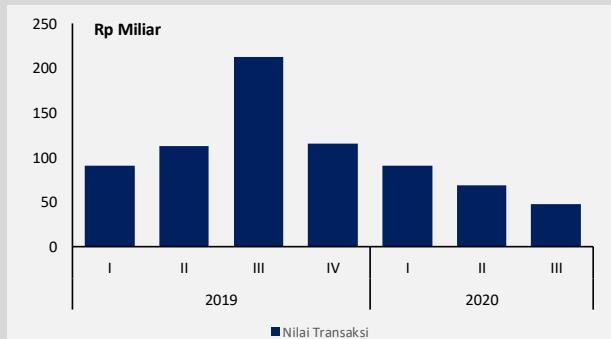
¹ Quick Response Code Indonesian Standard

nominal transaksi *e-commerce* tercatat sebesar Rp239,98 miliar, tumbuh 87,41% (yoY), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 43,48% (yoY).



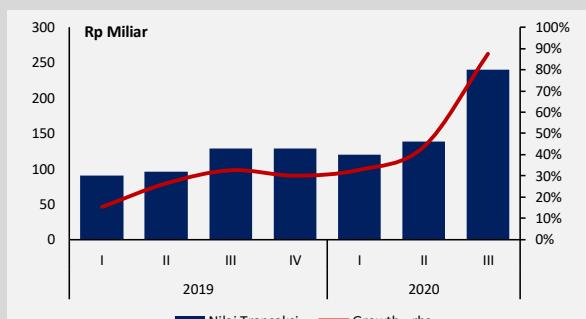
Sumber: Bank Indonesia

Grafik Boks 2.1. Perkembangan Nilai Transaksi Kartu ATM/Debet di Provinsi NTT



Sumber: Bank Indonesia

Grafik Boks 2.2. Perkembangan Nilai Transaksi Kartu Kredit di Provinsi NTT



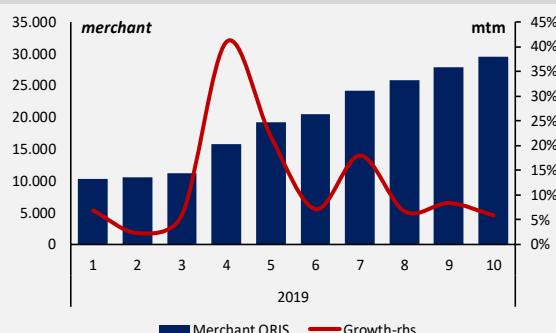
Sumber: Bank Indonesia

Grafik Boks 2.3. Perkembangan Nilai Transaksi *E-Commerce* di Provinsi NTT

Bank Indonesia juga terus bersinergi untuk mendorong akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP). Pada awal tahun 2020, Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika menandatangani Nota Kesepahaman ETP. Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut bertujuan mendorong transformasi digital di daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan dan perluasan ETP pada khususnya dan transaksi pembayaran ritel di masyarakat pada umumnya untuk Indonesia Maju. Di sisi lain, kualitas infrastruktur pendukung seperti jaringan telekomunikasi dan listrik daerah, ketersediaan akses dan kanal pembayaran, kapasitas Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) serta tingkat pemahaman masyarakat dan Pemda perlu terus ditingkatkan. Di berbagai kesempatan, Bank Indonesia melakukan sosialisasi

dan *focus group discussion* bersama dengan Pemda dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk meningkatkan *awareness* terkait ETP.

Bank Indonesia terus mendorong penggunaan QRIS sebagai standardisasi penggunaan QR dalam mendukung *financial inclusion* dan media transaksi nontunai nirsentuh. QRIS adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). QRIS yang didukung oleh 37 PJSP bank dan nonbank, juga terhubung dengan tabungan, kartu debit, uang elektronik, dan kartu kredit. Jenis QRIS pada *merchant* dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: (1) *Static QR Code* yang bersifat tetap, sehingga ditampilkan dalam *sticker/print out* dan nominal transaksi di-*input* oleh customer pada mobile device; serta (2) *Dynamic QR Code*, yang dibuat secara *realtime* pada saat transaksi sehingga QR code berbeda pada setiap transaksi dengan nominal di-*input* oleh *merchant*.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik Boks 2.4. Perkembangan Jumlah *Merchant QRIS* di Provinsi NTT



Sumber: Bank Indonesia

Grafik Boks 2.5. Sebaran *Merchant QRIS* di Provinsi NTT Berdasarkan Kabupaten/Kota

Sampai dengan Oktober 2020, *merchant* QRIS di Provinsi NTT mencapai **29.547** yang didominasi oleh jenis usaha mikro sebesar 71%. Kota Kupang menempati peringkat pertama jumlah *merchant* QRIS terbanyak di Provinsi NTT. Dalam upaya mengakselerasi akseptansi QRIS di Provinsi NTT, Bank Indonesia melakukan serangkaian kegiatan seperti (1) *Launching* Web Pasar BRI dan Portal NTT Maju (24 September 2020) sebagai media untuk memperkenalkan QRIS bagi masyarakat NTT, (2) FGD dengan Pemerintah Daerah, fintech dan *stakeholders* terkait untuk memperluas penggunaan QRIS khususnya untuk ETP, (3) melakukan literasi triwulan kepada masyarakat, serta (4) bekerja sama dengan PD Pasar di Provinsi NTT, sektor pariwisata dan transportasi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus bekerjasama memperluas akseptansi QRIS khususnya di wilayah Provinsi NTT.



KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TIM ADVISORY DAN PENGEMBANGAN EKONOMI
Jl. El Tari No. 39 Kupang - NTT
Telp. (0380) 832364, Fax. (0380) 822103
www.bi.go.id

